



PERAN SEKTOR KEUANGAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR)

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR)

PERAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Peran Sektor Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xii+161 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-39-6

Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Rasbin, STP, M.SE.

Ari Muliarta Ginting, S.E., M.SE.

Ariesy Tri Mauleny, S.Si, M.E.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Lisnawati, S.Si., M.SE.

Venty Eka Satya, S.E., MSi.

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Desain Sampul:

Abue

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan buku bunga rampai dengan judul **"Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia"** yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan sektor keuangan, khususnya dalam menopang perekonomian Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan namun juga berdasarkan *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 6 (enam) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai perkembangan sektor keuangan di Indonesia dari berbagai perspektif. Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Rasbin, Ari Muliarta Ginting, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Lisnawati dan Venty Eka Satya untuk tulisannya yang beragam warna mengenai sektor keuangan di Indonesia, baik itu sektor swasta maupun pemerintahan.

Selain itu, saya sampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada Prof. (Riset) Carunia Mulya Firdausy, Ph.D. yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan P3DI, Setjen DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan Rancangan Undang-

Undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian,
Pengelolaan Data dan Informasi,
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani
NIP. 19600419 198803 2 001

PROLOG

Pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi isu yang kontroversi di berbagai kalangan ekonom. Perdebatan tersebut berpusat pada pertanyaan apakah perkembangan sektor keuangan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Beberapa ekonom sepakat dan percaya bahwa perkembangan sektor keuangan merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, sektor keuangan secara umum digerakkan oleh dua lembaga yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian. Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Khusus untuk Indonesia, sektor keuangan masih didominasi oleh perbankan. Akibatnya, segala sumber pembiayaan pembangunan dan perekonomian tergantung dari perbankan. Sementara sektor keuangan lainnya relatif kurang berkembang.

Buku yang berjudul **"Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia"** ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Disamping itu buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan dampaknya terhadap perekonomian di masa yang akan datang.

Buku ini terdiri dari 6 Bab. Bab pertama mengungkap tentang perkembangan *early warning system* keuangan di Indonesia. Dalam bab ini diberikan antara lain tinjauan teori dan empiris mengenai model-model parametrik yang telah ada dalam melihat krisis perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak pertumbuhan kredit sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi pada bab 2.

Bab 3 mendiskusikan kebijakan penyertaan modal negara pada BUMN untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Dilanjutkan dengan pembahasan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil di bab 4.

Dua bab lainnya membahas mengenai sistem keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional (Bab 5) dan perkembangan perubahan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bab 6). Untuk merangkum analisis dan pembahasan dari seluruh bab tersebut diberikan epilog pada bagian akhir buku ini.

Editor memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat kepada Tim Penulis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI atas terbitnya buku ini.

Editor meyakini kajian dalam buku ini dapat memberikan inspirasi dan masukan penting bagi para pengambil kebijakan, terutama pihak legislatif. Buku ini juga diyakini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan tentang peranan sektor keuangan di Indonesia. Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2015

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA P3DI	iii
PROLOG	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii

TULISAN PERTAMA

EARLY WARNING SYSTEM KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA: TINJAUAN TEORI DAN EMPIRIS MODEL-MODEL PARAMETRIK

<i>oleh: Rasbin</i>	1
I. Pendahuluan	2
II. Tataran Konsep tentang Model <i>Early Warning System</i>	7
III. Model EWS dan Indikator-Indikatornya	11
IV. Penutup	22
Daftar Pustaka	25

TULISAN KEDUA

PENGARUH PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

<i>oleh: Ari Muliarta Ginting</i>	27
I. Pendahuluan	28
II. Tataran Konsep Peran Sektor Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	30
III. Perkembangan Kredit yang Disalurkan oleh Perbankan di Indonesia	34
IV. Pengaruh Perkembangan Kredit yang Disalurkan oleh Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	38

V. Penutup	43
Daftar Pustaka	45

TULISAN KETIGA

KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEREKONOMIAN NASIONAL

<i>oleh: Ariesy Tri Mauleny</i>	47
I. Pendahuluan	48
II. BUMN dan Kinerja Perekonomian	51
III. Kebijakan Penyertaan Modal Negara	59
IV. Perkembangan, Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	64
V. Penutup	74
Daftar Pustaka	76

TULISAN KEEMPAT

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL

<i>oleh: Nidya Waras Sayekti</i>	79
I. Pendahuluan	80
II. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	81
III. Produk Perbankan Syariah	84
IV. Ekonomi Sektor Riil	86
V. Kinerja Perbankan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil	88
VI. Kendala dan Masalah yang Dihadapi Perbankan Syariah	92
VII. Penutup	97
Daftar Pustaka	98

TULISAN KELIMA

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT PEREKONOMIAN NASIONAL

<i>oleh: Lisnawati</i>	101
I. Pendahuluan	102
II. Sistem Keuangan Pusat-Daerah	104
III. Indikator Keberhasilan Implementasi Otonomi Daerah	108

IV. Penutup	116
Daftar Pustaka	117
TULISAN KEENAM	
PERUBAHAN MENUJU AKUNTANSI	
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL UNTUK	
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN	
KEUANGAN NEGARA	
<i>oleh: Venty Eka Satya</i>	119
I. Pendahuluan	120
II. Akuntansi Pemerintah dan Perkembangannya	123
III. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara	131
IV. Penutup	137
Daftar Pustaka	139
EPILOG	143
INDEKS	149
BIOGRAFI EDITOR	156
BIOGRAFI PENULIS	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sepuluh Gejolak Finansial Besar di Dunia	2
Tabel 1.	Uji Kausalitas <i>Granger</i>	38
Tabel 2.	Hasil Estimasi – VAR.....	39
Tabel 1.	Perkembangan Kebijakan mengenai BUMN.....	54
Tabel 2.	Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Minoritas BUMN	56
Tabel 3.	Perkembangan Kinerja BUMN.....	56
Tabel 4.	Peran BUMN terhadap APBN	57
Tabel 5.	Daftar 20 BUMN dengan Laba Terbesar Tahun 2013 dan 2014.....	57
Tabel 6.	BUMN yang Merugi Tahun 2013 dan 2014.....	58
Tabel 7.	Perkembangan Dana Investasi Pemerintah Tahun 2010-2015.....	61
Tabel 8.	Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2015.....	63
Tabel 9.	Perkembangan PMN pada BUMN Tahun 2010-2015.....	64
Tabel 10.	PMN pada BUMN Menurut Program Prioritas.....	68
Tabel 1.	Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah.....	89
Tabel 2.	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi.....	91
Tabel 1.	Peta Kapasitas Fiskal Provinsi.....	110
Tabel 2.	Data Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi Tahun 1996-2013.....	112
Tabel 1.	<i>Accrual Accounting and Budgeting In The Public Sector</i>	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	31
Gambar 2. Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Kredit, Pertumbuhan Investasi, Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi	43
Gambar 1. Landasan Hukum Pengelolaan dan Operasional Pembinaan BUMN	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan Ekspor Periode 1981 - 2013	16
Grafik 2. Posisi Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2001 - 2015	17
Grafik 3. Rasio Konsumsi Pemerintah terhadap PDB	18
Grafik 4. Rasio Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa.....	19
Grafik 5. Rasio M2 terhadap Cadangan Devisa Periode 2001 - 2014.....	20
Grafik 6. Perkembangan Defisit Fiskal Indonesia Periode 2001 - 2013.....	21
Grafik 7. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Periode 2005 - 2015.....	22
Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Ekonomi Periode Tahun 2005-2014.....	35
Grafik 2. Perkembangan Realisasi Kredit yang Disalurkan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014.....	36
Grafik 3. Perkembangan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014.....	37
Grafik 1. Indeks Ketimpangan Tahun 2003 Sebelum UU Otonomi Daerah	115
Grafik 2. Indeks Ketimpangan Tahun 2012 Setelah UU Otonomi Daerah	115

TULISAN PERTAMA

***EARLY WARNING SYSTEM* KRISIS KEUANGAN
DI INDONESIA: TINJAUAN TEORI DAN
EMPIRIS MODEL-MODEL PARAMETRIK**

*Rasbin**

* Penulis adalah Peneliti Muda dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

EARLY WARNING SYSTEM KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA: TINJAUAN TEORI DAN EMPIRIS MODEL-MODEL PARAMETRIK

I. PENDAHULUAN

Ekonom dunia, Charles P. Kindleberger, mengatakan bahwa satu-satunya topik yang tak pernah usang untuk dibahas dalam bidang ekonomi adalah krisis. Karena krisis ekonomi akan selalu terjadi dari waktu ke waktu, bermutasi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Pernyataan Charles P. Kindleberger tersebut dapat dilihat dari beberapa krisis yang pernah melanda ekonomi dunia diantaranya *internet bubble*, krisis Amerika Latin, krisis Asia, krisis Rusia sampai krisis finansial global pada 2007/2008. Sepuluh gejolak finansial besar yang pernah terjadi di dunia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Sepuluh Gejolak Finansial Besar di Dunia

No.	Nama Gejolak Finansial
1.	<i>Dutch Tulip Bubble</i> 1636
2.	<i>South Sea Bubble</i> 1720
3.	<i>Mississippi Bubble</i> 1720
4.	<i>Stock Price Bubble</i> 1927-1929
5.	<i>Bank Loans Bubble</i> 1970: kasus gagal bayarannya Meksiko dan beberapa negara sedang berkembang lainnya
6.	<i>Real Estate and Stock Bubble</i> di Jepang 1985-1989
7.	<i>Real Estate and Stock Bubble</i> 1985-1989 di Finlandia, Norwegia dan Swedia
8.	<i>Real Estate and Stock Bubble</i> 1992-1997 di Thailand, Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lainnya di kawasan Asia.
9.	<i>Foreign Investment Bubble</i> di Meksiko dan Amerika Latin 1990-1993
10.	<i>Over-the-counter Stocks Bubble</i> di AS pada 1995-2000

Sumber: Prasetyantoko (2010)

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, krisis akan selalu ber-evolusi dan bermutasi seperti yang dikatakan oleh ekonom Charles P. Kindleberger. Akibatnya, dunia tidak akan pernah sepi dari peristiwa yang namanya krisis, dunia akan selalu dihantui oleh krisis yang datang silih berganti. Oleh karena itu, benar adanya bahwa krisis ekonomi akan selalu menjadi topik yang aktual dan hangat untuk dibahas,¹ baik dalam bentuk diskusi, seminar, *workshop* maupun penelitian.

Mari kita lihat ke belakang, krisis ekonomi yang masih hangat dan terasa dampaknya hingga saat ini yakni krisis Asia 1997 dan krisis *subprime mortgage* 2007/2008. Krisis Asia 1997 berawal dari krisis mata uang baht Thailand yang terjadi bulan Juni 1997. Kemudian menyebar ke seluruh kawasan Asia seperti Filipina, Korea Selatan, bahkan sampai ke Indonesia.

Bagi Indonesia, krisis ekonomi 1997 merupakan krisis yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah berdirinya Bangsa Indonesia. Karena krisis tersebut hampir menyerang dan melumpuhkan semua sendi-sendi perekonomian Indonesia. Krisis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling parah menderita dampak dari krisis mata uang tersebut. Artinya berawal dari krisis mata uang, kemudian krisis tersebut berubah menjadi krisis multidimensi.

Kemudian *deja vu* krisis finansial kembali terjadi, kali ini krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat (AS) tepatnya pada pertengahan 2007 yang dikenal dengan nama krisis *subprime mortgage*. Krisis ini berawal dari gagal bayarannya kredit perumahan kelas dua (*subprime mortgage*), kemudian menyebar luas ke negara-negara lainnya di dunia baik negara maju maupun berkembang.

Tepatnya awal Oktober 2008, krisis tersebut meluas menjadi krisis global dan menjadi pemicu krisis keuangan yang lebih luas mencakup pasar modal dan perbankan di seluruh dunia melalui berbagai macam saluran, termasuk kekeringan likuiditas di perbankan, pelarian modal portofolio, keterbatasan pembiayaan perdagangan, penurunan permintaan global dan secara umum penggerusan kepercayaan di sektor keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, krisis *subprime mortgage* telah memberikan efek domino ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.²

¹ A. Prasetyantoko, *Ponzi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 1-2.

² M.H. Imansyah, *Krisis Keuangan di Indonesia: Dapatkah Diramalkan?* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 1-2.

Sebuah krisis ekonomi atau keuangan (perbankan, mata uang, utang, dan lain-lain) sering dikaitkan dengan buruknya tata kelola perekonomian dan sistem ekonomi yang kurang ramah terhadap pasar. Namun begitu, sistem ekonomi yang berbasis pasar pun (*market based economy*) juga tidak menjamin bahwa negara tersebut kebal terhadap kemungkinan mengalami krisis keuangan atau berbagai krisis sejenis di sektor keuangan seperti krisis di pasar modal atau perbankan. Contohnya AS, negara dengan perekonomian terbesar di dunia pun juga tak luput terkena krisis.³

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa dampak negatif dari krisis finansial sangat besar terhadap perekonomian baik dari sisi moneter maupun fiskal. Bahkan setelah dilakukan *recovery* atas krisis tersebut, perkembangan ekonomi pasca krisis belum sepenuhnya pulih, kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, walaupun berbagai indikator-indikator makro dan finansial sudah menunjukkan perbaikan.

Krisis ekonomi 1997 menyebabkan Indonesia menjadi negara yang paling parah terkena dampak dari krisis tersebut. Akibat krisis tersebut, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi paling tinggi di antara negara-negara Asia lainnya yaitu sebesar 13,1 persen pada tahun 1998. Sedangkan negara yang merupakan sumber dari krisis ekonomi 1997 yakni Thailand hanya mengalami kontraksi sebesar 10,5 persen. Akibat krisis ekonomi 1997 tersebut Indonesia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan restrukturisasi perbankannya, yakni mencapai 45 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan Korea Selatan dan Malaysia masing-masing hanya 15 dan 12 persen dari PDB-nya.⁴

Selain itu, akibat krisis ekonomi 1997 beban fiskal Indonesia hampir mencapai Rp 650 triliun dan berbagai dampak tidak langsung berupa restrukturisasi di berbagai sektor keuangan yang masih belum selesai sampai saat ini termasuk meningkatnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya ketimpangan ekonomi dan menurunnya kegiatan ekonomi. Ini adalah biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia akibat krisis ekonomi

³ M.H. Imansyah, *Op. Cit.*

⁴ Iskandar Simorangkir, "Kajian Indikator Peringatan Dini Bank Runs di Indonesia: Pendekatan Markov-Switching", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15 (1), 2012, hlm. 4-8.

tersebut.⁵ Ada juga yang mengatakan bahwa akibat krisis tersebut, likuiditas di Indonesia mengalami penurunan secara signifikan sehingga keadaan ini mempengaruhi kinerja di sektor keuangan.⁶

Kemudian tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada fundamental perekonomian Indonesia. Seperti penurunan permintaan ekspor dari luar negeri terhadap produk-produk Indonesia. Akibatnya pelaku usaha menurunkan tingkat produksinya sehingga berimbas pada defisit perdagangan yang mengalami peningkatan dan surplus neraca pembayaran yang terus berkurang. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan.⁷

Krisis ekonomi global 2008 tersebut mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia yakni pasar modal, pasar barang, nilai tukar dan pasar tenaga kerja. (1) Pasar modal, akibat krisis global 2008, harga-harga saham mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga mengakibatkan indeks harga saham gabungan (IHSG) turun tajam sebesar 6,96 persen atau 48,96 poin dengan total IHSG sebesar 1.166 poin. Penurunan ini merupakan penurunan paling tinggi bahkan menyamai kondisi penurunan indeks harga saham per tahun 2000. (2) Pasar barang, krisis global 2008 menyebabkan penurunan nilai ekspor Indonesia terutama ekspor ke AS dan Uni Eropa. Produk-produk yang terkena imbas krisis global 2008 diantaranya minyak sawit mentah (CPO), minyak bumi, hasil-hasil perkebunan dan pertambangan, dan produk-produk manufaktur. (3) Nilai tukar, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi akibat pengaruh krisis global 2008 terutama oleh aksi-aksi spekulasi dan kurangnya pasokan dolar AS. Berkurangnya pasokan dolar AS karena terjadi penarikan dolar oleh investor baik untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaannya yang bertujuan untuk memenuhi likuiditasnya. (4) Pasar tenaga kerja, krisis global 2008 menyebabkan beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia.⁸

⁵ M.H. Imansyah, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁶ A. Prasetyantoko, *Op. Cit*.

⁷ Syahrir Ika, *Subprime Mortgage Crisis: Mengguncang Ekonomi Dunia, Cara Indonesia untuk Bertahan* (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm. 155.

⁸ Syahrir Ika, *Op.Cit*, hlm. 153-172.

Kondisi-kondisi tersebut hampir mirip dengan kondisi saat ini (tahun 2015).

Selepas krisis global 2008, ekonomi dunia masih diliputi oleh ketidakpastian. Hal ini menyebabkan resiko pada periode-periode berikutnya di pasar keuangan cukup mengkhawatirkan. Selain itu, ada juga kekhawatiran karena kemungkinan AS akan mengeluarkan kebijakan untuk menormalisasi moneternya. Jika hal ini terjadi maka dampaknya terhadap Indonesia akan serius. Modal-modal asing di Indonesia kemungkinan akan lari ke AS sehingga timbul kekhawatiran akan terjadinya guncangan terhadap perekonomian Indonesia. Kekhawatiran akan krisis finansial 1997 akan terulang lagi. Karena krisis selalu berevolusi dan bermutasi, tidak menutup kemungkinan krisis finansial akan kembali terjadi dan melanda Indonesia.

Berkaca pada krisis ekonomi 1997 dan krisis global 2008, mengantisipasi terjadinya krisis di masa datang merupakan keharusan bagi Indonesia agar dampak dari krisis tersebut dapat diantisipasi atau paling tidak diminimalisir. Oleh karena itu, dalam menghadapi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dibutuhkan beberapa instrumen yang selalu siap sedia mendeteksi segala perubahan mendadak yang mungkin bisa membahayakan perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah dengan membuat suatu sistem peringatan dini atau *early warning system* (EWS).

Melalui EWS ini, ada semacam alarm sebagai peringatan sebelum krisis keuangan terjadi sehingga *policymaker* mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kebijakan penyelamatan yang memadai agar efek negatif dari krisis tersebut dapat dihindari atau dilemahkan.⁹ Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator dini menjelang terjadinya krisis keuangan dan perbankan serta berbagai krisis lainnya. Artinya jika fenomena umum tersebut muncul maka peluang atau kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan menjadi lebih besar sehingga peluang terjadinya krisis keuangan itu sebenarnya bisa diramalkan yaitu dengan melihat berbagai indikator dini. Selain sebagai alarm peringatan dini, model EWS juga dapat digunakan untuk memprediksi krisis yang akan terjadi di masa datang.

⁹ B. Candelon, et. al., "Currency Crisis Early Warning Systems: Why They Should be Dynamic", *International Journal of Forecasting*, 30, 2014, hlm. 1016-1018.

Tantangan dalam situasi seperti ini adalah bagaimana menciptakan suatu model EWS yang tepat sesuai dengan karakteristik perekonomian Indonesia. Karena konteks kompleksitas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis terus berubah dari waktu ke waktu maka pembentukan model EWS yang tepat sebagai alarm peringatan dini dan alat untuk memprediksi krisis di masa datang merupakan hal yang menarik untuk terus diteliti. Selain itu, model EWS yang dibuat dan sudah diterapkan di negara lain belum tentu tepat untuk perekonomian Indonesia.

Kajian yang mendalam tentang pengembangan model-model EWS yang tepat sesuai dengan karakteristik Indonesia untuk mencegah terjadinya lagi krisis finansial sangat diperlukan. Selain sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya krisis, EWS juga dapat digunakan untuk meramalkan dampak krisis melalui krisis yang terjadi di masa lalu dan indikator-indikator ekonomi masa lalu.

Apalagi hingga saat ini belum ada payung hukum bagi Indonesia dalam menghadapi krisis. Indonesia belum mempunyai protokol manajemen krisis yang baik, yang dapat mempersiapkan diri saat terjadinya krisis. Pentingnya payung hukum untuk protokol manajemen krisis karena krisis tidak bisa diperkirakan dengan akurat baik besaran, dampak, efek ketularan maupun kecepatannya. Oleh karena itu, Undang-undang (UU) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai landasan hukum jika terjadi krisis sangat diperlukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, bab ini mencoba mengulas model-model EWS parametrik tentang krisis keuangan baik secara teori maupun empiris kemudian mengkaitkannya dengan data-data indikator makroekonomi yang ada di Indonesia. Harapannya, bab ini dapat menjadi sebuah referensi dalam penyusunan UU JPSK karena UU JPSK sangat penting sebagai payung hukum dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia terutama saat terjadi krisis ekonomi.

II. TATARAN KONSEP TENTANG MODEL *EARLY WARNING SYSTEM*

Model khusus tentang EWS untuk suatu negara perlu dikembangkan berdasarkan keunikan perekonomian suatu negara

yang tidak dapat dideteksi dengan model-model umum yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Apalagi perkembangan kelembagaan dan tingkat monetisasi setiap negara sangat beragam sehingga menyulitkan dalam mengambil kesimpulan dari model umum.

Analisis khusus sebuah negara memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan dengan model umum yang didasarkan teori dan juga mengubah faktor-faktor yang menyebabkan krisis keuangan dengan tujuan untuk memahami lebih baik mengenai penyebab krisis keuangan di suatu negara. Karena analisis lintas negara membuat lebih sulit untuk diinterpretasikan dibandingkan jika analisis hanya menyangkut kasus sebuah negara, karena temuan didapat merupakan hasil generalisasi.

Mengingat urgennya analisis EWS untuk suatu negara maka analisis model EWS sangat penting untuk memprediksi kemungkinan terjadinya krisis keuangan di Indonesia yang rentan terhadap *external shocks*. Karena kapan terjadinya krisis keuangan tidak dapat diprediksi secara tepat. Tapi terjadinya krisis ekonomi hanya dapat diramalkan berdasarkan data-data masa lalu yakni menggunakan indikator-indikator makroekonomi. Oleh karena itu, pengembangan model-model EWS tentang krisis keuangan penting untuk terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar model-model EWS selalu *ter-update* dengan perkembangan perubahan variabel-variabel makroekonomi. Karena seiring berjalannya waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis keuangan semakin kompleks dan terus mengalami perubahan.¹⁰

Terjadinya krisis keuangan (seperti krisis mata uang, utang, perbankan, dan sebagainya) dipengaruhi oleh variabel-variabel makroekonomi yang menggambarkan kebijakan ekonomi yang sudah diimplementasikan.¹¹ Kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut merupakan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten sehingga menyebabkan terjadinya krisis keuangan. Selain karena kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, krisis keuangan juga disebabkan oleh (1) kepanikan yang terjadi di pasar uang sehingga mengakibatkan kekurangan likuiditas terhadap mata uang asing, (2) pecahnya

¹⁰ M.H. Imansyah, *Op. Cit*, hlm. 12-17.

¹¹ B. Candelon, et. al., *Loc. Cit*.

gelembung finansial, (3) *moral hazard* yang terjadi karena adanya jaminan pemerintah dan lemahnya penegakan aturan dan (4) ketiadaan aturan baku.¹²

Berbagai studi empiris tentang model EWS telah banyak dikembangkan oleh para peneliti untuk membantu mendeteksi krisis keuangan secara lebih dini. Tujuannya untuk mengantisipasi terulangnya krisis keuangan di masa datang. Secara umum penelitian tentang EWS dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Kategori pertama mengacu pada model regresi, contohnya model Logit-Probit, dimana krisis keuangan diestimasi waktunya ke depan melalui *leading indicators*. Kategori pertama lebih dikenal sebagai kelompok model parametrik. Kategori kedua menggunakan indikator peringatan dini potensial dan biasanya berhubungan dengan model Kaminsky, Lizondo, dan Reinhart atau KLR tahun 1998, yang juga dikenal sebagai pendekatan signal. Kategori kedua ini lebih dikenal sebagai kelompok model non parametrik. Kategori ketiga fokus pada metode *machine learning* untuk peramalan krisis keuangan.¹³

Salah satu studi EWS yang paling banyak dilakukan adalah studi EWS dengan menggunakan model parametrik. Model parametrik adalah model konvensional dengan menggunakan model *binary response* yakni model probit atau logit. Model EWS dengan pendekatan ini membuat estimasi tentang peluang terjadinya krisis keuangan dengan menggunakan variabel dependen diskret dalam model ekonometrinya. Modelnya menggunakan variabel dependen kualitatif sebagai variabel diskret yang bernilai 1 dan 0 dimana nilai 1 menunjukkan terjadinya krisis sedangkan nilai 0 menunjukkan keadaan lainnya. Sedangkan variabel independennya bersifat non diskret dan biasanya yang digunakan adalah indikator-indikator makroekonomi.

Selain itu, ada juga peneliti yang menggunakan spesifikasi model tidak hanya dua pilihan yaitu krisis dan tidak krisis, tetapi memiliki beberapa kemungkinan misalnya tidak krisis, krisis dan pasca krisis dalam model EWS-nya. Model seperti ini diantaranya adalah model *ordered probit* (jika variabel pilihannya bersifat ordinal) dan *multinomial logit* (jika variabel pilihannya bersifat nominal).

¹² M.H. Imansyah, *Op. Cit.*

¹³ C. Sevim, et. al., "Developing an Early Warning System to Predict Currency Crisis", *European Journal of Operational Research*, 237, 2014, hlm. 1095-1096.

Model parametrik memiliki keunggulan dibandingkan model non parametrik. Dalam hal ini, hasil perhitungan dari setiap variabel dalam model parametrik langsung memberikan kontribusi dalam perhitungan probabilitas terjadinya krisis keuangan. Jadi tidak perlu melakukan konversi indeks komposit seperti pada model non parametrik.¹⁴

Selain keunggulan tersebut, Li dan Wang tahun 2014 menyebutkan bahwa model parametrik khususnya model logit juga mempunyai beberapa keunggulan lainnya. *Pertama*, model logit telah banyak digunakan dan diajarkan. Model logit merupakan model probabilitas non linier yang tepat untuk memprediksi sektor keuangan yang selalu non linier seperti krisis mata uang. *Kedua*, model logit lebih mudah untuk dipahami dan hampir ada di semua *software* ekonometrik seperti EViews, STATA, dan lain-lain. Selain itu, juga memberikan hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen berdasarkan data yang diberikan. *Ketiga*, model logit memiliki akurasi dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan model-model lainnya. *Keempat*, model logit tidak memerlukan data yang berkualitas dan banyak, oleh karena itu lebih banyak yang menggunakan model-model logit daripada teknik-teknik yang cerdas pada situasi tidak memiliki data berkualitas tinggi.¹⁵

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, model parametrik baik model probit ataupun lobit lebih banyak dipilih dibandingkan dengan model non parametrik yang menggunakan pendekatan signal dalam membuat model EWS seperti studi yang dilakukan oleh Berg dan Pattillo tahun 1999.¹⁶

Inti model EWS adalah pengembangan model empiris dengan mengamati sejumlah indikator ekonomi terpilih maka dapat diramalkan kemungkinan krisis di masa datang. Nilai dari sejumlah indikator ini biasanya berbeda antara sebelum, selama dan sesudah krisis sehingga pergerakannya dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas terjadinya krisis keuangan. Selain untuk mendeteksi terjadinya krisis, model EWS berguna

¹⁴ M.H. Imansyah, *Op. Cit.*

¹⁵ S. Li dan S. Wang, "A Financial Early Warning Logit Model and Its Efficiency Verification Approach", *Knowledge-Based Systems*, 70, 2014, hlm. 79.

¹⁶ A. Berg dan C. Pattillo, "Are Currency Crises Predictable? A Test", *IMF Staff Papers*, 46, 1999, hlm. 107-138.

untuk melihat kinerja perekonomian suatu negara di masa tenang. Oleh karena itu, bab ini mencoba mengupas model-model EWS parametrik dalam memprediksi terjadinya krisis keuangan baik secara teori maupun empiris.

III. MODEL EWS DAN INDIKATOR-INDIKATORNYA

3.1. Model-Model EWS Parametrik

Model EWS parametrik adalah model konvensional yang menggunakan metode ekonometrik dengan analisis probit atau logit.¹⁷ Penelitian EWS yang menggunakan analisis probit atau logit sudah banyak dilakukan. Studi EWS yang menggunakan model probit ataupun logit sudah mulai dilakukan sejak tahun 1990-an dan umumnya berupa model-model *binary response* statik. Yaitu model *binary response* tanpa memasukkan *lag variable dependent* dalam estimasinya. Umumnya model EWS yang sering digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y_i = \alpha + \sum_{i=1}^n \beta_i x_i + u_i \quad (1)$$

Dimana Y_i adalah variabel dependen yang bernilai 1 jika terjadi krisis atau bernilai 0 jika tidak terjadi krisis, X_i adalah variabel independen yang berisi indikator-indikator ekonomi dan u_i adalah *error terms*.

Studi EWS dengan model probit atau logit paling awal dilakukan oleh Eichengreen, Rose dan Wyplosz tahun 1995. Studi mereka adalah melakukan analisis empiris dari aksi spekulatif terhadap nilai tukar yang sudah ditetapkan di 22 negara pada periode 1967 – 1992. Kemudian ada studi yang dilakukan oleh Frankel dan Rose tahun 1996 atau lebih dikenal dengan FR. Studi FR menggunakan model logit yang dilakukan terhadap 105 negara berkembang pada periode 1971 – 1992. Studi FR ini bertujuan untuk mengkualifikasikan *currency crashes* yang digambarkan sebagai perubahan yang besar dari nilai tukar nominal yang secara substansial meningkatkan laju perubahan depresiasi nominal. Selain itu ada juga studi Goldfjan dan Valdes tahun 1997 dengan menggunakan data untuk 26 negara dan menerapkan model logit untuk memprediksi sebulan ke depan

¹⁷ M.H. Imansyah, *Op. Cit.*, hal. 33.

terhadap peluang terjadinya krisis sebagai fungsi dari ekspektasi devaluasi dan nilai tukar riil. Kemudian ada studi Glick dan Rose tahun 1998 yang menunjukkan adanya pengaruh krisis mata uang terhadap kelompok negara-negara yang terikat bersama-sama oleh perdagangan internasional.

Ada juga studi Li dan Wang tahun 2014 yang menggunakan metode regresi logit peringatan dini finansial (FEW) terhadap sampel 34 perusahaan di Tiongkok. Model logit FEW ini bertujuan untuk membantu perusahaan menyadari kemungkinan terjadinya krisis keuangan dan mengurangi resiko keuangan melalui pesan yang dihasilkan oleh FEW tersebut. Selain itu, ada juga studi Comelli tahun 2014 yang membandingkan bagaimana model EWS logit (*fixed effects*) dan probit memprediksi krisis mata uang *in-sample* dan *out-of-sample* di negara-negara berkembang pada periode Januari 1995-Desember 2012.¹⁸

Beberapa studi-studi lainnya yang menggunakan model probit atau logit statik diantaranya studi Block tahun 2002, Caramazza, Rizzi dan Salgado tahun 2000, Esquivel dan Larrain tahun 1998, Kamin, Schindler dan Samuel tahun 1999, Manuel dan Rocha tahun 2000, Milesi-Ferretti dan Razin tahun 2000, Mulder, Perrelli dan Rocha tahun 2002, Borensztein et. al. Tahun 2000, Kumar, Moorthy dan Perraudin tahun 2002 dan Weller tahun 2001.

Selain menggunakan 2 kategori untuk model probit atau logit statik, ada juga studi yang menggunakan variabel pilihannya lebih dari 2 tapi modelnya masih bersifat statik. Diantaranya ada studi Kaufman, Mehrez dan Schmukler tahun 2000 yang menggunakan model *ordered probit*, juga studi Bussiere dan Fratzscher tahun 2002 serta Eliasson dan Krauter tahun 2001 yang menggunakan model *multinomial logit*. Sebelumnya ada studi Demirguc-Kunt dan Detragiache tahun 1999 yang memprediksi probabilitas krisis perbankan yakni memonitor kerentanan sektor perbankan. Studinya tersebut menggunakan metode *multivariate logit* dengan panel data, menggunakan variabel yang mencerminkan makroekonomi dan sektor keuangan.

Memasuki tahun 2000-an, studi tentang EWS yang menggunakan model parametrik sudah mengembangkan model-

¹⁸ S. Li dan S. Wang, *Loc. Cit.*, hlm. 78-87.

model parametrik yang dinamik. Yakni memasukkan *lag variable dependent* dalam estimasinya. Studi EWS dengan model parametrik dinamik diawali oleh studi Kauppi dan Saikkonen tahun 2005 yang menggunakan *dynamic and static probit models* untuk memprediksi resesi yang terjadi di AS baik *in-sample* maupun *out-of-sample* dengan menggunakan data dari triwulan 2 1953 sampai triwulan 1 2005.¹⁹ Selain itu, ada studi Falcetti dan Tudela tahun 2006 yang menggunakan *dynamic probit models* untuk meneliti penyebab krisis mata uang di negara-negara *emerging markets*.²⁰ Studi EWS dengan model parametrik dinamik terbaru dilakukan oleh Candelon, et.al. tahun 2014 yang menggunakan *dynamic and static logit models* baik *time series* maupun panel data untuk memprediksi krisis mata uang di 16 negara *emerging markets* baik dalam *in-sample* maupun *out-of-sample*. Data yang digunakan berupa data bulanan dari 1985 sampai 2011.²¹

Selain mengembangkan model *binary response* dinamik, juga dikembangkan model *limited dependent* dinamik lebih dari 2 pilihan. Studi tersebut pertama kali dilakukan oleh Dumitrescu, et.al. tahun 2012 dengan menggunakan *multivariate dynamic probit models*. Model tersebut diaplikasikan untuk beberapa jenis krisis finansial seperti krisis mata uang, perbankan dan utang. Studi Dumitrescu, et.al. tahun 2012 tersebut dilakukan terhadap 17 negara *emerging* dengan menggunakan indikator makroekonomi bulanan dari Januari 1985 sampai Juni 2010.²²

Studi-studi tersebut umumnya dilakukan di luar Indonesia. Studi empiris tentang model-model EWS parametrik juga pernah dilakukan di Indonesia diantaranya studi yang dilakukan oleh Imansyah tahun

¹⁹ H. Kauppi dan P. Saikkonen, "Predicting US Recessions with Dynamic Binary Response Models", *The Review of Economics and Statistics*, 90 (4), 2008, hlm. 777-791.

²⁰ E. Falcetti dan M. Tudela, "Modelling Currency Crises in Emerging Markets: A Dynamic Probit Model with Unobserved Heterogeneity and Autocorrelated Errors", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 68 (4), 2006, hlm. 445-471.

²¹ B. Candelon, et. al., *Loc. Cit.*, hlm. 1016-1029.

²² E.I. Dumitrescu, et.al. (2012). *Multivariate Dynamic Probit Models: An Application to Financial Crises Mutation*. (<https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/718587/filename/MVEWS0609.pdf>, diunduh 10 November 2014).

2009. Studi Imansyah menggunakan periode waktu tahun 1971 – 2006 baik *in-sample* maupun *out-sample*. Hasil estimasi model logit indikator dini pada masa pra-krisis semua tanda (arah) sesuai dengan teori, walaupun ada 2 indikator dini yang tidak signifikan. Indikator dini yang signifikan tersebut meliputi ekspor, nilai tukar riil (*real exchange rate* atau RER), proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDB dan cadangan devisa. Sedangkan indikator yang tidak signifikan tersebut meliputi tingkat pertumbuhan PDB, proporsi investasi terhadap PDB dan pertumbuhan rasio kredit terhadap PDB.²³

Hasil studi Imansyah tahun 2009 tersebut cukup memadai untuk meramalkan krisis keuangan yang terjadi pada bulan November 1978, Maret 1983 dan September 1986 juga krisis ekonomi 1997. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat probabilitas yang terus meningkat sejak masa pra-krisis (dengan 24 bulan menjelang krisis atau 12 bulan menjelang krisis untuk krisis ekonomi 1997). Masih menurut Imansyah, semua evaluasi mengindikasikan tingginya daya prediksi dengan batas ambang probabilitas pada tingkat 70 persen. Artinya periode krisis dianggap memberikan sinyal yang baik jika probabilitas krisis melewati atau sama dengan batas ambang yang telah ditetapkan.²⁴

Model-model EWS Parametrik baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri secara umum bisa memprediksi probabilitas terjadinya krisis keuangan walaupun tidak selalu tepat. Yakni berdasarkan variabel-variabel makroekonomi yang digunakan dalam model-model EWS Parametrik tersebut. Pergerakan variabel-variabel tersebut digunakan sebagai indikator dini untuk memprediksi probabilitas terjadinya krisis ekonomi (keuangan).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, perkembangan model-model EWS baik dalam maupun luar negeri dengan menggunakan model parametrik sudah sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan ekonomi domestik maupun dunia yang semakin kompleks maka perkembangan variabel-variabel makroekonomi sebagai sumber persistensi terjadinya krisis juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan

²³ M.H. Imansyah, *Op. Cit.*, hal. 98.

²⁴ *Ibid*, hal. 102-103.

pentingnya untuk terus meng-*update* model-model EWS parametrik. Namun begitu, model EWS yang paling baik tergantung pada kebutuhan pengguna model untuk kebijakan.

3.2. Variabel Makroekonomi Sebagai Indikator Dini

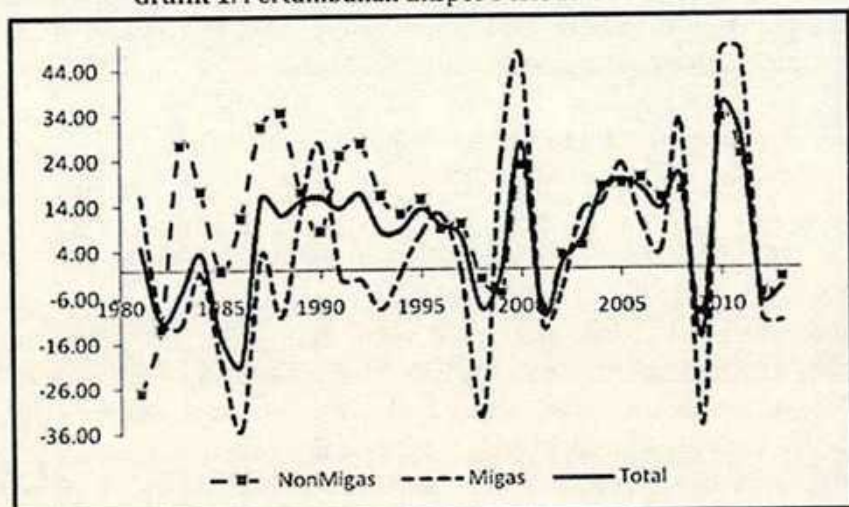
Variabel-variabel makroekonomi biasanya digunakan sebagai indikator dini dalam model EWS parametrik. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengevaluasi stabilitas sektor keuangan. Variabel-variabel makroekonomi yang biasanya digunakan sebagai indikator dini diantaranya nilai tukar riil (RER), pertumbuhan ekspor dan impor, rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio M2 terhadap cadangan devisa, proporsi investasi dalam PDB, pertumbuhan cadangan devisa dan sebagainya.

Berdasarkan hasil studi Imansyah tahun 2009, variabel makroekonomi yang dapat digunakan sebagai indikator dini diantaranya pertumbuhan ekspor, RER, proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDB, cadangan devisa, pertumbuhan PDB, proporsi investasi terhadap PDB dan pertumbuhan rasio kredit terhadap PDB. Dibawah ini adalah variabel-variabel makroekonomi utama tersebut yang biasa digunakan sebagai indikator dini.

Pertumbuhan Ekspor

Variabel makroekonomi yang bisa digunakan sebagai indikator dini adalah pertumbuhan ekspor. Pertumbuhan ekspor digunakan sebagai indikator daya saing suatu produk di pasar internasional. Grafik 1 menunjukkan pertumbuhan ekspor Indonesia baik sektor migas, nonmigas maupun total antara keduanya pada periode 1981–2013. Secara keseluruhan, setelah krisis ekonomi 1998 pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami tren peningkatan walaupun pada tahun tertentu mengalami perlambatan seperti tahun 2009, 2012 dan 2013. Bahkan pada tahun 2010, pertumbuhan ekspor Indonesia mencapai 35,42 persen.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekspor Periode 1981 - 2013



Sumber: BPS (2015), data diolah

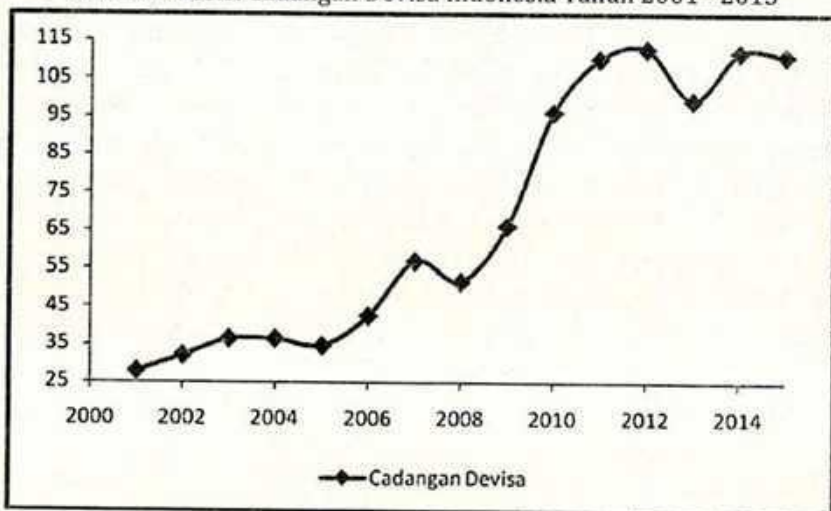
Walaupun pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami tren peningkatan tapi tren peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh tren peningkatan pertumbuhan sektor migas. Artinya komposisi barang ekspor Indonesia lebih didominasi oleh barang-barang mineral dan minyak bumi, yang memiliki nilai tambah rendah.

Meskipun pertumbuhan ekspor Indonesia lebih didominasi oleh sektor migas, kondisi ini tidak akan meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan. Karena peningkatan pertumbuhan ekspor akan meningkatkan aliran pasokan mata uang asing, dalam hal ini dolar AS, ke dalam negeri sehingga risiko melemahnya mata uang domestik tidak terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa perlambatan pertumbuhan ekspor dapat dijadikan sebagai indikator dini untuk pelemahan nilai tukar mata uang domestik.

Cadangan Devisa

Variabel makroekonomi selanjutnya adalah cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator yang dapat digunakan apakah mata uang domestik berada dalam tekanan atau tidak. Posisi cadangan devisa Indonesia pada tahun 2001 - 2015, dimana untuk tahun 2015 data terakhir adalah Mei 2015, dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2. Posisi Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2001 - 2015



Sumber: BI (2015)

Cadangan devisa Indonesia, sejak tahun 2001 terus mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun-tahun tertentu posisi cadangan devisa mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan devisa pernah mengalami penurunan yakni pada tahun 2005, 2008, 2013 dan 2015. Cadangan devisa tahun 2005 mengalami penurunan diduga akibat pengaruh krisis mini tahun 2005 tepatnya akhir Agustus 2005. Dimana nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup dalam, hampir mencapai Rp 11.000 per dolar AS. Posisi cadangan devisa 2008 yang mengalami penurunan kemungkinan akibat krisis *subprime mortgage* yang terjadi di AS sedangkan tahun 2015 karena data terakhir yang digunakan adalah Mei 2015.

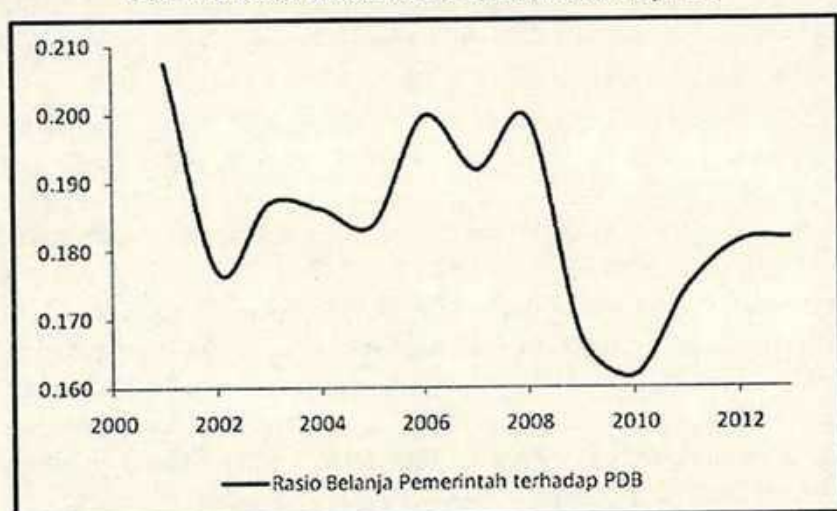
Posisi cadangan devisa yang menunjukkan tren peningkatan merupakan indikator yang dapat diandalkan bahwa mata uang domestik (rupiah) tidak berada dalam tekanan. Walaupun begitu, tren peningkatan cadangan devisa Indonesia tidak serta merta bahwa akan terjadi penguatan mata uang domestik. Cadangan devisa merupakan indikator suatu negara tidak akan menghadapi kesulitan keuangan dalam membayar utang luar negerinya.

Proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDB

Kemudian ada variabel proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDB. Grafik 3 menunjukkan perkembangan rasio antara belanja

konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PDB pada periode 2001 – 2013. Sejak krisis ekonomi 1998, tepatnya tahun 2001, rasio antara belanja pemerintah terhadap PDB mengalami tren penurunan. Turunnya rasio ini menunjukkan menurunnya peluang terjadinya krisis. Karena jika rasio ini mengalami peningkatan berarti besarnya belanja konsumsi pemerintah terus mengalami peningkatan sedangkan pendanaannya kemungkinan (1) tetap, (2) mengalami penurunan atau (3) meningkat tapi kenaikannya lebih rendah dibandingkan kenaikan belanja konsumsi pemerintah. Jika penurunan proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDB terus terjadi, hal ini akan mengakibatkan surplus dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.

Grafik 3. Rasio Konsumsi Pemerintah terhadap PDB



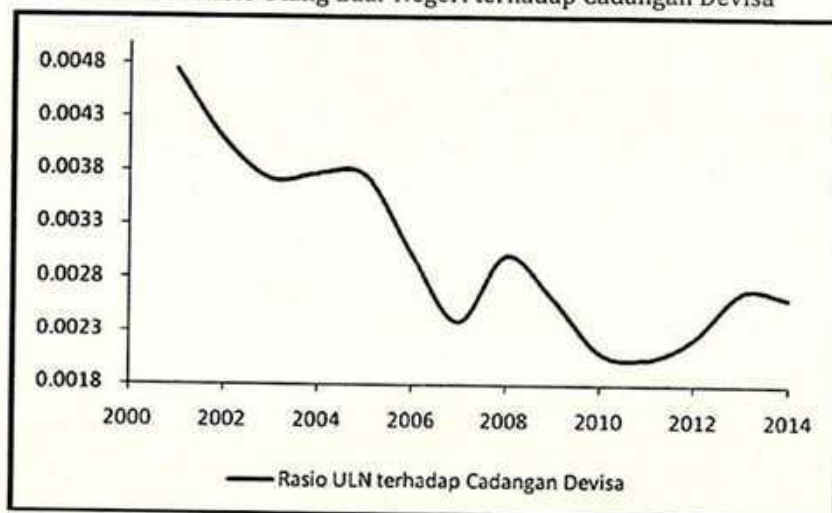
Sumber: BI (2015), data diolah

Rasio Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa

Ada juga variabel makroekonomi rasio utang luar negeri (ULN) terhadap cadangan devisa. Grafik 4 menunjukkan perkembangan rasio ULN Indonesia terhadap posisi cadangan devisa pada periode 2001 – 2014. Seperti diketahui bahwa nilai cadangan devisa biasanya digunakan sebagai indikator kesulitan keuangan berkaitan dengan pembayaran ULN. Berdasarkan Grafik 4, rasio antara ULN Indonesia terhadap cadangan devisa menunjukkan tren penurunan. Artinya nilai ULN Indonesia masih lebih rendah dibandingkan nilai

cadangan devisanya sehingga jika ULN Indonesia jatuh tempo maka Indonesia tidak akan mengalami kesulitan untuk membayar ULN-nya tersebut. Akibatnya probabilitas terjadinya krisis keuangan di Indonesia akan semakin rendah.

Grafik 4. Rasio Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa

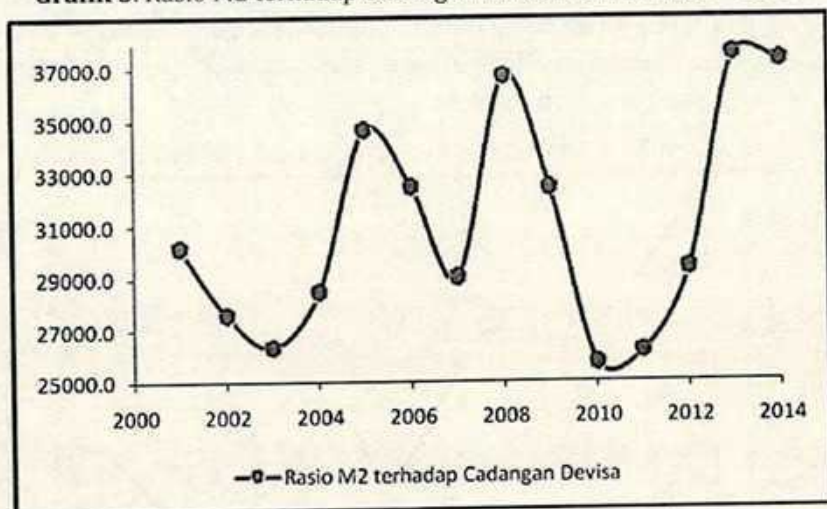


Sumber: BI (2015), data diolah

Rasio M2 terhadap Cadangan Devisa

Selanjutnya ada variabel makroekonomi rasio M2 terhadap cadangan devisa. Grafik 5 menunjukkan perkembangan rasio jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 terhadap posisi cadangan devisa Indonesia pada periode 2001 – 2014. Rasio antara M2 terhadap cadangan devisa memberikan indikasi seberapa besar utang sistem perbankan dapat ditutupi oleh cadangan devisa. Semakin meningkat rasio ini menunjukkan jumlah M2 lebih besar dibandingkan cadangan devisanya.

Grafik 5. Rasio M2 terhadap Cadangan Devisa Periode 2001 – 2014



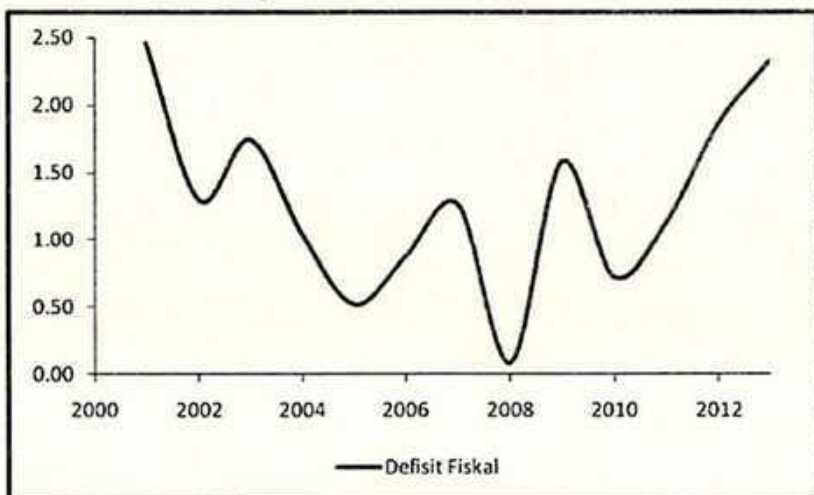
Sumber: BI (2015), data diolah

Berdasarkan Grafik 5, rasio ini menunjukkan tren kenaikan. Artinya jumlah M2 Indonesia lebih besar dibandingkan cadangan devisanya. Ketika terjadi krisis, saat nasabah menukarkan simpanan mata uang domestiknya ke mata uang asing, bank sentral tidak mampu mencukupi permintaan tersebut karena cadangan devisanya masih lebih rendah dibandingkan jumlah M2-nya. Jika kondisi ini terus terjadi (meningkatnya rasio ini) maka akan meningkatkan probabilitas terjadinya krisis keuangan. Karena rasio ini biasanya digunakan sebagai indikator dini akan adanya potensi terjadi krisis keuangan.

Defisit Fiskal

Perkembangan defisit fiskal Indonesia setelah krisis ekonomi 1998 dapat dilihat pada Grafik 6. Pada periode 2001 – 2013, defisit fiskal setelah krisis ekonomi 1998 mengalami tren penurunan sampai tahun 2008. Tapi setelah tahun 2008, setelah terjadinya krisis *subprime mortgage* di AS, defisit fiskal Indonesia mengalami tren peningkatan.

Grafik 6. Perkembangan Defisit Fiskal Indonesia Periode 2001 – 2013



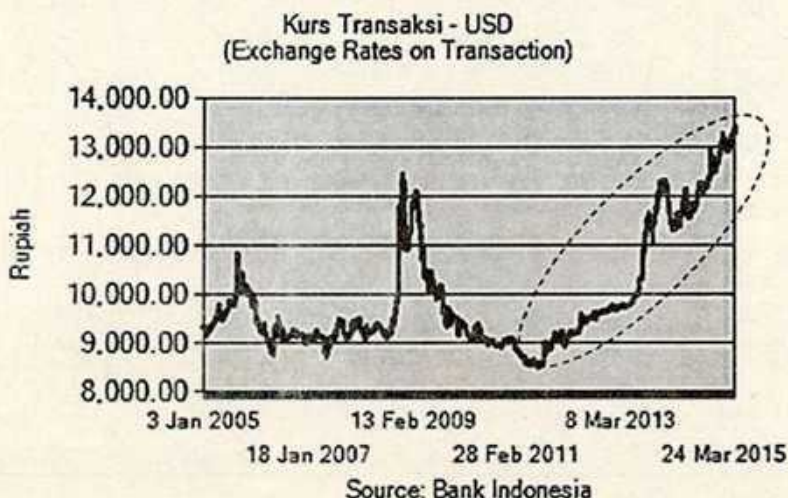
Sumber: BI (2015), data diolah

Krisis *subprime mortgage* ini menyebabkan terjadi penurunan permintaan ekspor dari Indonesia sehingga penerimaan Indonesia dari sektor ekspor juga mengalami penurunan. Kecenderungan naiknya defisit fiskal akan meningkatkan eskpektasi terjadinya krisis. Karena naiknya defisit fiskal dapat menjadi sinyal bagi investor bahwa negara tersebut rapuh terhadap gejolak-gejolak baik dari dalam maupun luar negeri sehingga menurunkan kepercayaan investor. Jadi perlu diwaspadai jika defisit fiskal Indonesia terus mengalami kenaikan.

Nilai Tukar

Variabel makroekonomi yang umumnya dijadikan indikator dini untuk probabilitas terjadi krisis ekonomi atau keuangan adalah nilai tukar. Nilai tukar yang mengalami depresiasi berkepanjangan akan meningkatkan potensi terjadinya krisis ekonomi. Hal ini seperti yang terjadi pada krisis ekonomi 1998. Pada krisis ekonomi 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai titik tertinggi yakni Rp 15.000 per dolar AS.

Grafik 7. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Periode 2005 - 2015



Sumber: BI (2015), data diolah

Grafik 7 menunjukkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada periode 2005 – 2015. Berdasarkan Grafik 7 tersebut, sejak tahun 2011 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan tren penurunan atau rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar AS (lingkaran hitam putus-putus). Bahkan hingga saat ini nilai tukar rupiah sudah mencapai Rp 13.000-an per dolar AS. Pergerakan nilai tukar yang terus menunjukkan tren depresiasi ini harus perlu diwaspadai. Jangan sampai krisis ekonomi 1998 terulang kembali.

IV. PENUTUP

Krisis ekonomi merupakan peristiwa yang selalu menjadi topik hangat dalam bidang ekonomi. Karena krisis ekonomi akan selalu bermutasi dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga krisis ekonomi akan selalu terjadi di dunia ini. Krisis ekonomi yang baru saja melanda Indonesia adalah krisis ekonomi 1998. Juga Indonesia tidak lepas dari pengaruh krisis *subprime mortgage* 2008 yang cukup terasa. Berbagai sektor terutama sektor ekonomi di negeri ini ikut terpengaruhi oleh krisis tersebut, dengan dampaknya yang tidak kecil.

Suatu krisis ekonomi biasanya bisa dideteksi walaupun tidak selalu akurat. Yakni melalui suatu model pendugaan terjadinya krisis ekonomi yang disebut dengan EWS. Dengan EWS bisa diduga kapan terjadinya krisis ekonomi walaupun tidak selalu akurat. Model EWS yang paling banyak digunakan adalah model EWS parametrik. Model ini adalah model EWS pendekatan ekonometrik karena menggunakan analisis probit atau logit. Model ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan model-model EWS lainnya baik metode, analisis maupun *software*-nya.

Model EWS parametrik ada yang bersifat statis, ada juga dinamis. Ada yang menggunakan 2 kategori, ada juga menggunakan lebih dari 2 kategori. Model EWS parametrik sudah banyak dilakukan dan sampai saat ini masih terus dilakukan studi-studi tentang EWS Parametrik. Berdasarkan model tersebut, banyak variabel makroekonomi yang dapat digunakan sebagai indikator dini terjadinya krisis ekonomi. Variabel-variabel tersebut meliputi nilai tukar riil, pertumbuhan ekspor dan impor, rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio M2 terhadap cadangan devisa, proporsi investasi dalam GDP, pertumbuhan cadangan devisa dan sebagainya.

Studi model EWS parametrik yang pernah dilakukan di Indonesia adalah studi yang dilakukan Imansyah tahun 2009 yang menyebutkan bahwa variabel-variabel makroekonomi yang dapat digunakan sebagai indikator dini diantaranya pertumbuhan ekspor, RER, proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDB, cadangan devisa, pertumbuhan PDB, proporsi investasi terhadap PDB dan pertumbuhan rasio kredit terhadap PDB.

Variabel-variabel makroekonomi yang menunjukkan tren bagus diantaranya adalah pertumbuhan ekspor, cadangan devisa, proporsi konsumsi pemerintah terhadap PDB, dan rasio ULN terhadap cadangan devisa. Berdasarkan pergerakan dari variabel-variabel makroekonomi tersebut, probabilitas Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi seperti krisis ekonomi 1998 adalah rendah. Tapi ada juga beberapa variabel makroekonomi yang menunjukkan tren tidak bagus seperti rasio M2 terhadap cadangan devisa, defisit fiskal dan nilai tukar sehingga menimbulkan dugaan bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998.

Berkaitan dengan pergerakan variabel-variabel makroekonomi tersebut, dimana ada yang menunjukkan tren bagus dan ada juga

yang menunjukkan tren tidak menggembirakan, kebijakan yang tepat terhadap variabel-variabel makroekonomi tersebut akan menurunkan probabilitas Indonesia terkena krisis ekonomi seperti tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ika, Syahrir. *Subprime Mortgage Crisis: Mengguncang Ekonomi Dunia, Cara Indonesia untuk Bertahan*. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014.

Imansyah, M.Handry. *Krisis Keuangan di Indonesia: Dapatkah Diramalkan?* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Prasetyantoko, A. *Ponzi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Artikel dalam jurnal, *working paper*, majalah, dan surat kabar

Berg, A. dan Pattillo, C. "Are Currency Crises Predictable? A Test", *IMF Staff Papers*, 46, 1999, pp. 107-138.

Candelon, B., et. al. "Currency Crisis Early Warning Systems: Why They Should be Dynamic", *International Journal of Forecasting*, 30, 2014, pp. 1016-1018.

Falcetti E. dan Tudela, M. "Modelling Currency Crises in Emerging Markets: A Dynamic Probit Model with Unobserved Heterogeneity and Autocorrelated Errors", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 68 (4), 2006, pp. 445-471.

Kauppi, H. dan Saikkonen, P. "Predicting US Recessions with Dynamic Binary Response Models", *The Review of Economics and Statistics*, 90 (4), 2008, pp. 777-791.

Li, S. dan Wang, S. "A Financial Early Warning Logit Model and Its Efficiency Verification Approach", *Knowledge-Based Systems*, 70, 2014, p. 79.

Sevim, C., et. al. "Developing and Early Warning System to Predict Currency Crisis", *European Journal of Operational Research*, 237, 2014, pp. 1095-1096.

Simorangkir, Iskandar. "Kajian Indikator Peringatan Dini Bank Runs di Indonesia: Pendekatan Markov-Switching", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15 (1), 2012, hlm. 4-8.

Artikel dalam Internet

Dumitrescu, E.I., et.al. (2012). "Multivariate Dynamic Probit Models: An Application to Financial Crises Mutation". (<https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/718587/filename/MVEWS0609.pdf>, diunduh 10 November 2014).

Internet (artikel dalam jurnal online)

www.bi.go.id

www.bps.go.id

www.imf.org

TULISAN KEDUA

**PENGARUH PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

*oleh: Ari Mulianta Ginting**

* Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PENGARUH PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi isu yang kontroversi di berbagai kalangan ekonom. Perdebatan tersebut berpusat pada pertanyaan apakah perkembangan sektor keuangan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Beberapa ekonom sepakat dan percaya bahwa perkembangan sektor keuangan merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pemikiran ekonom tersebut adalah Schumpeter (1911) yang berpendapat bahwa sistem keuangan yang efisien memainkan peranan penting dalam mendorong perekonomian nasional. Sistem keuangan yang berjalan dengan baik seperti sektor perbankan memberikan jasa keuangan seperti pemberian kredit modal kerja dan investasi bagi para pengusaha untuk menjalankan usaha mereka.¹

Salah satu bagian dari sistem keuangan tersebut adalah perbankan. Menurut Mankiw (2012) pada prinsipnya sistem keuangan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pasar keuangan dan lembaga intermediasi keuangan. Dari bagian lembaga intermediasi keuangan, bank merupakan salah satu bagian dari sistem lembaga intermediasi dari sistem keuangan.² Fungsi bank itu sendiri sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Fungsi bank tersebut khususnya dalam penyaluran kredit memiliki peranan penting dalam pergerakan roda perekonomian secara

¹ Schumpeter, J.A. (1911). *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press.

² N. Gregory Mankiw. (2012). *Principle of Economics*. Singapore : South-Western Cengage Learning.

keseluruhan dan memfasilitas pertumbuhan ekonomi. Dimana level ekonomi makro bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu dalam perekonomian.

Lebih lanjut fungsi penting perbankan sebagai lembaga intermediasi perbankan tersebut menurut Sawaldjo (2004) mengatakan bahwa dalam hal ini perbankan bertindak sebagai perantara dalam penyediaan dana. Dana dari nasabah yang ditabung kemudian oleh pihak bank disalurkan atau dipindahkan kepada pihak lain yang melakukan investasi dalam aktiva riil seperti fasilitas produksi, peralatan dan gedung. Intermediasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menghimpun dana lebih dari jutaan penabung dan menyediakan bagi kalangan pengusaha guna mendukung kegiatannya. Dalam melaksanakan fungsi ini, intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi penabung maupun pihak pengusaha.³

Akan tetapi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi di Indonesia pernah mengalami keterpurukan pada tahun 1997. Ekspansi penyaluran kredit dapat dikatakan tidak berjalan. Indikasi ini terlihat dari pertumbuhan realisasi kredit yang sangat tertinggal dari pertumbuhan kapasitas penyaluran kredit. Dengan kata lain terjadi kesenjangan (*gap*) yang besar antara kedua variabel tersebut. Pertumbuhan kapasitas penyaluran kredit selama tahun 1997-2000 mencapai 31,2% sedangkan rata-rata pertumbuhan kredit jauh lebih rendah, yaitu hanya sebesar 5,9%. Dilihat dari rasio antara jumlah kredit dan jumlah simpanan (*loan to deposit ratio* atau LDR), rasio pada akhir 1999 masih sebesar 49,5%, akan tetapi angka tersebut kemudian merosot tajam menjadi hanya 29% pada akhir 2001, suatu angka yang jauh sekali dibawah ketentuan Bank Indonesia (BI) sebesar 110%.⁴

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini mencoba mengupas mengenai; pertama memberikan gambaran mengenai perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia. Yang kedua mencoba melakukan analisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga berdasarkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap

³ Sawaldjo Puspoprano. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*. Jakarta : LP3S. Hlm. 5-6.

⁴ *Ibid*. Hlm 64-65.

berbagai *stakeholder* terkait perkembangan industri perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

II. TATARAN KONSEP PERAN SEKTOR PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Levine et al. (2000)⁵ dan Beck et al. (2000)⁶ melakukan penelitian pengaruh pertumbuhan sektor finansial mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa semakin tinggi pertumbuhan industri perbankan berdampak terhadap semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Senada dengan penelitian tersebut Aretis et al. (2001) menggunakan *applied time series model* dari negara berkembang dan menemukan bahwa sektor perbankan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Khatib et al. dalam Aurangzeb (2012) menginvestigasi hubungan antara kinerja sektor perbankan dengan pertumbuhan ekonomi di negara Qatar. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kinerja sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Qatar.⁸ Lebih lanjut Aurangzeb (2012) melakukan penelitian tentang kontribusi sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Bahkan lebih lanjut Aurangzeb memberikan rekomendasi agar pembuatan kebijakan mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan. Hal ini disebabkan bahwa sektor perbankan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan.⁹

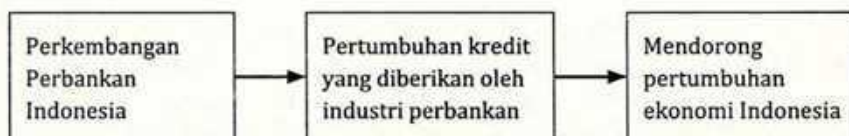
⁵ Levine, R., Loayza, N. Dan Beck T., (2000). Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes. *Journal of Monetary Economic*. No. 46. Hlm 31-77.

⁶ Beck, T., Levine, R dan Loayza. (2000). Finance and The Source of Growth. *Journal of Financial Economics*. No. 58. Hlm. 261-300.

⁷ Aretis, P., Demetriades, P., dan Luintel, K. B., (2001). Financial Development and Economic Growth : the role of stock market. *Journal of Money Credit and Banking*. No. 33. Hlm. 16-41

⁸ Aurangzeb. (2012). Contribution of Banking Sector in Economic Growth: Case of Pakistan. *Economics and Finance Review*. Vol 2 (6). Hlm 45-54.

⁹ *Ibid*. Hlm. 44.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir yang coba disusun oleh penulis, terlihat ingin mencoba melihat pengaruh antara variabel perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia. Penulis ingin mendapatkan bukti empirik bagaimana pengaruh pertumbuhan kredit perbankan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dari dokumen atau arsip yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), International Monetary Fund (IMF), situs internet dan buku-buku terkait.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari berupa data kuartalan tahun 2004 sampai dengan 2014. Sumber data dari BPS, BI dan IMF. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pertumbuhan sektor industri perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Mihail dan Jordan (2014)¹⁰ dengan melakukan perubahan sample data penelitian dan perubahan metode analisis data. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang diharapkan seperti tertuang pada tujuan penelitian. Dan diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi masukan positif bagi berbagai *stakeholder* terkait perkembangan industri perbankan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis model ekonometrik berupa *Vector Autoregressive Regression* (VAR), yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan membahas mengenai data yang digunakan, konsep-konsep. Di samping itu dibahas pula mengenai teknik pendugaan dan penujian parameter yang digunakan. Hasil analisis berupa koefisien untuk masing-

¹⁰ Mihail Petkovski, Jordan Kjosovski. (2014). Does Banking Sector development promote economic growth? An Empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe. *Economic Research Journal*. Vol 27 (1), hlm. 55-66.

masing variabel independe. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan.

Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian ini¹¹:

$$Y_{it} = a_t + b_{1t}X_{1t} + b_{2t}X_{2t} + b_{3t}X_{3t} + b_{4t}X_{4t} + b_{5t}X_{5t} + e_t$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

X₁ = Jumlah Uang Beredar

X₂ = Tingkat Suku bunga

X₃ = Kredit

X₄ = Inflasi

X₅ = Investasi

e = Error Term

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan domestik bruto dari tahun sekarang dibandingkan pendapatan domestik bruto tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diproksi dengan pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan Domestik Bruto adalah jumlah output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam perekonomian. Data PDB per kapita dalam satuan miliar rupiah dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berbagai edisi.

2. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BI dalam periode 2004 sampai dengan 2014. Tingkat suku bunga acuan merupakan tingkat suku bunga yang menjadi patokan bagi bank-bank dalam menetapkan tingkat suku bunga.

3. Kredit

Data kredit yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Data tersebut diperoleh dari variabel jumlah kredit yang disalurkan oleh bank-bank yang ada di Indonesia.

¹¹ Model pada penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Mihail Petkovski, Jordan Kjosevski (2014) dengan beberapa perubahan. Diantaranya adalah perubahan metode pengolahan data menggunakan VAR dan perubahan data sampel penelitian menjadi Indonesia.

4. Inflasi

Inflasi merupakan persentase perubahan indeks harga antara periode waktu.¹² Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS. Data tersebut mencakup data tahun 2004 sampai dengan 2014.

5. Investasi

Investasi pada hakekatnya adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Data investasi diperoleh dari BI dengan periode tahun 2004 sampai dengan 2014.

6. Jumlah uang beredar

Variabel uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah arti uang dalam luas, yaitu meliputi M1 ditambah dengan uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas) dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter.¹³ Data jumlah uang beredar (M2) diperoleh dari BI mencakup periode 2004 sampai dengan 2014.

Model VAR adalah model persamaan regresi yang menggunakan data *time series* yang berkaitan dengan masalah stasioneritas dan kointegritas data. Jika variabel stasioner pada tingkat level maka kita mempunyai model VAR biasa (*unrestricted VAR*). Sebaliknya jika data tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada proses diferensiasi yang sama, maka harus diuji apakah data tersebut mempunyai hubungan dalam jangka panjang atau tidak dengan melakukan uji kointegrasi.¹⁴

Apabila data stasioner pada proses diferensiasi namun variabel tidak terkointegrasi, maka model tersebut model VAR dengan data diferensiasi (*VAR in difference*). Namun, apabila terdapat kointegrasi maka model VAR tersebut disebut model *Vector Error Correction Model* (VECM). Model VECM ini merupakan model VAR yang terestriksi (*restricted VAR*) karena adanya kointegrasi yang

¹² Geogre Mankiw. (2013). *Principle of Economics : An Asian Edition*. Singapura: Cengage Learning Asia Pte Ltd.

¹³ "Perkembangan Uang Beredar", (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/perkembangan/Default.aspx>, diakses 12 Juni 2015).

¹⁴ Agus Widardjono. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Ekonisia.

menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR.¹⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa dokumen atau arsip yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), BI, situs internet dan buku terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.

III. PERKEMBANGAN KREDIT YANG DISALURKAN OLEH PERBANKAN DI INDONESIA

Bank merupakan bisnis yang menawarkan simpanan, yang dapat melaksanakan permintaan penarikan (dengan menggunakan cek atau membuat transfer dana elektronik) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit yang bersifat komersial.¹⁶ Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Sehingga berdasarkan karakteristik fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi maka dapat membantu unit ekonomi khususnya para pelaku usaha untuk menggunakan dana yang dihimpun oleh perbankan untuk dapat digunakan sebagai modal ataupun investasi pada usaha mereka.

Salah satu peran dari perbankan yang menjadi fungsi utama dari bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bank menghimpun dana dari nasabah kemudian menyalurkannya kepada pelaku usaha yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Data yang berasal dari Bank Indonesia, Grafik 1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan kredit dan ekonomi periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

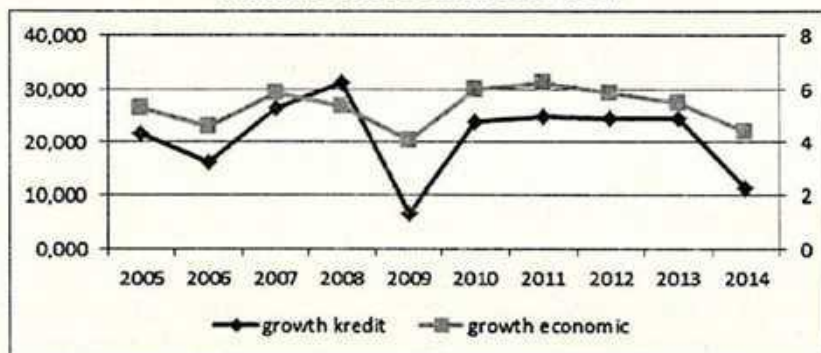
Berdasarkan Grafik 1 tersebut kita bisa melihat terdapat pola pergerakan antara kredit yang diberikan perbankan memiliki pola yang mirip dengan pertumbuhan ekonomi periode tahun yang

¹⁵ Damodar Gujarati. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.

¹⁶ Rose, Peter S., Hudgings Sylvia S. (2010). *Bank Management and Financial Service*. New York: McGraw-Hill International Edition

sama. Pola pergerakan pertumbuhan kredit memiliki tren yang mirip dengan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit yang diberikan oleh perbankan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi uji secara kuantitatif untuk meneliti pengaruh kredit tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi akan dilakukan pada bagian berikutnya.

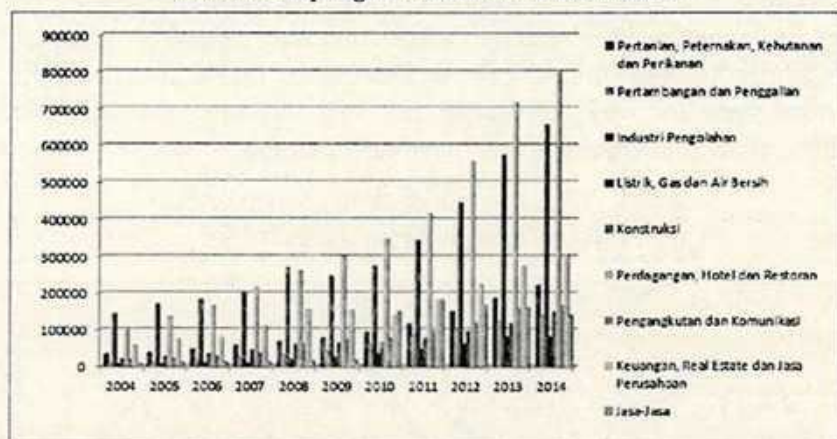
Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Ekonomi Periode Tahun 2005-2014



Sumber : BI (2015).

Lebih lanjut berdasarkan Grafik 2 menunjukkan perkembangan realisasi kredit yang disalurkan menurut lapangan usaha periode tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada periode tahun tersebut sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang paling besar menerima kredit dari perbankan, dengan total kredit yang diberikan adalah Rp.4.015.962 miliar. Sektor kedua terbesar yang menerima kredit dari perbankan adalah sektor industri pengolahan dengan total kredit sebesar Rp.3.506.891 miliar. Sementara sektor Keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menempati urutan ke tiga dan empat.

Grafik 2. Perkembangan Realisasi Kredit yang Disalurkan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014

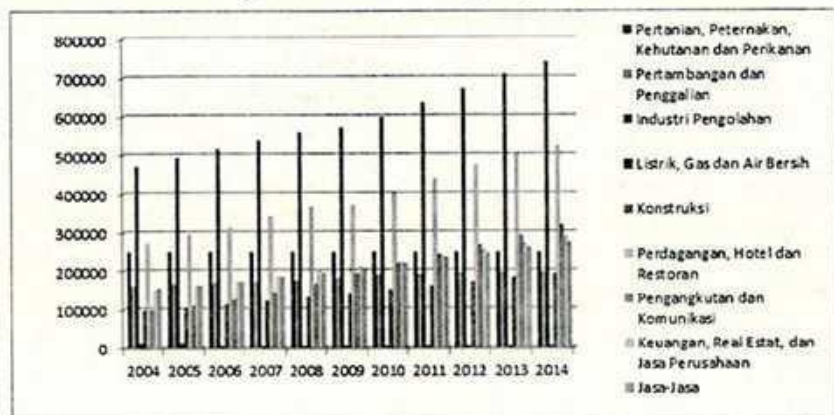


Sumber: BI (2015).

Kredit yang diberikan dari perbankan terhadap 9 sektor tersebut diatas, banyak digunakan untuk jenis kredit modal kerja dan investasi. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut berdampak terhadap peningkatan produktivitas dari 9 sektor. Hal ini dapat terlihat dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh 9 sektor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 3 menunjukkan bahwa dari 9 lapangan usaha/ sektor ekonomi yang ada, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor Keuangan, real esate dan jasa keuangan, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan 4 sektor dengan share PDB terbesar menurut lapangan usaha. Hal ini sejalan dengan besarnya total kredit yang disalurkan terhadap 4 sektor unggulan tersebut. Jika dilihat secara general maka hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan kredit di sektor tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonominya.

Grafik 3. Perkembangan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014



Sumber : BPS (2015).

Kredit perbankan memiliki pengaruh yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kredit digunakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana kredit sebagai fungsi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inggrid (2006) yang mengatakan bahwa kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Akan tetapi kondisi sekarang Triwulan II-2015 sampai dengan sejak tahun 2014 menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan terus melambat. Perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan salah satunya dipicu oleh kenaikan suku bunga perbankan. Gubernur BI, Agus Martowadojo mengatakan Bank Sentral tetap mempertahankan BI rate di kisaran 7,5% dan kondisi ini berdampak kepada penyaluran kredit perbankan yang tumbuh melambat hingga berada dibawah 15%.¹⁸ Padahal seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa pertumbuhan kredit salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

¹⁷ Inggrid. (2006). Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Ekonomi*. No.8(1), hlm. 40-50.

¹⁸ "Kredit Mandeg Pertumbuhan Pun Melambat", (diakses dari <http://www.goldbank.co.id/channel/laput/perbankan/kredit.html>, tanggal 29 Juni 2015).

IV. PENGARUH PERKEMBANGAN KREDIT YANG DISALURKAN OLEH PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Sebelum melakukan analisis regresi VAR pada penelitian ini, maka seperti yang telah diuraikan di atas, maka kita perlu melakukan uji *Engle Granger Causality Test* untuk melihat arah hubungan antara variabel penelitian. Hasil uji kausalitas Granger tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Terlihat bahwa hipotesis tidak terjadinya Granger causality antara pertumbuhan kredit dan Pertumbuhan Ekonomi tidak ditolak, sedangkan untuk hipotesis tidak terjadinya kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan pertumbuhan kredit ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi hubungan satu arah, yakni pertumbuhan kredit *granger cause* pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya. Sementara untuk variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai uji kausalitas *Granger* dibawah.

Tabel 1. Uji Kausalitas *Granger*

Null Hypothesis:	F-Statistic	Prob.
Inflasi does not Granger Cause Growth	0.12531	0.8842
GROWTH does not Granger Cause Inflasi	0.54862	0.5824
M2 does not Granger Cause Growth	6.940	0.0028
Growth does not Granger Cause M2	0.388	0.6809
Suku Bunga does not Granger Cause Growth	0.22361	0.8007
Growth does not Granger Cause Suku Bunga	3.45390	0.0421
Investasi does not Granger Cause Growth	2.628	0.0032
Growth does not Granger Cause Investasi	0.59276	0.5580
Kredit does not Granger Cause Growth	4.366	0.0012
Growth does not Granger Cause Kredit	0.28096	0.7567

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015).

Pada bagian ini penulis melakukan analisis kuantitatif dengan lebih menekankan pada identifikasi pengaruh variabel pertumbuhan kredit, investasi, jumlah uang beredar, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga diharapkan dengan analisa kuantitatif tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh variabel pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Analisa kuantitatif dengan menggunakan VAR menghasilkan beberapa persamaan, namun yang dibahas secara khusus dan mendalam adalah hasil estimasi untuk persamaan pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi pengaruh tersebut diolah dengan menggunakan *software views 6* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi - VAR

Variabel Independent	
Inflasi (-1)	-0.1082
	[1.729]*
Investasi (-1)	0.1605
	[2.640]*
Kredit (-1)	1.393
	[1.813]*
Jumlah Uang Beredar (-1)	4.642
	[0.773]
Tingkat Suku Bunga (-1)	-0.616
	[2.368]*
Constant	7.523
	[2.5960]
R-squared	0.9176
Adj. R-Squared	0.8669
F-Statistic	144

*significantly different from zero at 5% level.

Sumber : Hasil pengolahan data (2015).

Berdasarkan hasil estimasi dengan VAR terdapat 5 persamaan, namun sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka kita melihat hasil estimasi yang terkait dengan variabel dependennya pertumbuhan ekonomi dengan variabel independennya pertumbuhan kredit, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan investasi. Dari hasil analisis regresi terlihat bahwa R^2 sebesar 0.917, berarti 91.7 persen perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dan nilai F sebesar 144 menunjukkan positif dan besar, memberikan arti bahwa koefisien regresi secara bersama-sama atau

secara menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini berarti model secara keseluruhan dapat diterima dan dapat dipakai untuk menerangkan variabel-variabel di atas.

Berdasarkan hasil estimasi persamaan VAR di atas maka didapatkan hasil bahwa variabel pertumbuhan kredit yang terjadi 1 periode sebelumnya signifikan dan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan kredit pada 1 periode sebelumnya sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode sekarang sebesar 1.393 persen, *ceteris paribus*. Atau dengan kata lain hasil penelitian juga mengandung pengertian bahwa peningkatan 1 persen pertumbuhan kredit yang terjadi sekarang baru akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.393 persen dampak pada 1 periode setelahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suna (2015), dengan menggunakan data dari negara-negara di Eropa selama periode penelitian 2006-2012. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan kredit mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Lebih lanjut Ho Ngai mengatakan bahwa industri perbankan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari perekonomian melalui kredit. Peningkatan kapasitas produksi dari perekonomian pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.²⁰

Hal senada dikemukakan oleh Banu yang dikemukakan dalam *International Economic Conference of Sibiu 2013 Post Crisis Economy*, paska krisis global kredit ternyata berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan GDP khususnya pertumbuhan kredit sektor rumah tangga.²¹ Aurangzeb melakukan penelitian di Pakistan dengan menggunakan data periode waktu 1981 sampai dengan tahun 2010, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sektor perbankan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

¹⁹ Suna Korkmaz. (2015). Impact of Bank Credit on Economic Growth and Inflation. *Journal of Applied Finance and Banking*. Vol 5(1), hlm. 57-69.

²⁰ Ho Ngai Wa. (2005). *Bank Credit and Economic Growth in Macao*. Working Paper Monetary Authority of Macao.

²¹ Ioana Madalina Banu. (2013). The impact of Credit on Economic Growth in The Global Crisis Context. *Procedia Economics and Finance*. Vol.6 hlm. 25-30

pertumbuhan ekonomi di Pakistan melalui penyaluran kredit yang dilakukan.²²

Sementara itu variabel lainnya, seperti inflasi, investasi, dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun variabel jumlah uang beredar tidak signifikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi pada 1 periode sebelumnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap 1% pertumbuhan investasi pada 1 periode sebelumnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1605% pada periode sekarang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nistor yang melakukan penelitian mengenai pengaruh investasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan sampel negara Romania. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Romania.²³

Pada saat yang bersamaan variabel inflasi pada satu periode sebelumnya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap 1 inflasi pada 1 periode sebelumnya akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada periode sekarang sebesar 0.1082%, *ceteris paribus*. Inflasi yang terjadi menurunkan nilai uang dan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.²⁴ Hasil penelitian ini senada dengan yang dilakukan oleh Niloy pada tahun 2002, yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.²⁵

Berdasarkan hasil estimasi kuantitatif juga didapatkan hasil bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1 persen tingkat suku bunga pada 1 periode sebelumnya akan

²² Autangzeb. (2012). Contribution of Banking Sector in Economic Growth: A Case of Pakistan. *Economic and Finance Review*. Vol. 2(6), hlm. 45-54.

²³ Paula Nistor. (2014). FDI and Economic Growth, the Case of Romania. *Procedia Economic and Finance*. No. 15, hlm. 577-582.

²⁴ N. Geogory Mankiw, Euston Quah, dan Peter Wilson. (2013). *Principle of Economy: An Asian Edition 2nd Edition*. Cengage Learning Asia Pte. Hlm. 573.

²⁵ Niloy Bose. (2002). Inflation, The Credit Market and Economic Growth. *Oxford Economic Paper*. No. 54, hlm 412-434.

menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada periode sekarang sebesar 0,616 persen, *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudra, et. al. pada tahun 2013. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat suku bunga perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara G-20. Tingkat suku bunga tersebut mempengaruhi perkembangan dari sektor perbankan yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.²⁶

Lebih lanjut kenaikan suku bunga sangat dikhawatirkan oleh para kreditor karena membuat pinjaman modal kerja menjadi meningkat dan pada akhirnya menghambat kelancaran bisnis.²⁷ Sehingga tingkat suku bunga yang berlaku harus tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha. Namun

Impulse Response Function (IRF) Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Investasi, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Kredit

Impulse Response Function (IRF) secara umum digunakan untuk melihat pengaruh pada saat yang bersamaan dari suatu variabel terhadap semua variabel lainnya. Hasil estimasi IRF hanya membahas respon dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap *Cholesky One S.D. Innovation* atas *shock* yang disumbangkan kredit, jumlah uang beredar, inflasi, tingkat suku bunga dan investasi. Untuk menelaah perbedaan respon pertumbuhan ekonomi terhadap *shock* sebesar satu standard deviasi Cholesky (*Cholesky One S.D*) terhadap inovasi-inovasi dari variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan konsumsi dan pertumbuhan ekspor bisa disimak ilustrasinya pada Gambar 2.

Seperti yang terlihat pada Gambar 2. di bawah, bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh *shock* dari pertumbuhan kredit sampai mendekati nol pada periode 1 sampai 2,

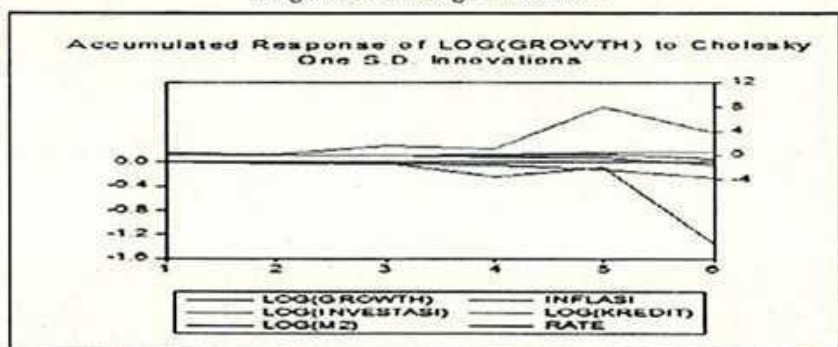
²⁶ Rudra Prakash Pradhan, Sahar Bahmani, Marepalli Uday. (2013). The Dynamics of Insurance Sector Development, Banking Sector and Economic Growth. *Global Economics and Management Review*. Vol 18.

²⁷ "Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara". (Diunduh tanggal 6 Juli 2015 dari <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>).

sedangkan setelah periode 4 dan seterusnya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif akibat *shock* dari pertumbuhan konsumsi yang semakin positif. Hasil IRF ini konsisten dengan hasil estimasi dari regresi VAR. Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Gambar 2. di bawah juga kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki respons yang positif terhadap *shock* pertumbuhan investasi dari periode 1 sampai periode 3. Lalu setelah periode 4 sampai dengan periode 6 pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara negatif oleh *shock* dari pertumbuhan investasi. Sedangkan untuk *shock* yang berasal dari pertumbuhan tingkat suku bunga, memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk periode 1 sampai dengan 6. Sedangkan untuk *shock* yang bersal dari inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dari periode 1 sampai dengan 6. Hasil IRF ini konsisten dengan hasil estimasi VAR.

Gambar 2. Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Kredit, Pertumbuhan Investasi, Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi



Sumber : Hasil pengolahan data (2015)

V. PENUTUP

Sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan, perbankan memiliki peranan penting dalam penyaluran kredit. Perkembangan pertumbuhan penyaluran kredit berdasarkan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 mengalami tren yang berfluktuasi. Jika dari tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami kenaikan, maka

periode tahun setelahnya mengalami tren menurun, walaupun *rebound* di tahun 2010. Akan tetapi setelah tahun 2010 tren pertumbuhan kredit di Indonesia menunjukkan tren yang menurun hingga akhir tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis VAR, pengaruh variabel pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat pertumbuhan kredit yang berasal dari perbankan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, maka pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu ditengah situasi pertumbuhan kredit yang menurun, maka sudah waktunya bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait termasuk DPR RI untuk duduk bersama mencari solusi tersebut. Jika pertumbuhan kredit yang mengalami tren yang menurun dibiarkan terus menerus maka dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Widardjono. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Aretis, P., Demetriades, P., dan Luintel, K. B.. (2001). Financial Development and Economic Growth : the role of stock market. *Journal of Money Credit and Banking*. No. 33. Hlm. 16-41.
- Aurangzeb. (2012). Contribution of Banking Sector in Economic Growth: Case of Pakistan. *Economics and Finance Review*. Vol 2 (6). Hlm 45-54.
- Beck, T., Levine, R dan Loayza. (2000). Finance and The Source of Growth. *Journal of Financial Economics*. No. 58. Hlm. 261-300.
- Damodar Gujarati. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Ho Ngai Wa. (2005). *Bank Credit and Economic Growth in Macao*. Working Paper Monetary Authority of Macao.
- Ingggrid. (2006). Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Ekonomi*. No.8(1), hlm. 40-50.
- Ioana Madalina Banu. (2013). The impact of Credit on Economic Growth in The Global Crisis Context. *Procedia Economics and Finance*. Vol.6 hlm. 25-30.

Artikel dalam jurnal, *working paper*, majalah, dan surat kabar

- "Kredit Mandeg Pertumbuhan Pun Melambat", (diakses dari <http://www.goldbank.co.id/channel/laput/perbankan/kredit.html>, tanggal 29 Juni 2015).

- Levine, R., Loayza, N. Dan Beck T., (2000). Financial Intermediation and Growth : Causality and Causes. *Journal of Monetary Economic*. No. 46. Hlm 31-77.
- Mihail Petkovski, Jordan Kjosevski. (2014). Does Banking Sector development promote economic growth? An Empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe. *Economic Reseach Journal*. Vol 27 (1), hlm. 55-66.
- N. Gregory Mankiw. (2012). *Priciple of Economics*. Singapore : South-Western Cengage Learning.
- Niloy Bose. (2002). Inflation, The Credit Market and Economic Growth. *Oxford Economic Paper*. No. 54, hlm 412-434.
- Paula Nistor. (2014). FDI and Economic Growth, the Case of Romania. *Procedia Economic and Finance*. No. 15, hlm. 577-582.
- "Perkembangan Uang Beredar", (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/perkembangan/Default.aspx>, diakses 12 Juni 2015).
- "Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara". (Diunduh tanggal 6 Juli 2015 dari <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>).
- Schumpeter, J.A. (1911). *The Theory of Economic Development*. Cambridge : Harvard University Press.
- Sawaldjo Puspoprano. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*. Jakarta: LP3S. Hlm. 5-6.
- Rose, Peter S., Hudgings Sylvia S. (2010). *Bank Management and Financial Service*. New York: McGraw-Hill International Edition
- Rudra Prakash Pradhan, Sahar Bahmani, Marepalli Uday. (2013). The Dynamics of Insurance Sector Development, Banking Sector and Economic Growth. *Global Economics and Management Review*. Vol 18.
- Suna Korkmaz. (2015). Impact of Bank Credit on Economic Growth and Inflation. *Journal of Applied Finance and Banking*. Vol 5(1), hlm. 57-69.

TULISAN KETIGA

**KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA BUMN DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEREKONOMIAN NASIONAL**

*oleh: Ariesy Tri Mauleny**

* Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEREKONOMIAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang mendapat perhatian luas dalam pembahasan RAPBN-P Tahun 2015 lalu adalah rencana pemerintah menambah penyertaan modal negara (PMN) menjadi Rp72,9 miliar, yang akan dialokasikan kepada 40 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas RAPBN-P Tahun 2015 tersebut sempat diundur beberapa kali karena diwarnai kericuhan yang dipicu oleh perbedaan pandangan dalam pembahasan PMN kepada BUMN. Komisi VI lebih melihat pada aspek pengembangan PMN dan upaya untuk mempertahankan eksistensi BUMN. Sementara Komisi XI lebih memperhatikan pada aspek keuangannya. Komisi XI juga berpendapat bahwa tidak diperlukan PMN kepada BUMN yang performanya tidak bagus.¹

Dalam RAPBN-P Tahun 2015, alokasi PMN awalnya direncanakan sebesar Rp72.970,4 miliar atau meningkat sebesar Rp67.863,1 miliar dari alokasinya dalam APBN Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp5.107,3 miliar. Peningkatan PMN pada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas diantaranya meningkatkan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim serta industri kedirgantaraan dan pertahanan nasional.²

Tentu saja pilihan kebijakan yang digunakan untuk menjadi landasan bagi dialokasikannya PMN pada BUMN setiap tahunnya

¹ <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/13/357931/perdebatan-pmn-ke-bumn-harus-pertimbangkan-3-aspek>, diakses 1 Agustus 2015 pk.09.25 wib.

² <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20RAPBNP%202015.pdf> diakses 3 Agustus 2015 pk. 11.05 wib.

disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah yang sedang berjalan dan pembahasan yang berlangsung di DPR. Pada APBN-P Tahun 2015, alokasi PMN paling besar untuk pembangunan infrastruktur dan kemaritiman yaitu sekitar 69 persen dari total penyaluran PMN sebagai dukungan pada program Nawa Cita. Alokasi tersebut sebagian besar diserahkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dengan nilai Rp20.356,6 miliar yang terbagi dalam tunai sebesar Rp2.000,0 miliar dan non tunai Rp18.356,6 miliar. Bahkan pada RAPBN 2016 dialokasikan kembali PMN dalam bentuk tunai untuk PT SMI senilai Rp5.000,0 miliar.

Jumlah BUMN per 31 Desember 2014 yang dimiliki Pemerintah tercatat sebanyak 119 BUMN atau berkurang 20 BUMN dibanding akhir tahun 2013. Pengurangan tersebut dikarenakan 2 BUMN berubah status badan hukum menjadi BPJS yaitu PT Askes dan PT Jamsostek. Pengurangan jumlah BUMN juga terjadi di sektor perkebunan, dimana 14 BUMN Perkebunan menjadi 1 holding BUMN Perkebunan sehingga jumlah BUMN Perkebunan berkurang 13. Selain itu juga 6 BUMN Kehutanan menjadi 1 holding BUMN Kehutanan sehingga jumlah BUMN Kehutanan berkurang 5.³

Perkembangan BUMN belum menggembirakan. Laba bersih tahun 2014 hanya tumbuh 1,45 persen. Jika dilihat realisasi 2013, dari 121 BUMN, terdapat 94 BUMN yang memberikan laba Rp151,85 triliun dan 27 BUMN yang mengalami kerugian Rp34,49 triliun. Nilai tersebut berkurang di tahun 2014 dimana 95 BUMN mencapai laba Rp153,79 triliun dan 22 BUMN yang mengalami kerugian sebesar Rp10,677 triliun. Dengan capaian kinerja demikian, target setoran dividen Rp40 triliun tidak tercapai. Sementara nilai PMN yang diajukan Rp48,006 triliun.

Selama ini penyertaan modal negara kepada BUMN jumlahnya tak sebanding dengan penyeteroran dividen yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Yang terjadi saat ini, penyertaan modal cenderung lebih besar ketimbang dividen yang disetorkan. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, nilai penyertaan modal Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada BUMN dalam rentang waktu 2010-2013 telah mencapai Rp793 triliun. Jumlah

³ <http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN>, diakses 1 Agustus 2015 pk.09.05 wib.

penyertaan modal tersebut tersebar di 141 BUMN yang terdiri atas 14 Perum, 109 Perseroan Terbatas dan 18 Perseroan Terbuka.

Laba yang dihasilkan BUMN setiap tahunnya tidak sebanding dengan dividen yang disetor ke APBN pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2010 misalnya, laba yang dihasilkan BUMN sebesar Rp102,4 triliun, dan yang disetor hanya sebesar Rp30,1 triliun. Sementara pada tahun 2011, dari laba BUMN sebesar 115,6 triliun, dividen yang dibayarkan justru menurun jadi 28,2 triliun. Berikutnya tahun 2012, laba yang dihasilkan BUMN meningkat jadi Rp140,4 triliun, namun yang dihasilkan hanya 30,8 triliun. Begitu juga di tahun 2013, dari laba BUMN sebesar 220,2 triliun, dividen untuk APBN hanya sebesar Rp34,0 triliun.⁴

Faktanya, BUMN (baik Perjan, Perum maupun Persero) yang memiliki peran luar biasa secara konstitusional itu dan mendapat dukungan besar APBN, hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil bagi APBN. Indikasi yang disampaikan sejumlah pengamat ekonomi bahwa belum tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN atau pengelolaan BUMN belum dilandasi oleh *Good Corporate Governance*. Di sisi lain, BUMN yang hidup tidak sehat juga tidak terlepas dari besarnya intervensi pemerintah dalam pengelolaan BUMN dan besarnya pengaruh politik yang melingkupinya. Mekanisme pengelolaan BUMN yang tidak diserahkan pada mekanisme pasar, dianggap menjadi salah satu jawaban mengapa peran BUMN selama ini tidak optimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁵

Sejauh ini, kebijakan PMN masih dinilai negatif karena PMN selalu dikaitkan dengan BUMN yang merugi. Anggapan ini muncul karena dalam prakteknya pemerintah dan DPR seringkali memberikan PMN kepada BUMN merugi, seolah PMN memang untuk BUMN merugi dan pemerintah dianggap mensubsidi BUMN. Padahal alasan diberikannya PMN karena perusahaan negara atau BUMN seharusnya menjadi salah satu pilar perekonomian bangsa melalui peningkatan kinerja sektor keuangan.

⁴ Didit Sidarta, Penyertaan Modal Negara ke BUMN perlu Regulasi Jelas, <http://geotimes.co.id/penyertaan-modal-negara-ke-bumn-perlu-regulasi-jelas/>, diakses tanggal 28 Mei 2015 pk.08.45

⁵ Risalah Mahkamah Konstitusi Nomor: 001.021.022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU No. 20 Tahun 2001 terhadap UUD 1945.

Dilatarbelakangi hal-hal diatas, tulisan ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, memberikan gambaran mengenai perkembangan kebijakan BUMN dan penyertaan modal negara terhadap kinerja keuangan. *Kedua*, menjelaskan bagaimana realisasi dan permasalahan dalam PMN kepada BUMN dan upaya penanggulangannya. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan terkait penyertaan modal negara dan pengembangan BUMN bagi sektor keuangan.

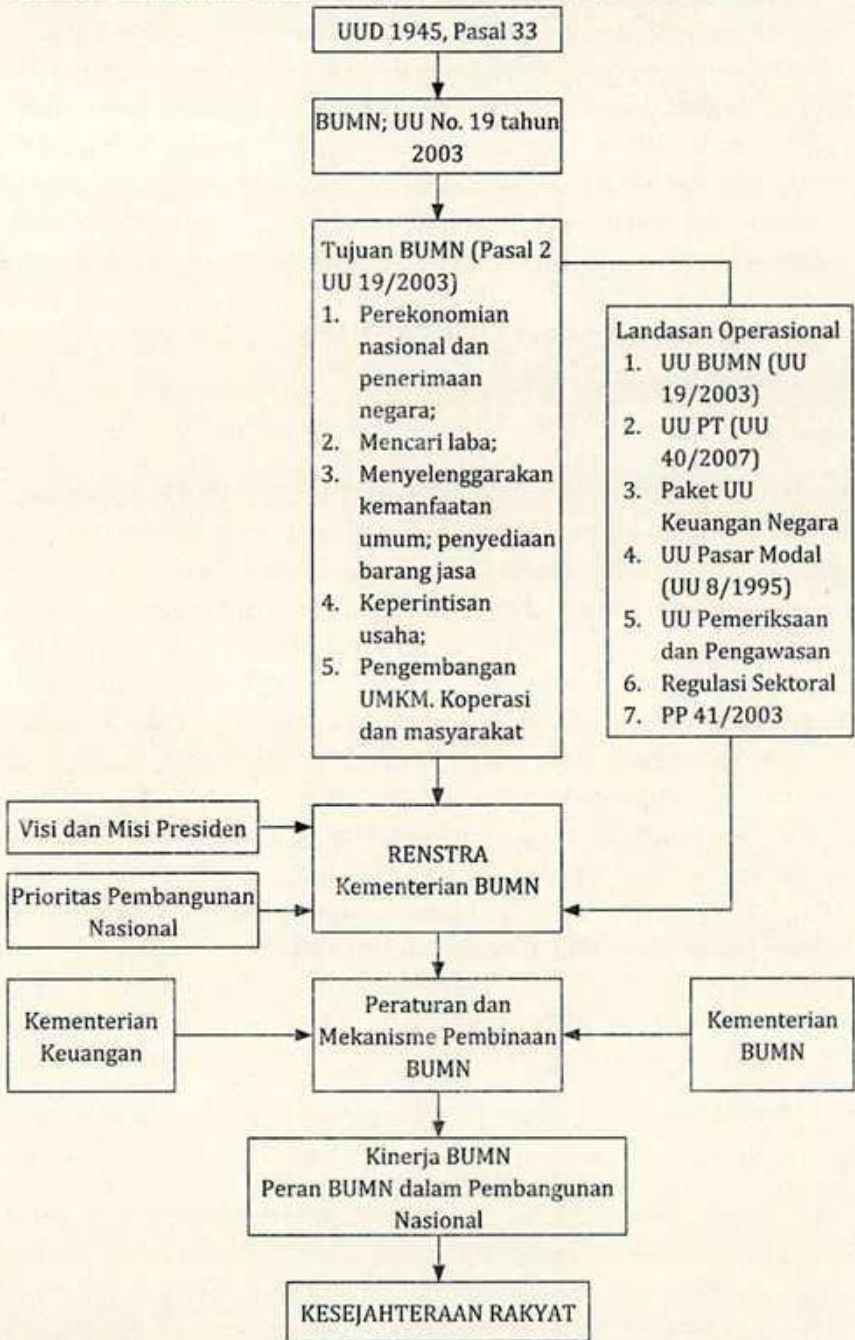
II. BUMN DAN KINERJA PEREKONOMIAN

2.1. Pembentukan BUMN

Pada awalnya BUMN adalah hasil nasionalisasi ex perusahaan asing Belanda yang kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan Negara. Melalui UU 01/1969 dibentuklah 3 jenis bentuk BUMN berdasarkan tugas, fungsi dan misi usaha pada masa itu yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Persero.

Keberadaan BUMN didasarkan pada Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang mempunyai makna cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan begitu negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang menjadi amanat dari ayat tersebut. Lihat Gambar 1 untuk penjelasan lain dasar hukum pengelolaan dan operasional pembentukan BUMN.

Gambar 1. Landasan Hukum Pengelolaan dan Operasional Pembinaan BUMN⁶



⁶ Renstra BUMN 2012-2014.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pembinaan dan pengelolaan BUMN menjadi kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan negara dan Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan pemilik modal pada Perum.

2.2. Peran dan Fungsi BUMN

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN menjadi semakin penting sebagai perintis dalam penciptaan dan pengembangan sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta dan terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut serta mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

BUMN juga mempunyai fungsi bisnis, baik sebagai unit ekonomi yang dituntut mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta pada umumnya maupun sebagai agen pembangunan. Dengan begitu, BUMN diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Sebagai agen pembangunan, BUMN dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, setiap BUMN harus menjalankan fungsi tersebut sekaligus, meskipun dengan bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memajukan perekonomian. Dalam sistem ekonomi yang kompleks, pelaku ekonomi tidak hanya terbatas pada swasta, pemerintah juga berperan dalam mengatur agar sistem ekonomi berjalan dengan baik. Adapun detail perkembangan kebijakan mengenai BUMN dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan mengenai BUMN

Tahun	Landasan	Uraian
1960-1969	UU 19/1960 tentang Perusahaan Negara	Pembinaan BUMN oleh Departemen/Menteri Teknis
1969-1998	PP 12/1969 tentang Perusahaan Perseroan; Inpres 11/1973; PP 3/1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan.	Menteri Keuangan sebagai Pembina Keuangan; Menteri Teknis sebagai Pembina Teknis.
1998	PP 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan; PP 13/1998 tentang perusahaan Umum.	Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham Negara RI/ Pemilik Modal pada BUMN dan memegang Kewenangan Pembinaan BUMN.
1998-2001	PP 50/1998; Inpres 15/1998; Keppres 38/1999; Keppres 39/1999.	Pengalihan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham dalam Perusahaan Persero kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

2001-2003	PP 64/2001	Pengalihan /Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangna Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri BUMN.
2003-sekarang	UU 19/2003 tentang BUMN	Menteri BUMN adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari negara/pemerintah pusat selaku pemegang saham/ pemilik modal BUMN (Pasal 1 Ayat (5)).
	PP 41/2003	Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri BUMN.

Sumber: www.bumn.go.id

2.3. Perkembangan BUMN dan Kinerja Perekonomian

Perkembangan BUMN sangat dipengaruhi oleh risiko fiskal baik yang melalui kebijakan dividen BUMN, privatisasi BUMN maupun pungutan pajak ekspor dan retribusi daerah. Besar kecilnya prosentase rasio berpengaruh terhadap besar kecilnya arus kas perusahaan dan penguatan modal BUMN di dalam upaya peningkatan kinerjanya.

BUMN juga sangat dipengaruhi oleh kondisi moneter dalam negeri, terutama kestabilan nilai tukar rupiah. Pengaruh tersebut akan semakin besar terutama bagi BUMN yang banyak melakukan transaksi mata uang asing. Pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut dapat diminimalisir dengan kebijakan yang menuntut BUMN untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Perkembangan BUMN dalam sepuluh tahun terakhir memperlihatkan dinamika baik dalam hal jumlah BUMN maupun kinerja keuangannya. Dari segi jumlah BUMN terlihat bahwa pada tahun 2014, jumlah BUMN mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipicu oleh dilakukannya kebijakan restrukturisasi BUMN dimana 14 BUMN perkebunan menjadi 1 holding BUMN Perkebunan dan 6 BUMN Kehutanan menjadi 1 holding BUMN Kehutanan. (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Minoritas BUMN

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perum	13	13	14	14	14	17	18	18	20	20
Persero	114	114	111	113	112	111	109	108	105	85
Persero Tbk	12	12	14	14	15	14	14	14	14	14
Total	139	139	139	141	141	142	141	140	139	119
Minoritas	21	21	21	19	19	18	18	13	12	25

Sumber: Kementerian BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN selain tunduk pada UU BUMN, juga harus mengikuti UU Perseroan Terbatas (PT), paket UU Keuangan Negara, paket UU bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, serta peraturan perundang-undangan sektoral. Dalam pelaksanaannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan operasional BUMN saling berbenturan sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan dan pembinaan BUMN.

Perkembangan kinerja keuangan BUMN dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan jika dilihat dari laba bersih. Pada tahun 2005 laba bersih yang diperoleh BUMN sebesar Rp26,8 triliun, meningkat menjadi Rp154 triliun pada tahun 2014 atau pertumbuhan 47,46 persen rata-rata per tahun. (Tabel 3).

Tabel 3. Perkembangan Kinerja BUMN

(triliun Rp)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014
Aset	1.300,1	1.451,5	1.743,0	1.970,9	2.241,4	2.505,5	4.216,0	4.467,0
Ekuitas	366,1	413,5	472,6	502,1	565,8	601,8	937,0	1.086,0
Penjualan	643,9	732,4	825,9	1.085,9	950,9	1.077,7	3.279,0	3.381,0
Laba Bersih	26,8	51,3	55,8	53,2	87,2	101,2	152,0	154,0

Sumber: Kementerian BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI

Perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah yang membawa pengaruh terhadap kegiatan usaha BUMN di daerah seringkali menimbulkan persepsi yang menganggap BUMN sebagai institusi publik. Persepsi ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru menghambat BUMN untuk beroperasi sebagaimana sebuah korporasi yang mengejar keuntungan.

Selain itu juga, sebagian pemerintah daerah masih menuntut penerimaan yang lebih dari BUMN sehingga menimbulkan terbitnya regulasi tambahan tentang pajak dan retribusi yang harus dibayar BUMN. Bahkan seringkali, muncul keinginan pemerintah daerah untuk turut serta mendapatkan hak atas pembagian laba BUMN dan turut serta mengelola BUMN yang berada di wilayahnya. Isu deregulasi sektoral juga mewarnai upaya pembinaan dan pengawasan BUMN. Beberapa BUMN yang selama ini menikmati fasilitas perlindungan usaha dari pemerintah harus berbenah dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi persaingan usaha. Namun demikian, peran BUMN terhadap APBN dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peran BUMN terhadap APBN

(triliun Rp)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Setoran Pajak BUMN	120,00	132,00	145,00	160,00	171,00
Penerimaan Dividen dari BUMN	30,09	28,20	30,78	34,02	40,16
Total	150,09	160,20	175,78	194,02	211,16

Sumber: Kementerian BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI

Penilaian BUMN secara makro masih menunjukkan kecenderungan untuk meningkat namun apabila dilihat secara mikro, perkembangan setiap BUMN menunjukkan dinamika yang berbeda. Meski secara makro, laba bersih menunjukkan kecenderungan meningkat, namun tidak seluruh BUMN memberikan laba. BUMN yang memberikan laba sebanyak 94 BUMN dengan nilai Rp151.851 miliar pada tahun 2013, sementara untuk tahun 2014 sebanyak 95 BUMN dengan nilai proyek Rp153.788 miliar. Tabel 5 menunjukkan 20 BUMN yang memberikan laba terbesar.

Tabel 5. Daftar 20 BUMN dengan Laba Terbesar Tahun 2013 dan 2014

(triliun Rp)

No	BUMN	Laba Bersih	%	No	BUMN	Laba Bersih	%
1	PT BRI Tbk	24.253,8	16	11	PT Jasa Raharja	2.369,9	2
2	PT Telkom	21.446,0	14	12	PT Bukit Asam	2.019,2	1
3	PT Bank Mandiri Tbk	20.654,8	14	13	PT Pegadaian	1.708,5	1

No	BUMN	Laba Bersih	%	No	BUMN	Laba Bersih	%
4	PT Pertamina	18.230,3	12	14	PT Pelindo III	1.586,8	1
5	PT PLN	11.741,6	8	15	PT Inalum	1.537,0	1
6	PT BNI	10.829,4	7	16	PT Pelindo III	1.353,8	1
7	PT PGN	8.880,8	6	17	PT Jasa Marga Tbk	1.215,3	1
8	PT Semen Indonesia	5.573,5	4	18	PT BTN Tbk	1.115,5	1
9	PT Pupuk Indonesia	4.822,2	3	19	PT Angkasa Pura II	1.098,1	1
10	PT TASPEN	3.463,9	2	20	PT Kereta Api Indonesia	943,427	1
	Jumlah 10 Besar	129.896	88		Jumlah 20 Besar	144.844,3	98

Sumber: Sumber : NK dan APBN 2016 dan Laporan Kementerian BUMN pada RDP Komisi XI

Sementara jumlah BUMN yang mengalami kerugian masih cukup banyak. Pada tahun 2013, dari 139 BUMN, yang mengalami kerugian 27 BUMN atau 19,42 persen. Sementara pada tahun 2014, dari 119 BUMN terdapat 22 BUMN yang masih mengalami kerugian. (Tabel 6).

Tabel 6. BUMN yang Merugi Tahun 2013 dan 2014

(triliun Rp)

No	BUMN	Kerugian	No	BUMN	Kerugian
1	Perum Produksi Film Negara	1	1	PT Energy Management Ind	3
2	PT Dok dan Kodja Bahari	3	2	PT PDIP Batam	5
3	PT INUKI	4	3	PT INUKI	6
4	Perum LKBN Antara	4	4	PT Primissima	7
5	PT Energy Management Ind	5	5	PT Berdikari	11
6	PT Primissima	10	6	PT Perusahaan Perdagangan Ind	37
7	PT Boma Bisma Indra	19	7	PT Industri Sandang Nusantara	53
8	PT Survai Udara Panas	20	8	PT Kertas Kraft Aceh	81
9	PT Industri Sandang Nusantara	41	9	PT Dok Perkapalan Sby	88

No	BUMN	Kerugian	No	BUMN	Kerugian
10	PT Hotel Indonesia Natour	46	10	PT Barata Indonesia	97
11	PT Indofarma	54	11	PT Iglas	102
12	PT Djakarta Lloyd	57	12	PT Pertani	123
13	PT Iglas	71	13	PT ASEI REI	128
14	PT Kertas Kraft Aceh	90	14	PT Sang Hyang Seri	160
15	PT INKA	97	15	PT Dok Kodja Bahari	176
16	PTPN II	101	16	PT INTI	256
17	PT Dok Perkapalan Sby	103	17	PT Rajawali Nusantara Ind	281
18	PT PN XIV	135	18	Perum Bulog	459
19	PT Krakatau Steel Tbk	146	19	PT Antam Tbk	775
20	PT Kertas Leces	151	20	PT Merpati Nusantara Airlines	1.538
21	PT Pertani	278	21	PT Krakatau Steel	1.864
22	Perum Bulog	342	22	PT Garuda Indonesia	4.418
23	PT PAL	387		Jumlah Kerugian 2014	10.677
24	PT Sang Hyang Seri	546			
25	PT PELNI	634			
26	PT Merpati Nusantara Airlines	1.573			
27	PT PLN	29.567			
	Jumlah Kerugian 2013	34.485			

Sumber : NK dan APBN 2016 dan Laporan Kementerian BUMN pada RDP Komisi XI

III. KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

3.1. Kebijakan Penyertaan Modal Negara

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian negara antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, baik melalui instansi Pemerintah maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya untuk menyelamatkan perekonomian nasional, Pemerintah dapat pula melakukan Penyertaan Modal Negara ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara. Penyertaan Modal Negara seperti ini dilakukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas, Pemerintah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBN, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

Disamping negara dapat melakukan penambahan penyertaan modal, negara juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada BUMN dan Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham milik negara pada Perseroan dan Perseroan Terbatas. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, maka perlu melakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Mengingat modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikenal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku menteri yang mempunyai kewenangan melakukan penatausahaan kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2. Ruang Lingkup Penyertaan Modal Negara

Dalam periode 2010-2014, Pemerintah secara reguler mengalokasikan dana investasi Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan KUMKM, serta dukungan kepemilikan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2015, dukungan juga diberikan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional

Nawa Cita. Namun demikian, komponen dan rincian dana investasi pemerintah berubah-ubah setiap tahunnya, menyesuaikan dengan dukungan atas kebijakan pemerintah pada periode tersebut.

Bentuk-bentuk penyertaan modal negara dapat berupa pemerintah memberikan sejumlah uang tunai kepada BUMN atau bisa juga melalui konversi piutang pemerintah dimana utang BUMN kepada pemerintah dikonversi menjadi PMN. Selain itu juga bisa berasal dari hibah saham/aset dari pihak lain dimana pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau perpindahan kepemilikan dari pihak ketiga menjadi milik pemerintah.

Penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas. Sementara pengurangan penyertaan modal negara dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan BUMN yang bersangkutan dan tidak boleh merugikan kreditor.

Dana Investasi Pemerintah dalam periode 2010-2015 terdiri atas: (1) Investasi Pemerintah; (2) Penerimaan Kembali Investasi; (3) PMN; (4) Dana Bergulir; (5) Pembiayaan Investasi dalam Pengambilalihan PT dan (6) Pembiayaan Investasi dalam Pembentukan BLU Manajemen Aset. Dalam kurun waktu tersebut, PMN tidak hanya dialokasikan untuk BUMN, namun juga dialokasikan kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan badan usaha lain dalam rangka memenuhi kewajiban dan komitmen Pemerintah pada Organisasi/LKI dan badan usaha lain. (Tabel 7).

Tabel 7. Perkembangan Dana Investasi Pemerintah Tahun 2010-2015
(miliar Rp)

Uraian	LKPP					APBN-P 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
Investasi Pemerintah	(927.5)	(1,550.0)	(3,299.6)	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi	-	-	-	-	-	19,134.9
Penyertaan Modal Negara	(6,038.6)	(9,295.8)	(8,519.5)	(3,997.1)	(5,412.5)	(70,372.8)

a. BUMN	(6,038.6)	(8,684.5)	(7,600.0)	(2,000.0)	(3,000.0)	(64,883.9)
b. Organisasi/ LKI	-	(611.3)	(541.2)	(592.3)	(790.0)	(250.5)
c. Lainnya	-	-	(378.4)	(1,404.8)	(1,622.5)	(5,238.3)
Dana Bergulir	(5,333.0)	(8,798.1)	(7,043.4)	(3,335.8)	(3,500.0)	(6,106.3)
Pembiayaan Investasi u/ Pengambil- alihan	-	-	-	(4,582.6)	-	-
Pembiayaan Investasi u/ Pembentukan BLU Manajemen Aset	-	-	-	-	-	(1,500.0)
Jumlah	(12,299.1)	(19,643.9)	(18,862.6)	(11,915.4)	(8,912.5)	(58,844.1)

Sumber: NK dan APBN 2016

Terlihat dalam Tabel 7, bahwa dalam perkembangannya, investasi pemerintah terbesar dialokasikan untuk PMN kepada BUMN. Pemberian PMN tersebut dilatarbelakangi keinginan pemerintah menjadikan BUMN sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan agen pembangunan nasional. Pada tahun 2010, nilai PMN yang diberikan kepada BUMN sebesar Rp6.038,6 miliar meningkat menjadi Rp9.295,8 miliar pada tahun 2011. Selanjutnya besaran PMN meningkat drastis pada tahun 2015 dengan adanya program prioritas pemerintah Nawa Cita. Dalam RAPBN 2016 juga dialokasikan PMN sebesar Rp48.214,7 untuk BUMN.

3.3. Kinerja Keuangan Negara dan PMN

Keberhasilan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari kinerja sektor keuangan khususnya peran penyertaan modal negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya melalui pembentukan dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara. Dalam Keuangan Negara, penyertaan modal negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero, Perum, perseroan terbatas lainnya dan Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Dengan demikian peran penyertaan modal negara dalam suatu perekonomian pada suatu negara dalam mendukung pembangunan sangatlah penting, hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor riil. Persero, Perum atau BUMN sebagai agen pembangunan diharapkan mampu berperan dalam memperkuat kinerja sektor keuangan dan turut menjaga kestabilan moneter.

Pada periode 2010-2014, pendapatan negara mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,7 persen yang didominasi oleh peningkatan pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan. Sementara rata-rata pertumbuhan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 10,3 persen per tahun. (Tabel 8).

Tabel 8. Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2015

(miliar Rp)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Dalam Negeri	992.248,5	1.205.345,7	1.332.322,9	1.432.058,6	1.545.456,0	1.758.330,9
1. Penerimaan Perpajakan	723.306,7	873.873,9	980.518,1	1.077.306,7	1.146.865,8	1.489.255,5
a. Pajak Dalam Negeri	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.029.850,1	1.103.217,6	1.439.998,6
b. Pajak Perdagangan Internasional	28.914,5	54.121,5	49.656,3	47.456,6	43.648,1	49.256,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	268.941,9	331.471,8	351.804,7	354.751,9	398.590,5	269.075,4
a. Pendapatan SDA	168.825,4	213.823,3	225.844,0	226.406,2	240.848,3	118.919,1
b. Bagian Laba BUMN	30.096,9	28.184,0	30.798,0	34.025,6	40.314,4	36.956,5
c. PNBP Lainnya	59.428,6	69.360,5	73.458,5	69.671,9	87.746,8	90.109,6
d. Pendapatan BLU	10.590,8	20.104,0	21.704,3	24.648,2	29.681,0	23.090,2

Penerimaan Hibah	3.023,0	5.253,9	5.786,7	6.832,5	5.034,5	3.311,9
Jumlah	995.271,5	1.210.599,7	1.338.109,6	1.438.891,1	1.550.490,8	1.762.642,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Meskipun demikian, penerimaan yang diperoleh dari bagian laba BUMN masih menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Bahkan perkiraan realisasi tahun 2015, diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp3.357,9 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar negatif 8,33 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu *pay out ratio* yang tepat untuk mendukung permodalan BUMN.

IV. PERKEMBANGAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK BUMN

4.1. Perkembangan Kebijakan PMN kepada BUMN

Dukungan BUMN terhadap keuangan negara adalah melalui besaran dividen yang diberikan untuk memperbesar penerimaan negara. Bentuk penerimaan negara ini dikenal dengan istilah *revenue dominial* yaitu pendapatan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk didalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara.⁷ Penerimaan dimaksud berasal dari penjualan hasil kekayaan alam dan kekayaan yang menjadi milik negara maupun pemberian fasilitas atas ijin kepada kelompok masyarakat. Tabel 9 menunjukkan perkembangan penerimaan PMN pada BUMN dalam enam tahun terakhir.

Tabel 9. Perkembangan PMN pada BUMN Tahun 2010-2015

(miliar Rp)

BUMN Penerima PMN	LKPP					APBN-P 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
PERUM						
Perum Jamkrido	900,0	1.200,0	1.169,0	1.200,0	1.300,0	500,0
Perum Bulog						3.000,0

⁷ Buchanan, James M. "The Economics of Earmarked Taxes". *The Journal of Political Economy*. Vol. 71 Nomor 5 (Oct., 1963). The University of Chicago Press. Goetz.

BUMN Penerima	LKP				2010	2011	2012	2013	2014	APBN-P 2015
Perum Perikanan Indonesia										300,0
Perum Perumnas										1.000,0
PERSERO										
PT Pupuk Iskandar Muda						1.338,0				
PT Merpati Nusantara Airlines						561,0				
PT Askri Indo	1.120,0	800,0	831,0	1.188,5					700,0	500,0
PT Dirgantara Indonesia							1.400,0			400,0
PT Perusahaan Pengelola Aset										1000,0
PT Perkebunan Nusantara III										3.150,0
PT Perkebunan Nusantara VII										17,5
PT Perkebunan Nusantara IX										100,0
PT Perkebunan Nusantara X										97,5
PT Perkebunan Nusantara XI										65,0
PT Perkebunan Nusantara XII										70,0
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	1.000,0	1.500,0	1.000,0							1.500,0
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II	0,1									
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III		0,1								
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV			0,1							

BUMN Penerima PMN	LKPP					APBN-P 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V			0,1			
PT Sarana Multigriya Finansial		1.000,0			1.000,0	1.000,0
PT Geo Dipa Energi		443,5				607,3
PT Inhutani I		5,0				
PT PAL Indonesia		648,3	600,0			1.500,0
PT Sarana Multi Infrastruktur	1.000,0		2.000,0			20,356,6
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	18,5					250,0
PT Pindad			300,0			700,0
PT Industri Kapal Indonesia			200,0			200,0
PT Garam			100,0			300,0
PT Utama Karya						3.600,0
PT Pertani						470,0
PT Sang Hyang Seri						400,0
PT Perikanan Nusantara						200,0
PT Permodalan Nasional Madani						1.000,0
PT Angkasa Pura II						2.000,0
PT Angk. Sungai, Danau, Penyebrangan						1.000,0
PT Pelni						500,0
PT Djakarta Lloyd						350,0
PT Waskita Karya						3.500,0
PT Adhi Karya						1.400,0
PT Dok dan Perkapalan Surabaya						200,0

BUMN Penerima PMN	LKPP					APBN-P 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari						900,0
PT Aneka Tambang						3.500,0
PT Kereta Api Indonesia						2.000,0
PT Pelabuhan Indonesia IV						2.000,0
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia						250,0
PT Perusahaan Listrik Negara						5.000,0
Jumlah	4.038,6	8.684,5	7.600,2	2.000,0	3.000,0	64.883,9

Sumber: NK APBN 2016

Drastisnya peningkatan alokasi PMN kepada BUMN pada tahun 2015 dibandingkan tahun tahun sebelumnya dilandasi oleh kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan BUMN sebagai *agent development* dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional Nawa Cita. Alokasi yang besar tersebut digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan, sehingga dapat *leverage* kemampuan pendanaan BUMN yang bersangkutan. Adapun program prioritas nasional yang didukung oleh BUMN antara lain: (1) mendukung kedaulatan pangan; (2) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (3) pembangunan maritim; (4) industri pertahanan dan keamanan, dan (5) kemandirian ekonomi nasional.

Pada APBN Tahun 2016, alokasi PMN kepada BUMN direncanakan mengalami penurunan namun tetap lebih besar dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung agenda prioritas yaitu program kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, kedaulatan energi, pengembangan industri strategis dan program kemandirian ekonomi nasional. (Tabel 10).

Tabel 10. PMN pada BUMN Menurut Program Prioritas

No.	Nama BUMN	APBN-P 2015		APBN 2016	
		Tunai	Non Tunai	Tunai	Non Tunai
I	Program Kedaulatan Pangan				
1	Perum Bulog	(3,000.0)		(2,000.0)	
2	PT Perikanan Nusantara	(200.0)			(29.4)
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia				(692.5)
4	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia			(500.0)	
5	PT Pertani	(470.0)			
6	PT Sang Hyang Seri	(400.0)			
7	Perum Perikanan Indonesia	(300.0)			
8	PT Garam	(300.0)			
9	PT Perkebunan Nusantara III	(3,150.0)			
10	PT Perkebunan Nusantara VII	(17.5)			
11	PT Perkebunan Nusantara IX	(100.0)			
12	PT Perkebunan Nusantara X	(97.5)			
13	PT Perkebunan Nusantara XI	(65.0)			
14	PT Perkebunan Nusantara XII	(70.0)			
II	Program Pemb. Infrastruktur dan Maritim				
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	(2,000.0)	(18,356.6)	(5,000.0)	
2	PT Sarana Multigriya Finansial	(1,000.0)		(1,000.0)	

No.	Nama BUMN	APBN-P 2015		APBN 2016	
		Tunai	Non Tunai	Tunai	Non Tunai
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	(1,500.0)		(1,000.0)	
4	PT Utama Karya	(3,600.0)		(3,000.0)	
5	PT Wijaya Karya Tbk			(3,000.0)	
6	PT Pembangunan Perumahan			(2,000.0)	
7	Perum Perumnas	(1,000.0)			(235.4)
8	PT Angkasa Pura II	(2,000.0)		(2,000.0)	
9	PT Jasa Marga Tbk			(1,250.0)	
10	PT Pelayaran Nasional Indonesia	(500.0)			(564.8)
11	PT Amarta Karya				(32.1)
12	PT Waskita Karya Tbk	(3,500.0)			
13	PT Adhi Karya Tbk	(1,400.0)			
14	PT Kereta Api Indonesia	(2,000.0)			
15	PT Djakarta Lloyd	(350.0)			
16	PT Pelindo IV	(2,000.0)			
17	PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	(1,000.0)			
18	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	(200.0)			
19	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	(900.0)			
20	PT Industri Kapal Indonesia	(200.0)			
III	Program Kedaulatan Energi				
1	PT Perusahaan Listrik Negara	(5,000.0)		(10,000.0)	
2	PT Geo Dipa Energi	(607.3)		(1,160.0)	

No.	Nama BUMN	APBN-P 2015		APBN 2016	
		Tunai	Non Tunai	Tunai	Non Tunai
IV	Program Pengembangan Industri Strategis				
1	PT Krakatau Steel			(1,500.0)	(956.5)
2	PT Industri kereta			(1,000.0)	
3	PT Barata Indonesia			(500.0)	
4	PT Pindad	(700.0)			
5	PT Dirgantara Indonesia	(400.0)			
6	PT PAL Indonesia	(1,500.0)			
V	Program Kemandirian Ekonomi Nasional				
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia		(250.0)	(500.0)	
2	PT Askrindo	(500.0)		(500.0)	
3	Perum Jamkrindo	(500.0)		(500.0)	
4	PT Permodalan Nasional Madani	(1,000.0)			
5	PT Perusahaan Pengelola Aset	(1,000.0)			
6	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	(250.0)			
7	PT Antam	(3,500.0)			
VI	Program Penguatan Sektor Keuangan				
1	PT Reasuransi Indonesia Utama			(500.0)	
Jumlah		(46,277.3)		(36,910.0)	(2,510.8)
	(64,883.9)			(39,420.8)	

Sumber : NK dan APBN 2016 dan Laporan Kementerian BUMN pada RDP Komisi XI

4.2. Permasalahan PMN kepada BUMN dan Upaya Penyelesaian

Terdapat dua pola penyertaan modal Negara kepada BUMN yaitu pola *cash transfer* dan *asset transfer*. Pada *cash transfer*, pemerintah

mengalokasikan dana APBN melalui Kementerian BUMN. Sedangkan untuk Asset transfer, biasanya pemerintah melalui kementerian teknis mengalokasikan dana APBN untuk pengadaan barang/asset tertentu, kemudian setelah proses pengadaan selesai maka asset tersebut diserahkan. Mengenai penambahan PMN kepada BUMN baik berupa penyerahan asset tambahan maupun berupa uang kas saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun belum mengatur pasal mengenai tujuan penambahan PMN tersebut. Dengan demikian dapat menjadi peluang atau insentif bagi manajemen BUMN atau pihak terkait untuk melakukan *moral hazard* atas tujuan ideal diadakannya penambahan PMN kepada BUMN.⁸

Kinerja BUMN masih belum optimal, meski secara umum, menunjukkan adanya peningkatan. Namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Masih ada potensi BUMN yang dapat mempengaruhi sisi pendapatan dan sisi pengeluaran Negara. Pada sisi pendapatan, BUMN menyumbang penerimaan Negara baik penerimaan pajak maupun bukan pajak. Sedangkan dari sisi pengeluaran, jika BUMN memiliki kinerja yang rendah, pada akhirnya mengakibatkan beban terhadap pengeluaran Negara, padahal bias saja PMN yang dikeluarkan untuk BUMN cukup besar.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dan DPR dalam memutuskan alokasi tambahan PMN kepada sejumlah BUMN. Keberadaan BUMN merupakan keinginan Negara untuk menguasai bidang-bidang strategis dan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pengendalian atas cabang-cabang produksi yang penting dilakukan dengan mengoptimalkan peran BUMN sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Pemberian PMN haruslah merupakan strategi untuk memperbesar peran BUMN dalam ekonomi nasional. Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu: (1) meningkatkan kontribusi BUMN pada penerimaan negara; (2) meningkatnya pelayanan publik yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia karena Negara melalui BUMN memiliki orientasi sosial

⁸ http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpprf%5CEvaluasi_Risiko_Fiskal_Atas_Kebijakan_Public_Service_Obligation_dan_Penyertaan_Modal_Negara.pdf

dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya; dan (3) BUMN turut aktif dalam membuka lapangan pekerjaan.

Pendekatan yang sering digunakan dalam bidang pengelolaan keuangan publik khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja adalah *earmarking* atau *earmarked*. Kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. Pendekatan *earmarked* merupakan kebijakan untuk mendesain suatu pendapatan tertentu menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pelayanan umum yang juga tertentu.⁹

Maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dinyatakan dalam UU 19/2003 tentang BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Peningkatan PNBPN dari sebesar Rp147 triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp377,76 triliun pada tahun 2014 atau naik hampir tiga kali lipat yang berasal dari kontribusi penerimaan migas sebesar 61 persen, PNBPN lainnya 20 persen, dividen BUMN sebesar 10 persen, dan SDA non migas sebesar 5 persen. Besaran ini seharusnya masih dapat ditingkatkan mengingat masih terdapat potensi-potensi PNBPN yang dapat digali dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, mempercepat pembangunan nasional, mewujudkan keadilan bagi negara.

Kebijakan PMN kepada BUMN bukan tanpa masalah. Hal ini terjadi dikarenakan masih belum jelasnya regulasi untuk mengatur pengelolaan anggaran termasuk penyeteroran besaran deviden untuk kas negara dan regulasi mengenai jumlah laba yang ditahan. Dengan demikian penyertaan modal negara dirasakan masih sebatas menghambur-hamburkan uang negara dan rentan terjadi penyalahgunaan.

Permasalahan lain terkait PMN kepada BUMN dan timbal balik BUMN melalui dividen juga mengenai pembayaran dan penyeteroran, perencanaan dan penggunaan serta pengawasan dan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan belum adanya indikator yang jelas mengenai kondisi BUMN. Apakah kebijakan restrukturisasi tepat dilakukan kepada suatu BUMN dan tidak kepada yang lain?

⁹ Bos, Dieter. "Earmarked taxation: Welfare Versus Political Support". *Journal of Public Economics* 75. Department of Economics. University of Bonn, Germany. 2000.

Bagaimana karakteristik atau persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu BUMN layak diberikan PMN atau tidak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah membentuk satu sistem untuk memantau kinerja dan kondisi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama sektor finansial. Sistem peringatan dini, *Early Warning System* (EWS), dirilis menjelang akhir tahun 2014. Sistem EWS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi kinerja BUMN. Informasi ini pada nantinya akan berguna bagi pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan terkait pengelolaan BUMN dan pelaporan investasi pemerintah.¹⁰

EWS tersebut akan memberikan informasi terkait kondisi kinerja suatu BUMN melalui 13 indikator rasio keuangan yang berasal dari enam pengukuran kinerja utama. Keenam alat ukur itu adalah likuiditas, pengelolaan aset/modal, pemenuhan kewajiban, profitabilitas, arus kas, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya, EWS akan memberikan informasi terkait kondisi suatu BUMN dari empat kriteria, yaitu sangat bagus, bagus, cukup bagus, dan tidak bagus. Pemerintah memiliki tujuan yang baik bagi BUMN melalui sistem ini karena dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pencegahan terhadap BUMN yang bermasalah. jika ditemukan suatu BUMN berada dalam kondisi rawan, maka DJKN akan memperingatkan perseroan melalui Kementerian BUMN.

Kebijakan alokasi PMN pada tahun 2015 yang meningkat sangat drastis karena adanya program prioritas Nawa Cita dimana infrastruktur menjadi lokomotif, perlu dikaji dan dianalisa lebih jauh. Lokus dan fokus pembangunan yang akan dilakukan pemerintah tidak cukup mengandalkan pada penyediaan infrastruktur fisik tetapi perlu dilengkapi dengan suprastruktur yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut. Suprastruktur yang perlu dibangun adalah: *knowledge networks*, komunikasi, pendidikan, dan budaya.¹¹

Pendekatan fungsional pada infrastruktur bagi agen ekonomi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menciptakan *social*

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54adfed367818/djkn-siapkan-peringatan-dini-bumn>, diakses pada tanggal 1 September 2015 pk.13.30 wib.

¹¹ Fadel Muhammad, "APBNP 2015 Belum Pro Rakyat", Bahan kerja yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, 2015. <http://infid.org/pdfdo/1425391298.pdf>.

product untuk masyarakat pada sebuah negara. Kontribusi agen ekonomi itu tergantung seberapa besar kemampuan mereka mengakses infrastruktur yang ada.

Infrastruktur kelembagaan yang dihasilkan oleh negara berupa peraturan perundangan yang memfasilitasi, mengatur, menjamin fungsi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat berlangsung adil, harmonis, dan sinergis. Namun, rendahnya akumulasi *human capital* dan *physical capital* menjadikan modal yang tersedia tidak digunakan secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pembangunan Infrastruktur harus memihak pada *pro-poor growth*

Dengan demikian PMN yang diberikan kepada BUMN dalam rangka penguatan Infrastruktur yang ada harus bisa diakses oleh semua agar terjadi perluasan kegiatan ekonomi sehingga semua sektor bisa tumbuh. Infrastruktur harus diatur penggunaannya sehingga mampu mengurangi biaya produksi dan transaksi, meningkatkan investasi swasta, dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri.

V. PENUTUP

Peningkatan kemandirian bangsa dalam mengupayakan sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri harus ditingkatkan. Guna memperkuat ketahanan fiskal untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan bagian negara dari laba BUMN, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga memerlukan penegasan arah dan jangkauan pengaturan bagi penetapan besaran dividen, penyeteroran, pengelolaan dan pemeriksaan dividen BUMN.

Pemberian PMN kepada BUMN harus dapat merestrukturisasi BUMN dan mendukung program prioritas sehingga memiliki kemampuan dalam menghadapi dinamika global dan nasional dan menjamin peningkatan nilai dividen bagi penerimaan Negara. Dengan demikian PMN bagi BUMN menjadi bagian dari upaya membangun fundamental ekonomi yang kokoh dan bukan sekedar membagi jatah kekuasaan bagi pemerintahan yang sedang berjalan.

Kebijakan penyertaan modal Negara kepada BUMN hendaknya dilakukan secara cermat dan tepat dengan memperhatikan kapan dan alasan pelaksanaan serta kriteria yang jelas mengenai BUMN yang dapat diberikan PMN dan mana yang tidak. Kebijakan pemberian PMN kepada BUMN juga harus diiringi dengan tuntutan untuk menaikkan nilai dividen BUMN dengan mempertimbangkan manfaatnya terhadap kemakmuran rakyat melalui penyediaan layanan publik.

Pemberian PMN sejauh ini belum diikuti dengan tuntutan perbaikan dan perluasan cakupan BUMN bagi peningkatan perekonomian. PMN belum secara langsung mengintegrasikan peningkatan penerimaan Negara melalui peningkatan share laba BUMN sehingga perannya bagi peningkatan sektor keuangan masih perlu dipertajam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- BAPPENAS, *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*, (http://www.bappenas.go.id/files/1613/7890/3140/Buku-Evaluasi-Paruh-Waktu-RPJMN_Bappenas.pdf). Diakses 19 Juni 2014.
- Bos, Dieter. "Earmarked taxation: Welfare Versus Political Support". *Journal of Public Economics*. 75. Department of Economics. University of Bonn, Germany. 2000.
- Buchanan, James M. (1963). "The Economics of Earmarked Taxes". *The Journal of Political Economy*. Vol. 71 Nomor 5 (Oct., 1963). The University of Chicago Press. Goetz.
- Nijkamp, "Entrepreneurship in Modern Network Economy", *Journal of Regional Studies*, 2000, hal 395-405.

Artikel Dalam Jurnal, Working Paper, Majalah, Makalah, Surat Kabar dan Website:

- <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/13/357931/perdebatan-pmn-ke-bumn-harus-pertimbangkan-3-aspek>, diakses 1 Agustus 2015 pk.09.25 wib.
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20RAPBNP%202015.pdf> diakses 3 Agustus 2015 pk. 11.05 wib.
- <http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN>, diakses 1 Agustus 2015 pk.09.05 wib.
- Didit Sidarta, Penyertaan Modal Negara ke BUMN perlu Regulasi Jelas, <http://geotimes.co.id/penyertaan-modal-negara-ke-bumn-perlu-regulasi-jelas/>, diakses tanggal 28 Mei 2015 pk. 08.45.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54adfcd367818/djkn-siapkan-peringatan-dini-bumn>, diakses pada tanggal 1 September 2015 pk.13.30 wib.

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpprf%5CEvaluasi_Risiko_Fiskal_Atas_Kebijakan_Public_Service_Obligation_dan_Penyertaan_Modal_Negara.pdf.

Dokumen Negara:

Naskah Akademik dan APBN Tahun 2010.

Naskah Akademik dan APBN Tahun 2011.

Naskah Akademik dan APBN Tahun 2012.

Naskah Akademik dan APBN Tahun 2013.

Naskah Akademik dan APBN Tahun 2014.

Naskah Akademik dan APBN-P Tahun 2015.

Renstra BUMN 2012-2014.

RPJMN 2010-2014.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.

TULISAN KEEMPAT

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL**

*oleh: Nidya Waras Sayekti**

* Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL

I. PENDAHULUAN

Sudah hampir tiga dekade industri keuangan syariah hadir di Indonesia. Aliansi strategis dinilai sebagai sesuatu yang mutlak demi membangun industri keuangan syariah yang dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui perbankan syariah.¹ Industri perbankan syariah apabila dijalankan dengan optimal dapat meningkatkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun demikian, para pelaku di industri ini harus mempunyai visi yang sama terlebih dahulu, agar bisa bersama-sama saling bahu membahu mengembangkan industri perbankan syariah ke arah yang lebih baik.²

Sejak krisis subprime mortgage pada 2008, telah banyak pihak yang melirik sistem keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, bursa komoditi syariah, dan bisnis syariah. Ekonomi syariah telah menjadi sistem yang baik untuk menjaga stabilitas keuangan karena melarang ketidakpastian dan spekulasi, serta mengutamakan berbagi risiko daripada mengalihkan risiko dan melarang *money for money*. Sistem keuangan syariah mengutamakan prinsip keadilan untuk mendorong keseimbangan dan terpenuhinya rasa keadilan yang pada akhirnya menciptakan stabilitas, serta merupakan sistem yang tepat untuk keuangan inklusif yang memperkuat stabilitas ekonomi nasional.³

¹ Yogie Respati, "Menkeu: Aliansi Strategis Bangun Keuangan Syariah Indonesia" (<http://mysharing.co/menkeu-aliansi-strategis-bangun-keuangan-syariah-indonesia/>, diakses 4 Mei 2015).

² Yudi Suharto, "Yuslam Fauzi: Perbankan Syariah Harus Mensejahterakan Masyarakat. (<http://mysharing.co/yuslam-fauzi-perbankan-syariah-harus-mensejahterakan-masyarakat/>, diakses 4 Mei 2015).

³ Yogie, Op.Cit.

Berdasarkan *Global Islamic Finance Report (GIFR)*, keuangan syariah Indonesia menempati peringkat tiga dunia dengan total asset ada di peringkat sembilan sebesar USD35,63 miliar atau 2,1 persen pangsa pasar dunia. Sementara, berdasarkan laporan Ernst and Young 2013-2014, keuangan syariah Indonesia disebut sebagai industri yang tumbuh pesat. Walaupun pangsa keuangan syariah masih di bawah 10 persen, Indonesia memiliki kapasitas intelektual yang dapat membawa industri keuangan syariah ke tahap lebih baik dan maju.⁴

Menurut Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adiwarman A. Karim, sistem keuangan syariah yang berlaku di Indonesia adalah jenis *Islamic Retail Banking*. Berbeda dengan Malaysia yang menerapkan jenis *Islamic Corporate Banking*, dimana mayoritas dana perbankan syariahnya berasal dari pemerintah sehingga *cost of fund*-nya bisa lebih murah. Sedangkan negara Timur Tengah menerapkan jenis *Islamic Investment Banking*, dimana nasabahnya mayoritas orang kaya yang tidak memerlukan pembiayaan sehingga dana bank diinvestasikan di bursa komoditi. Oleh karena itu, kesuksesan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa diukur dengan pangsa pasarnya karena tidak *apple to apple*. Alat ukur yang dapat digunakan adalah jumlah nasabah yang dilayani dan kantor cabang yang melayani.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dibahas mengenai peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan beberapa fokus permasalahan yaitu bagaimana perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil? serta apa saja kendala dan masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi?

II. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Bank syariah pertama diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi Sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid

⁴ Yogie, Op.Cit.

⁵ Sri Sugiarti, "Indonesia Bank Syariah Retail Terbesar di Dunia" (<http://mysharing.co/indonesia-bank-syariah-retail-terbesar-di-dunia/>, diakses 4 Mei 2015).

an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) dua tahun kemudian dan diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

- 1980 : Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti.
- 1990 : Lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia.
- 1992 : Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.
- 1998 : Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.
- 1999 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan, yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- 2001 : Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah.
- 2004 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip syariah.
- 2008 : Pada tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah.

⁶ Ibid, hal. 72.

Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁷ Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang yang sama, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian dalam angka 3, menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mengenai prinsip syariah, dijelaskan dalam angka 13 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang **Bank Syariah** dan **Unit Usaha Syariah**, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 11

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Banksyariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.⁹

III. PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah

⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 61-62.

⁹ Ibid, hal. 72.

tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Apabila penghimpunan dana mempergunakan prinsip mudharabah, maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasil. Prinsip mudharabah diaplikasikan dalam kegiatan produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Sebaliknya, pemilik dana wadiah pada prinsipnya tidak mendapat imbalan kecuali pihak bank memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan bank tersebut dan tidak diperjanjikan sebelumnya. Prinsip wadiah dalam perbankan diaplikasikan untuk produk tabungan wadiah dan giro wadiah.

Sesuai prinsip syariah, pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:¹⁰

- a. Prinsip jual beli dengan kategori murabahah, salam, dan istishna;
 - 1) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
 - 2) *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel.
 - 3) *Istishna*, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual.
- b. Prinsip bagi hasil dengan kategori mudharabah dan musyarakah;
 - 1) *Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.
 - 2) *Musyarakah*, adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

¹⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 159-297.

- 11 "Lembaga Keuangan Mikro Syariah" (http://www.tamzls.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30, diakses 26 Mei 2015).
- 12 "Pentingnya Menggerakkan Ekonomi Sektor Riil" (http://www.makassarprereneur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:pentingnya-menggerakkan-ekonomi-sektor-riil&catid=28:seputar-ukm&Itemid=69, diakses 26 Mei 2015).

Dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor, yaitu sektor riil dan sektor keuangan. Sektor riil dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa.¹¹ Pemici krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda perekonomian dalam negeri maupun luar negeri adalah karena kegiatan di sektor nonriil atau moneter yang berdampak timbulnya permasalahan di sektor riil. Harga-harga barang dan jasa naik bukan karena hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*), namun karena suku bunga perbankan naik dan uang banyak beredar di pasar barang dan jasa (masyarakat).¹² Saat itu, pergerakan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor finansial. Begitu juga di tingkat global, sektor finansial mengalami revolusi yang luar biasa, dengan munculnya berbagai instrumen investasi yang makin rumit. Di tengah kolapsnya sektor riil, pesatnya

IV. EKONOMI SEKTOR RIIL

- memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c. Prinsip *Ujroh* atau upah dengan kategori *Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bittamlik*, dan *Ijarah Berlanjut* (multi-jasa).
- 1) *Ijarah* (sewa menyewa), adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - 2) *Ijarah Muntahia Bittamlik*, adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.
 - 3) *Ijarah Berlanjut*, adalah penggunaan manfaat aset tidak berwujud dengan akad ijarah atau sewa disewakan kembali.

sektor finansial bisa memunculkan “ekonomi balon”. Secara empirik Indonesia didominasi oleh pasar uang, bursa saham, perbankan yang dipengaruhi oleh pasar global. Pertumbuhan sektor keuangan melebihi pertumbuhan perdagangan di sektor riil. Hal tersebut berakibat adanya ketidakseimbangan ekonomi, terutama pasar uang dan pasar saham (yang bersifat non-riil) dengan pasar barang atau jasa (yang bersifat riil).¹³

Seharusnya yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pergerakan ekonomi sektor riil berupa pertanian, perikanan/kelautan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pariwisata serta usaha sektor jasa dan sebagainya. Kebijakan ekonomi yang diterapkan seharusnya berbasis riil karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (pertanian, dan perikanan/kelautan), sumber daya ekonomi (perdagangan dan industri) dan sumber daya manusia (bonus demografi).

Oleh karena itu, ekonomi Islam memiliki prinsip bahwa sistem moneter (*money*) sebagai *public goods* dan *flow concept*. Uang adalah milik masyarakat sehingga tidak boleh ada penimbunan uang karena akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat. Fungsi uang dalam Islam sebagai alat tukar saja, maka ekonomi digerakkan ke sektor riil.¹⁴

Dengan fungsi uang seperti ini dipastikan uang yang beredar akan bertemu dengan barang dan jasa, bukan sesama uang seperti terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem kapitalis, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya akan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua pertumbuhan itu berlangsung secara optimis tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi balon (*bubble economic growth*) yang semu atau tidak riil.¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

V. KINERJA PERBANKAN SYARIAH DALAM Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan perbankan syariah telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional.¹⁶

Peran dan fungsi perbankan syariah dalam sistem keuangan sangat diharapkan, karena pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan bahwa aktivitas lembaga keuangan telah berkembang terlalu jauh sehingga tidak terkait secara langsung dengan perkembangan sektor riil maupun aktivitas produksi barang dan jasa. Secara konsep, ekonomi dan keuangan syariah berbasis kepada transaksi riil yang tidak melakukan praktik spekulasi dan tidak mengabaikan fundamental ekonomi dan keuangan yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan *bubble* dalam ekonomi dan sistem keuangan. Sistem ekonomi dan keuangan syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh berbagai pihak.¹⁷

Hal tersebut dikarenakan salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset and production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai ide utamanya. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musharakah* adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu, maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara

¹⁶ Yuli Andriansyah, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia & Kontribusi bagi Pembangunan Nasional", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III No. 2 Desember 2009, hal.181-196 (<http://mpr.ub.uni-muenchen.de/58409/2/la-riba-vol3-no2-2009-05-andriansyah.pdf>, diakses 26 Mei 2015).

¹⁷ "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 (LPKS)"(<http://www.ojk.go.id/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013-lpks>, diakses 26 Mei 2015).

seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.¹⁸

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp268,270 miliar dengan pangsa pasar masih di bawah 5 persen dari perbankan nasional. Pada 2014, pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan yang disebabkan antara lain kondisi perekonomian, adanya proses konsolidasi internal, kendala dari faktor internal perbankan syariah lainnya seperti kapasitas sumber daya manusia, jaringan kantor dan infrastruktur lain. Berikut perkembangan kinerja perbankan syariah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 secara umum (Tabel 1):

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah

(Rp Miliar)

Keterangan	Tahun		
	2012	2013	2014
Jumlah Bank	193	197	197
BUS	11	11	12
UUS	24	23	22
BPRS	158	163	163
Jumlah kantor	2,663	2,990	2,939
BUS	1,745	1,998	2,147
UUS	517	590	354
BPRS	401	402	438
Jumlah SDM	31,578	42,591	49,411
Total Aset (Rp M)	199,717	248,110	268,270
Pertumbuhan Aset	34.0%	24.2%	12.3%
Total Pembiayaan (Rp M)	151,059	188,555	203,356
Pertumbuhan Pembiayaan	43.4%	24.8%	9.8%

¹⁸ Ali Rama, "Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (<http://www.forumriset.com/assets/media/file/ANALISIS%20KONTRIBUSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20TERHADAP%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI%20INDONESIA.pdf>), diakses 30 September 2015).

Total DPK (Rp M)	150,450	187,200	213,497
Pertumbuhan DPK	28.0%	24.4%	18.7%
Jumlah Rek DPK	10.847.862	12.742.187	13.909.509
Jumlah Rek Pembiayaan	2.512.295	3.479.979	3.758.798

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 hanya tumbuh 4,71 persen. Pertumbuhan itu melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Kondisi itu juga terasa di tengah masyarakat, seperti penjualan otomotif menurun dan pedagang produk elektronik atau garmen mengaku terjadi penurunan omzet 20-30 persen sejak awal 2015 dibandingkan tahun 2014. Kelesuan ekonomi yang ditunjukkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 tak bisa berlangsung berlarut-larut.¹⁹

Pertumbuhan ekonomi harus terus dipacu dengan berbagai langkah dan kebijakan strategis dan memacu berbagai gerbong ekonomi, termasuk pergerakan sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, termasuk industri pengolahan berbasis bahan baku primer. Sektor-sektor tersebut telah memberikan kontribusi 13,75 persen dalam produk domestik bruto triwulan I-2015. Sektor-sektor tersebut menjadi rangkaian gerbong yang harus ditarik dengan lokomotif yang penuh tenaga dan berkecepatan tinggi. Pemerintah sebagai penggerak lokomotif harus berperan dengan berbagai kebijakan, seperti insentif serta menjamin kepastian dan kemudahan dunia usaha. Tanpa itu, termasuk pembiayaan perbankan, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 5,7 persen tak mungkin dapat tercapai.²⁰

Dalam rangka berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan pada 2014 sebesar Rp204,334 miliar dengan komposisi penggunaan untuk modal kerja sebesar Rp80,283 miliar (39,29 persen), investasi sebesar Rp42,661 miliar (20,85 persen), dan konsumsi sebesar Rp81,440 miliar (39,86 persen). Penggunaan pembiayaan tersebut masih didominasi untuk modal kerja dan konsumtif. Sedangkan

¹⁹ Yogie, Op.Cit.

²⁰ Yogie, Op.Cit.

apabila dilihat berdasarkan sektor ekonomi (Tabel 2), pangsa terbesar pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah adalah sektor ekonomi jasa dunia usaha yaitu sebesar 33 persen.²¹

Tabel 2. Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi
(Rp Miliar)

Sektor Ekonomi	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian	3.160	3.554	6.005
Pertambangan	2.102	3.024	4.604
Perindustrian	5.039	6.069	13.353
Listrik, Gas, dan Air	3.163	4.670	5.501
Konstruksi	7.267	8.243	11.906
Perdagangan, Restoran, Hotel	13.846	15.758	25.862
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4.388	5.458	12.275
Jasa Dunia Usaha	37.415	47.937	67.302
Jasa Sosial/Masyarakat	8.105	12.450	11.480
Lain-lain	66.571	81.393	46.046
Total	151.056	188.566	204.334

Sumber: Data Diolah, Bank Indonesia, 2015.

Sektor jasa dunia usaha merupakan perusahaan yang menyediakan layanan bisnis yang berhubungan dengan sesama perusahaan. Perusahaan di industri ini menawarkan berbagai layanan, termasuk pemasaran dan periklanan, konsultasi, jasa hukum, logistik dan pengiriman, sumber daya manusia, kepegawaian, leasing, keamanan, *outsourcing*, dan manajemen fasilitas. Sektor jasa dunia usaha memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi riil di Indonesia dan perbankan syariah merupakan salah satu alternatif atas keterbatasan dana pengusaha sektor jasa dunia usaha.²²

²¹ "Statistik Perbankan Syariah Maret 2015" (http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0315.aspx, diakses 19 Mei 2015).

²² Muhammad Fakhri Nugraha, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Jasa Dunia Usaha di Indonesia" (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/72782/H14mfn.pdf?sequence=1>, diakses 26 Mei 2015).

Penelitian Ali Rama tentang hubungan perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2002 sampai 2010 dengan menggunakan uji kointegrasi dan *Vector Error Model* (VECM), menghasilkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara sektor perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara hasil uji kausalitas Granger menunjukkan *finance-led growth* pada model pertama dan *bidirectional causality* pada model kedua, artinya bahwa pembiayaan dan deposit pada perbankan syariah berperan secara signifikan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan sektor riil. Perbankan syariah telah menjadi perbankan yang efektif menghubungkan dan mentransfer sumber-sumber keuangan pada sektor produktif khususnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memang selama ini menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah dan akhirnya berhasil menggerakkan sektor ekonomi riil di Indonesia.²³

VI. KENDALA DAN MASALAH YANG DIHADAPI PERBANKAN SYARIAH

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di keuangan syariah global. Letak geografis yang strategis, populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, ekonomi yang terdiversifikasi dan cukup kuat, negara demokratis yang sudah matang, serta jumlah proyek infrastruktur yang dapat dibiayai merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan bisnis syariah di tanah air.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Panlak) Setjen DPR RI dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) tanggal 10 Februari 2015, disampaikan bahwa keuangan syariah dapat memegang peran penting dalam Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui dana-dana dari negara Timur Tengah. Namun, industri ini membutuhkan penanganan sistematis untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu: *Masterplan*, Regulasi, Inovasi Struktur Syariah, Instrumen Likuiditas, Instrumen Lindung Nilai, Industri Pendukung, dan Sukuk.

²³ Ali, Op.Cit.

Beberapa masalah struktural di sisi pendanaan dan pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah juga disampaikan Asbisindo. Permasalahan di sisi pendanaan antara lain, adalah: a) dana syariah lebih mahal dari konvensional, dikarenakan 64 persen dana pihak ketiga-nya (DPK) berasal dari deposito. Komposisi giro jauh lebih sedikit dibandingkan konvensional, dan rate tabungan jauh lebih tinggi 140 basis poin (bps) dari konvensional; dan b) Terbatasnya dana valas, perbankan syariah hanya memiliki dana valas 6 persen sedangkan konvensional mencapai 16 persen. Hal ini membuat semakin sulitnya perbankan syariah menggarap nasabah korporasi. Rate giro lebih rendah karena perbankan syariah kesulitan untuk mengelola dana dalam jumlah besar yang cukup *volatile*, dan rate deposito lebih rendah karena hanya mencerminkan *counter rate* sedangkan bonus spesial mudharabah dilaporkan sebagai "pengeluaran operasional".

Sedangkan di sisi pembiayaan, masalah struktural yang dihadapi perbankan syariah antara lain, yaitu: a) perbankan syariah umumnya menyalurkan dana kepada ritel dan UMKM yang marginnya lebih besar dan tenornya lebih pendek karena dananya berasal dari dana mahal (tidak adanya produk *revolving* mempercepat *rundown* portofolio pembiayaan di syariah); b) Rate pembiayaan untuk modal kerja dan investasi lebih tinggi 540 dan 300 bps dari konvensional, maka akan sulit dan beresiko untuk menggarap nasabah komersial dan korporasi. Kemungkinan besar nasabahnya adalah nasabah gagal dari perbankan konvensional; c) Pembiayaan dalam valuta asing terbatas dan rate pembiayaan lebih rendah dikonsumsi karena bisnis Kredit Tanpa Agunan dan Kartu Kredit di syariah sangat kecil sekali.

Secara keseluruhan, indikator keuangan syariah lebih buruk karena kesulitan untuk mendapatkan dana dari pasar modal (untuk menjaga *capital adequacy ratio* yang lebih rendah), terbatasnya produk *fee based income* sehingga banyak tergantung dari pembiayaan untuk mendapatkan pendapatan (*return on asset* yang jauh lebih rendah) dan produktifitasnya yang lebih rendah (karena pembukaan cabang, terbatasnya produk dan pembiayaan dengan *ticket size* kecil) - menjadikan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang lebih tinggi.

Loan to deposit ratio (LDR) relatif lebih tinggi dikarenakan antara lain; a) instrumen likuiditas terbatas; b) pembatasan untuk mempertahankan setidaknya *financing deposit ratio* (FDR) sebesar 80 persen sehingga kelebihan dana kas dapat ditempatkan ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); c) tidak ada pembatasan untuk UUS yang FDR-nya melampaui 100 persen. Sedangkan *non performing loan* (NPL) terus memburuk disebabkan: a) margin yang tipis sehingga jika ada kenaikan rate BI, dan bank syariah akan membebankannya ke nasabah, b) banyak memberikan pembiayaan yang berisiko terutama di komersial; dan c) pada awal pertumbuhan perbankan syariah, umur portofolio masih pendek dan pembiayaan terus tumbuh pesat (masalah akan terlihat sewaktu umur portofolio lebih dari 5 tahun dan pertumbuhan mulai melambat).

BUS yang saat ini berjumlah 12 bank pada umumnya masih kecil dengan *network* yang terbatas. BUS memiliki *cost of fund* yang lebih mahal dikarenakan BUS mau tidak mau harus menawarkan rate yang lebih tinggi dari Bank Umum Konvensional (BUK) kepada nasabah. Terbatasnya institusi keuangan/instrumen investasi yang memang memerlukan Obligasi Syariah (seperti Takaful, Multifinance Syariah, Reksadana Syariah, dsb), BUS terpaksa harus mengharapakan investor konvensional untuk menyerap Obligasi Syariah yang dikeluarkannya dengan kecenderungan investor tersebut akan meminta premium/rate yang lebih tinggi. Melalui opsi ini, BUS hanya akan mendapatkan dana mahal dari pasar modal. Biaya yang mahal untuk melakukan ekspansi (modal yang harus disisihkan untuk pembukaan cabang dan investasi sumber daya manusia dan teknologi) membuat biaya operasional BUS lebih tinggi. Terbatasnya atau tidak likuidnya instrumen likuiditas syariah dan tidak adanya instrumen lindung nilai syariah membuat BUS lebih tidak efisien dalam mengelola likuiditas dan eksposur pasar. Terbatasnya produk-produk (terutama *product revolving* seperti *overdraft* dan *fee based*) dan SDM di BUS yang memahami pembiayaan korporasi semakin membuat BUS tidak bisa bersaing dengan BUK.

Permasalahan yang dihadapi industri perbankan syariah tidak hanya sampai disitu. Pemerintah saat ini juga mendorong industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah, untuk membiayai infrastruktur agar dapat lebih berperan secara nyata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Namun

yang menjadi hambatan perbankan syariah adalah skala modal yang dimiliki masih kecil, sedangkan pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar.²⁴

Ada tiga pilar utama yang harus diubah agar perbankan syariah mampu membiayai infrastruktur, yaitu: *Pertama*, kecukupan likuiditas perbankan syariah. Likuiditas perbankan syariah tidak akan mencukupi untuk membiayai infrastruktur karena rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga sudah mendekati 100 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, dana sukuk yang diserap oleh pemerintah dari perbankan syariah ditempatkan kembali ke bank syariah dan bank syariah menerbitkan sukuk yang dananya digunakan untuk membeli sukuk haji. *Kedua*, batas maksimum pemberian pembiayaan karena modal bank syariah yang masih kecil. Hal tersebut dapat diatasi dengan solusi OJK membuat sebuah regulasi tentang dana haji yang ditempatkan di bank syariah sebagai deposito diakui sebagai Tier II dari modal dikarenakan dana tersebut mengendap dalam jangka waktu panjang sehingga menjadi quasi *equity* yang membuatnya seperti modal. Selain itu, bank syariah dapat menerbitkan sukuk subordinasi karena 50 persennya dapat diakui sebagai modal berdasarkan Peraturan OJK. *Ketiga*, mengembangkan produk yang *structured financing*, dimana dalam produk itu terdapat sebagian berupa sukuk. Pembiayaan infrastruktur dikombinasikan antara sukuk dan dana pihak ketiga bank sehingga dana bisa berputar.²⁵

Namun demikian, menurut Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Mulya E Siregar, penerapan dana haji di bank syariah diakui sebagai Tier II akan terbentur dengan Ketentuan Basel (sistem kerangka permodalan untuk mengukur risiko kredit dengan mensyaratkan standard modal minimum) yang mengharuskan modal Tier II di perbankan di-*pasing out* sampai tahun 2022. Apabila tetap ada berarti rasio kecukupan modal akan terjadi *over statement* (lebih tinggi dari pada seharusnya). Saat ini, sedang dilakukan penaksiran sesuai ketentuan Basel di Indonesia, yaitu berupa *regulatory consistent assessment program* yang salah satu *point*-nya modal perbankan tidak boleh lagi ada yang di Tier II

²⁴ Yogie, Op.Cit.

²⁵ Yogie, Op.Cit.

hanya di Tier I. Jika perbankan Indonesia tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka perbankan di Indonesia akan masuk kategori *non-compliance*. Artinya, belum sesuai sepenuhnya dengan regulasi internasional.²⁶

Apabila dilihat dari sisi pembiayaan di sektor riil, bank syariah harus memiliki *reference rate* tersendiri berdasar pada dinamika bisnis sektor riil (tidak mengacu pada suku bunga BI/BI rate). Misalnya, sektor pertanian memiliki imbal hasil paling tinggi tapi risikonya juga paling tinggi, sedangkan sektor usaha lainnya bisa saja memberikan imbal hasil tinggi, namun risikonya relatif lebih rendah dibanding pertanian. Maka, margin antara satu sektor usaha dengan yang lain pun dapat berbeda. Saat ini, perbankan syariah masih mengikuti perbankan konvensional, kedepannya diharapkan perbankan syariah memiliki perhitungan margin sendiri yang disesuaikan dengan sektor riil dan permintaan pasar, sehingga suku bunga bank konvensional hanya berperan sebagai pembanding, bukan penentu besaran margin.²⁷

Dalam prakteknya di lapangan, masih banyak bank syariah yang lebih condong menawarkan atau bahkan mengarahkan nasabah kepada produk dengan akad *murabahah* dalam setiap transaksi pembiayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa akad *murabahah* memiliki kelebihan yaitu; lembaga keuangan syariah langsung dapat menghitung keuntungan yang didapat dari akad *murabahah* tersebut. Dengan akad *murabahah* lembaga keuangan syariah dapat menjaga nilai uang yang dikeluarkan sama nilainya pada saat pengembalian beberapa tahun ke depan. Produk dengan akad *murabahah* ini dalam pengambilan keuntungan menggunakan rumus yang sama dengan lembaga keuangan konvensional. Karena itu produk pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi produk unggulan di beberapa lembaga keuangan syariah, karena memiliki kepastian keuntungan.²⁸

²⁶ Yogie, Op.Cit.

²⁷ Yogie Respati, "Bank Syariah Perlu Reference Rate Berbasis Sektor Riil" (<http://keuangansyariah.mysharing.co/bank-syariah-perlu-reference-rate-berbasis-sektor-riil/>, diakses 30 September 2015).

²⁸ Fatikul Himami, "Peran Lembaga Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" (<http://fish.uinsby.ac.id/?p=2657>, diakses 7 Mei 2015).

VII. PENUTUP

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Peran dan fungsi perbankan syariah sangat diharapkan dalam sistem keuangan, karena pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan bahwa aktivitas lembaga keuangan telah berkembang terlalu jauh sehingga tidak terkait secara langsung dengan perkembangan sektor riil. Sedangkan ekonomi syariah, secara konsep berbasis kepada transaksi riil yang tidak melakukan praktik spekulasi. Sistem ekonomi syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Dalam rangka berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp204,334 miliar pada akhir 2014. Komposisi penggunaan pembiayaan tersebut masih didominasi untuk konsumtif dan modal kerja. Apabila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, pangsa terbesar pembiayaan perbankan syariah adalah jasa dunia usaha yaitu sebesar 33 persen.

Perbankan syariah hendaknya terus didorong untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil dengan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan ke sektor moneter. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada sektor riil akan memberikan manfaat dan *multiplier effect* bagi usaha kecil menengah ke atas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja, dan laju ekonomi.²⁹

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu peran dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah negara lain yang kemungkinan akan masuk ke Indonesia dalam rangka pasar global. Dukungan pemerintah tersebut dapat berupa insentif pajak, penyaluran dana APBN dan BUMN, atau pengelolaan dana setoran BPIH yang dapat meningkatkan modal perbankan syariah, serta kebijakan lainnya yang dapat menstimulus pertumbuhan perbankan syariah Indonesia.

²⁹ Yuli, Op.Cit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Artikel dalam jurnal, *working paper*, majalah, dan surat kabar

- Andriansyah, Yuli. "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia & Kontribusi bagi Pembangunan Nasional", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III No. 2 Desember 2009, (<http://mpr.ub.uni-muenchen.de/58409/2/la-riba-vol3-no2-2009-05-andriansyah.pdf>, diakses 26 Mei 2015).
- Himami, Fatikul. "Peran Lembaga Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", (<http://fish.uinsby.ac.id/?p=2657>, diakses 7 Mei 2015).
- Nugraha, Muhammad Fakhri. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Jasa Dunia Usaha di Indonesia", (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/72782/H14mfn.pdf?sequence=1>, diakses 26 Mei 2015).
- Rama, Ali. "Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", (<http://www.forumriset.com/assets/media/file/ANALISIS%20KONTRIBUSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20TERHADAP%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI%20INDONESIA.pdf>, diakses 30 September 2015).

- Respati, Yogie. "Menkeu: Aliansi Strategis Bangun Keuangan Syariah Indonesia", (<http://mysharing.co/menkeu-aliansi-strategis-bangun-keuangan-syariah-indonesia/>, diakses 4 Mei 2015).
- Respati, Yogie. "Bank Syariah Perlu Reference Rate Berbasis Sektor Riil", (<http://keuangansyariah.mysharing.co/bank-syariah-perlu-reference-rate-berbasis-sektor-riil/>, diakses 30 September 2015).
- Sugiarti, Sri. "Indonesia Bank Syariah Retail Terbesar di Dunia", (<http://mysharing.co/indonesia-bank-syariah-retail-terbesar-di-dunia/>, diakses 4 Mei 2015).
- Suharso, Yudi dan Yuslam Fauzi, "Perbankan Syariah Harus Mensejahterakan Masyarakat", (<http://mysharing.co/yuslam-fauzi-perbankan-syariah-harus-mensejahterakan-masyarakat/>, diakses 4 Mei 2015).
- "Lembaga Keuangan Mikro Syariah". (http://www.tamzis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30, diakses 26 Mei 2015).
- "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 (LPKS)". (<http://www.ojk.go.id/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013-lpks>, diakses 26 Mei 2015).
- "Pentingnya Menggerakkan Ekonomi Sektor Riil". (http://www.makassarpreneur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:pentingnya-menggerakkan-ekonomi-sektor-riil&catid=28:seputar-ukm&Itemid=69, diakses 26 Mei 2015).
- "Statistik Perbankan Syariah Maret 2015". (http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0315.aspx, diakses 19 Mei 2015).

Dokumen

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

TULISAN KELIMA

**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT
PEREKONOMIAN NASIONAL**

*oleh: Lisnawati**

* Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT PEREKONOMIAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN

Sentralisasi ataupun desentralisasi merupakan suatu sistem administrasi suatu pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.

Pada masa sebelum kemerdekaan, penjajah telah menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk kepentingan mereka. Penjajah Belanda telah menyusun suatu hierarki yang mengharuskan tunduk kepada Gubernur Jenderal. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada tahun 1903, yang ditindaklanjuti dengan *Bestuurs hervorming Wet* pada tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang di kuasai Belanda menjadi *gewest* (identik dengan provinsi), *regentschap* (kabupaten) dan *staatsgemeente* (kodamadya). Setelah kependudukan Belanda, Jepang melanjutkan sistem pemerintahan daerah seperti zaman Belanda, hanya dengan melakukan perubahan ke dalam bahasa Jepang.

Pada masa pemerintahan kolonial terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang merupakan wakil pemerintah Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan. Salah satu warisan pemerintah kolonial yang kemudian dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat.

Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku

silih berganti. Ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih cocok dan memenuhi harapan serta sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi pun bergoyang-goyang mengikuti konfigurasi kekuasaan saat itu.

Krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998 yang direspon menjadi tuntutan reformasi secara besar-besaran berimbas pula kepada tuntutan daerah untuk dapat lebih leluasa mengatur dirinya sendiri. Tuntutan pemberian otonomi secara luas oleh daerah merupakan implikasi dari terlalu besarnya campur tangan pusat dalam mengontrol pembangunan di daerah (sentralisasi). Pemerintah pusat merespon hal tersebut melalui penerbitan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah telah mengeluarkan semangat untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri sehingga berimbas pada pemerataan pembangunan daerah yang diikuti adanya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Terbitnya kebijakan otonomi daerah dalam bentuk UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah suatu langkah maju dalam mendukung semangat desentralisasi. Akan tetapi, efektifitas kedua kebijakan tersebut masih perlu dilihat kembali. Pemerintah pusat harus bersungguh-sungguh menyiapkan berbagai kebijakan pendukung yang mempermudah daerah dalam mengimplementasikan hak otonominya. Dilain pihak, daerah harus melihat sumber daya yang dimilikinya secara lebih *fair*, sehingga mampu memetakan sejauh mana daerah bisa menggunakan hak otonominya untuk lebih meningkatkan kapasitas fiskal dan pembangunan daerah.

Adanya gap yang besar antara pusat dan daerah baik dari sisi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan kendala utama yang jika tidak segera diatasi berimplikasi pada gagalnya tujuan otonomi dari yang seharusnya. Perlu dilihat sejauh mana efektivitas implementasi otonomi daerah pasca dikeluarkannya UU otonomi daerah apakah terdapat kemajuan yang berarti, jalan ditempat, atau justru daerah semakin terpuruk dalam mengembangkan kapasitas fiskal dan pembangunannya.

Sejak tahun 1966, pemerintah orde baru (orba) telah membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik sebagai panglima telah digantikan oleh ekonomi sebagai panglima pembangunan. Mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Dalam konstelasi politik yang baru ini, militer telah menempati posisi yang paling atas dalam hierarki kekuasaan.

Kenyataan menunjukkan, pemerintah orba telah berhasil dalam melenyapkan *hiperinflasi* (inflasi baratus-ratus persen), mengubah modal yang hengkang ke luar negeri menjadi arus masuk modal swasta yang substansial, mengubah defisit cadangan devisa menjadi selalu positif, mempertahankan harga beras dan meningkatkan produksi beras hingga mencapai tingkat swasembada, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mampu menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Prestasi politik dan ekonomi yang mengesankan itu tak pelak ditopang oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat.

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Kerena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara dunia ketiga.¹

II. SISTEM KEUANGAN PUSAT-DAERAH

Undang-undang (UU) pertama yang mengatur hubungan fiskal (keuangan) pusat-daerah adalah UU No.32 tahun 1956. UU ini menetapkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut:²

¹ Kuncoro, Mudrajat. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga.

² Kristiadi J.B. 1991. *Peran aparatur Pemerintah Dalam Era Pembangunan*. Bandung: Sesimpol Lembang.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah meliputi pajak *verponding*, pajak *verponding* Indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra, dan pajak pembangunan I.
2. Sebagian dari hasil pemungutan pajak Negara tertentu, bea masuk, bea keluar, bea cukai, diserahkan kepada daerah. Pajak Negara tertentu adalah pajak perairan, pajak upah, pajak materi, pajak kekayaan, dan pajak perseroan.
3. Ganjaran, subsidi, dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu.

Bagi hasil pajak serta ganjaran dan bantuan yang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan UU No.32 tahun 1956 diganti dengan:³

1. Penyerahan tambahan 3 pajak Negara kepada daerah, yaitu: bea balik nama kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak bangsa asing. Dengan demikian daerah memungut 11 macam pajak.
2. Subsidi Daerah Otonom (SDO) diberikan sebagai ganti rugi dan bagi hasil pajak di atas. Pembagian SDO didasarkan pada perimbangan jumlah pegawai daerah otonom, dengan alasan penggunaan SDO diarahkan kepada gaji daerah otonom ditambah *acress* untuk belanja non pegawai, yang kemudian digunakan untuk subsidi biaya operasional serta ganjaran untuk Dati I, Dati II, dan Kecamatan.
3. Sebagai ganti ganjaran, subsidi dan bantuan diperkenalkan program Bantuan Inpres sejak tahun 1969.
4. Pinjaman kepada daerah dimulai dengan bantuan uang IPEDA (tahun 1969), bantuan Inpres Pasar (tahun 1976), dan pinjaman lain (tahun 1978).

Berpihak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah didasarkan atas 4 prinsip:

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekontentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.

³ Ibid.

3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Saat ini UU yang mengatur hubungan keuangan antara pusat dengan daerah pun diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: PAD, dana perimbangan; dan pendapatan lain-lain.

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah yang terjadi saat ini ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD), dan penerimaan lain-lain.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apa yang menyebabkan rendahnya PAD sehingga ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat cukup tinggi. Setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat. *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif dan *buoyant*, baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan (termasuk migas), Pajak Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua dikelola secara administratif dan ditentukan tarifnya oleh pusat.

Dua yang terakhir memang merupakan *sharing revenues* (pembagian hasil), namun kontribusinya dalam penerimaan daerah alternatif masih kecil. Alasan sentralisasi perpajakan yang sering dikemukakan adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman perpajakan.

Penyebab *ketiga* adalah kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Jenis pajak yang dapat dipungut daerah hanya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok untuk pajak provinsi. Untuk jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Faktor penyebab ketergantungan fiskal yang *keempat* bersifat politis. Ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Yugoslavia dan Uni Soviet sering ditunjuk sebagai contoh kuatnya. Pemda justru mendorong upaya memisahkan diri dari pusat dan menyebabkan negara tersebut cerai berai. Karena itu, sentralisasi diperlukan agar daerah tetap tergantung dengan pusat dan pada gilirannya bisa tetap dikendalikan oleh pusat. Barangkali ini suatu kekhawatiran yang berlebihan.

Faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok (*block grants*) dan spesifik (*specific grants*). Perbedaan utama antara subsidi blok dengan subsidi spesifik adalah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana subsidi blok, sedang penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak punya keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut. Tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa manajemen pembangunan daerah yang selama ini berjalan menunjukkan kecenderungan yang 'kurang serasi'.

Bila kondisi ketergantungan fiskal ini terus berlanjut, pembangunan daerah yang pesat akan berarti pula meningkatnya beban anggaran pusat. Masalahnya sekarang adalah setelah minyak

Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum

III.1. Kapasitas Fiskal Daerah

Harapan implementasi otonomi daerah selayaknya berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata antar daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk melihat hal tersebut perlu dilihat beberapa indikator keberhasilan implementasi otonomi di daerah diantaranya dilihat dari kapasitas fiskal daerah, perkembangan indeks pembangunan manusia, serta indeks pemerataan kapasitas fiskal antar daerah.

DAERAH

III. INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI OTONOMI

1. Hasil pajak Daerah
2. Hasil retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan Daerah
4. Hasil usaha Daerah yang sah
5. Hasil dinas Daerah

ini Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara:
Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

menganalisa corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Sebagai alat pengukur, penukur dan penabung, uang menduduki rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.

melaaksanakan otonominya. Ini berarti, penyelenggaraan urusan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata

melakukan sentralisasi semakin berkurang.
dan gas tidak dapat diharapkan lagi sebagai motor penggerak pembiayaan pembangunan, maka kemampuan negara untuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka penghitungan kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KF = \left[\frac{PAD + DAU + DBH + Otsus + Transferprovinsi + LP) - BP}{JumlahPendudukMiskin} \right]$$

dimana:

KF	= Kapasitas Fiskal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
Otsus	= Otonomi Khusus
Transferprovinsi	= Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota (bernilai positif untuk Kabupaten/Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
LP	= Pendapatan Daerah lain-lain
BP	= Belanja Pegawai.

Dari kapasitas fiskal tersebut selanjutnya kita mendapatkan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi dengan cara menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh daerah provinsi.

Berdasarkan indeks kapasitas fiskal, daerah dikelompokkan dalam empat kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:

- daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
- daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi;

- c. daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sedang; dan
- d. daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

Berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia indeks kapasitas fiskal untuk masing-masing provinsi dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 1. Peta Kapasitas Fiskal Provinsi

No	Nama Provinsi	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1,15	tinggi
2.	Sumatera Utara	0,37	rendah
3.	Sumatera Barat	0,49	rendah
4.	Riau	0,99	sedang
5.	Jambi	0,65	sedang
6.	Sumatera Selatan	0,34	rendah
7.	Bengkulu	0,37	rendah
8.	Lampung	0,24	rendah
9.	DKI Jakarta	8,69	sangat tinggi
10.	Jawa Barat	0,27	rendah
11.	Jawa Tengah	0,12	rendah
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	0,26	rendah
13.	Jawa Timur	0,2	rendah
14.	Kalimantan Barat	0,42	rendah
15.	Kalimantan Tengah	1,35	tinggi
16.	Kalimantan Selatan	1,5	tinggi
17.	Kalimantan Timur	3,66	sangat tinggi
18.	Sulawesi Utara	0,66	sedang
19.	Sulawesi Tengah	0,34	rendah
20.	Sulawesi Selatan	0,32	rendah
21.	Sulawesi Tenggara	0,35	rendah
22.	Bali	1,49	tinggi
23.	Nusa Tenggara Barat	0,15	rendah
24.	Nusa Tenggara Timur	0,12	rendah
25.	Maluku	0,3	rendah

No	Nama Provinsi	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
26.	Papua	0,95	sedang
27.	Maluku Utara	1,15	tinggi
28.	Banten	0,58	sedang
29.	Bangka Belitung	1,27	tinggi
30.	Gorontalo	0,33	rendah
31.	Kepulauan Riau	1,68	tinggi
32.	Papua Barat	2,45	sangat tinggi
33.	Sulawesi Barat	0,47	rendah
34.	Kalimantan Utara	3,66	sangat tinggi

Sumber Kementerian Keuangan, 2015

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hanya 4 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, 7 provinsi kapasitas fiskal tinggi, 5 provinsi kapasitas fiskal sedang dan 18 provinsi yang kapasitas fiskalnya rendah.

Sejak tahun 1999, telah terjadi perkembangan pembentukan daerah otonom baru. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri telah berkembang 7 provinsi baru, 182 kabupaten baru, dan 33 kota. Ketujuh provinsi tersebut adalah Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara. Terlihat bahwa dari provinsi yang baru terbentuk hanya Sulawesi Barat dan Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Kapasitas fiskal yang rendah menjadi dasar untuk menghitung besaran dana penerusan pinjaman luar negeri yang diterima setiap daerah pada tahun depan. Artinya, semakin rendah kapasitas fiskal suatu daerah, maka akan semakin besar nilai hibah yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dengan normal.

III.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3

(tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup, pengetahuan diukur dari rata-rata waktu (tahun) sekolah, sedangkan standar hidup layak diukur dari penghasilan per kapita.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU.

Berdasarkan data BPS, bahwa perkembangan IPM sebelum adanya UU otonomi daerah mengalami peningkatan dan terus meningkat setelah adanya UU otonomi daerah. Hal ini berarti pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan, capaian IPM di berbagai daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Indonesia dan di tiap provinsi yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik.

Tabel 2. Data Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi Tahun 1996-2013

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi												
	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ACEH	69.40	65.30	66.00	68.70	69.05	69.41	70.35	70.76	71.31	71.70	72.16	72.51	73.05
SUMATERA UTARA	70.50	66.60	68.80	71.40	72.03	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65	75.13	75.55
SUMATERA BARAT	69.20	65.80	67.50	70.50	71.19	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28	74.70	75.01
RIAU	70.60	67.30	69.10	72.20	73.63	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53	76.90	77.25
JAMBI	69.30	65.40	67.10	70.10	70.95	71.29	71.46	71.99	72.45	72.74	73.30	73.78	74.35
SUMATERA SELATAN	68.00	63.90	66.00	69.60	70.23	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42	73.99	74.36
BENGKULU	68.40	64.80	66.20	69.90	71.09	71.28	71.57	72.14	72.55	72.92	73.40	73.93	74.41
LAMPUNG	67.60	63.00	65.80	68.40	68.85	69.38	69.78	70.30	70.93	71.42	71.94	72.45	72.87

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi												
	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	65.40	69.60	70.68	71.18	71.62	72.19	72.55	72.86	73.37	73.78	74.29
KEP. RIAU	-	-	-	70.80	72.23	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78	76.20	76.56
DKI JAKARTA	76.10	72.50	75.60	75.80	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97	78.33	78.59
JAWA BARAT	68.20	64.60	65.80	69.10	69.93	70.32	70.71	71.12	71.64	72.29	72.73	73.11	73.58
JAWA TENGAH	67.00	64.60	66.30	68.90	69.78	70.25	70.92	71.60	72.10	72.49	72.94	73.36	74.05
DI YOGYAKARTA	71.80	68.70	70.80	72.90	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32	76.75	77.37
JAWA TIMUR	65.50	61.80	64.10	66.80	68.42	69.18	69.78	70.38	71.06	71.62	72.18	72.83	73.54
BANTEN	-	-	66.60	67.90	68.80	69.11	69.29	69.70	70.06	70.48	70.95	71.49	71.90
BALI	70.10	65.70	67.50	69.10	69.78	70.07	70.53	70.98	71.52	72.28	72.84	73.49	74.11
NUSA TENGGARA BARAT	56.70	54.20	57.80	60.60	62.42	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23	66.89	67.73
NUSA TENGGARA TIMUR	60.90	60.40	60.30	62.70	63.59	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75	68.28	68.77
KALIMANTAN BARAT	63.60	60.60	62.90	65.40	66.20	67.08	67.53	68.17	68.79	69.15	69.66	70.31	70.93
KALIMANTAN TENGAH	71.30	66.70	69.10	71.70	73.22	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06	75.46	75.68
KALIMANTAN SELATAN	66.30	62.20	64.30	66.70	67.44	67.75	68.01	68.72	69.30	69.92	70.44	71.08	71.74
KALIMANTAN TIMUR	71.40	67.80	70.00	72.20	72.94	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22	76.71	77.33
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.72
SULAWESI UTARA	71.80	67.10	71.30	73.40	74.21	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54	76.95	77.36
SULAWESI TENGAH	66.40	62.80	64.40	67.30	68.47	68.85	69.34	70.09	70.70	71.14	71.62	72.14	72.54
SULAWESI SELATAN	66.00	63.60	65.30	67.80	68.06	68.81	69.62	70.22	70.94	71.62	72.14	72.70	73.28
SULAWESI TENGGARA	66.20	62.90	64.10	66.70	67.52	67.80	68.32	69.00	69.52	70.00	70.55	71.05	71.73
GORONTALO	-	-	64.10	65.40	67.46	68.01	68.83	69.29	69.79	70.28	70.82	71.31	71.77
SULAWESI BARAT	-	-	-	64.40	65.72	67.06	67.72	68.55	69.18	69.64	70.11	70.73	71.41
MALUKU	68.20	67.20	66.50	69.00	69.24	69.69	69.96	70.38	70.96	71.42	71.87	72.42	72.70

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi												
	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
MALUKU UTARA	-	-	65.80	66.40	66.95	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03	69.47	69.98	70.63
PAPUA BARAT	-	-	-	63.70	64.83	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65	70.22	70.62
PAPUA	60.20	58.80	60.10	60.90	62.08	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36	65.86	66.25

Sumber: BPS, 2014.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategori menjadi kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah ($50 \leq IPM < 66$), dan kategori rendah ($IPM < 50$).

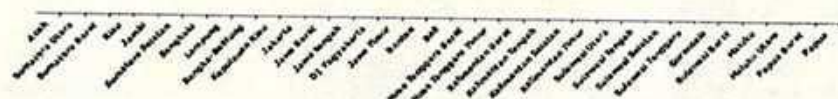
III.3. Indeks Pemerataan Kapasitas Fiskal antar daerah (Indeks Williamson)

Menurut Sjafrizal, salah satu model yang cukup representatif dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson. Williamson mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan Vuw (tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Bila indeks williamson mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila mendekati nol berarti sangat merata.

Grafik 1. Indeks Ketimpangan Tahun 2003 Sebelum UU Otonomi Daerah

Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
2003

Y
X

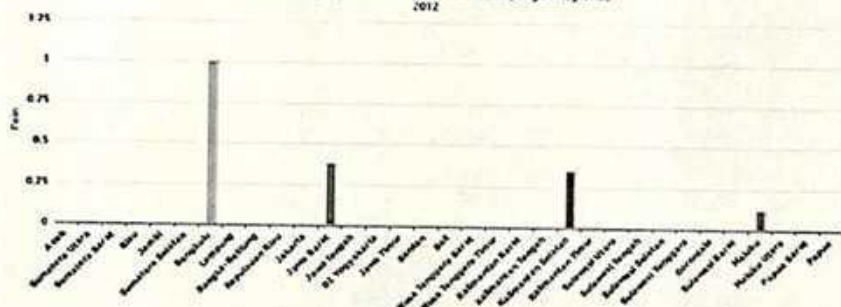


Sumber: Kemendagri, 2015.

Pada tahun 2003, terlihat bahwa indeks williamson mendekati nol. Setelah UU otda diberlakukan terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku yang memiliki indeks williamson mendekati satu. Maka malah terjadi banyak ketimpangan di beberapa provinsi di Indonesia.

Grafik 2. Indeks Ketimpangan Tahun 2012 Setelah UU Otonomi Daerah

Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
2012



Sumber: Kemendagri, 2015.

Ketimpangan fiskal vertikal kabupaten/kota yang terjadi sebelum otonomi daerah sangat tinggi, namun pada awal pelaksanaan otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian berangsur-angsur tiap tahunnya ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat menurun walaupun masih jauh dari mandiri dilihat dari besarnya proporsi transfer dana pusat terhadap total penerimaan pemerintah daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal untuk pemerintah daerah provinsi sebelum otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, dari tahun ke tahun ketergantungan daerah mengalami penurunan atau menjadi tidak terlalu tergantung terhadap transfer dana pusat. Hal tersebut terjadi karena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga mempengaruhi sisi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah provinsi.

IV. PENUTUP

Implementasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia telah berjalan sebagaimana yang dicita-citakan pada saat pembentukan UU otonomi daerah. Peningkatan kesejahteraan rakyat terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi lebih merata di seluruh provinsi. Kapasitas fiskal mengalami peningkatan, indeks pembangunan manusia juga lebih baik dan indeks ketimpangan lebih baik daerah dapat lebih mandiri mengelola keuangannya dan tidak terlalu bergantung dari pusat.

DAFTAR PUSTAKA

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/134/118>

Ahmad Yani, 2008, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.

Kristiadi J.B. 1991. *Peran aparatur Pemerintah Dalam Era Pembangunan*. Bandung: Sesimpol Lembang.

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Syaukani, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, PT Buku Kita, Jakarta.

TULISAN KEENAM

**PERUBAHAN MENUJU AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL UNTUK MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

*oleh: Venty Eka Satya**

* Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PERUBAHAN MENUJU AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik seringkali dianggap sebagai organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas dan selalu rugi. Bagi pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi sektor publik, anggapan ini sangat merugikan, karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.¹ Ditambah lagi dengan banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu asas *Good Governance* yang mulai dipopulerkan sejak tahun 1990-an. Sejak itu paradigma pemerintahan diberbagai Negara mulai bergeser dari pemerintah formal menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Buruknya pengelolaan keuangan sektor publik tidak terlepas dari buruknya pengelolaan organisasi itu sendiri. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik memunculkan kritik keras sehingga mendorong terjadinya reformasi manajemen sektor publik. Reformasi sektor publik tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi beberapa negara berkembang dan negara tertinggal secara aktif terus melakukan reformasi lembaga publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling populer adalah konsep *New Public Management* yang disingkat NPM.² NPM telah mereformasi

¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2)*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN), 2010, hal. 34.

² Ratna A. Damayanti, *Akuntansi Akrual dan Penerapannya Di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan*, Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran, dan Implementasi di Indonesia, Star BPKP, 2013, hal. 1.

pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor publik. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan sebuah alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban.

Salah satu alat untuk pertanggungjawaban keuangan yang terpenting adalah laporan keuangan. Laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi. Output akuntansi adalah informasi keuangan dan non keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban. Akuntansi pada sektor publik yang berlangsung selama ini juga dianggap tidak mampu memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai kondisi keuangan atau harta kekayaan organisasi yang bersangkutan.

Berbagai dorongan untuk mereformasi akuntansi pada sektor publik juga hadir dari berbagai lembaga internasional. Dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang organisasi global seperti Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Federation of Accountants* (IFAC) aktif mempromosikan adopsi manajemen dan teknik sektor swasta ke sektor publik.³ Buruknya kinerja pemerintahan di banyak negara pada masa lalu seperti semakin meningkatnya utang negara, pemborosan, ketidakefisienan, buruknya pelayanan publik mendorong reformasi sektor publik, berbagai istilah pada tahun 1990-an mencerminkan adanya perubahan di sektor publik seperti *renventing government*, *value for money*, *good governance* dan *new public management*.

Pada sektor swasta, akuntansi memiliki peranan yang sangat penting. Perkembangan akuntansi di sektor ini sangat pesat dan bergerak dinamis mengikuti perkembangan perekonomian dibandingkan dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sendiri telah berperan untuk menghasilkan sumber informasi yang kemudian digunakan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Informasi yang dihasilkan akuntansi menjadi alat untuk mengukur sejauh mana efisiensi dilakukan dan sebagai alat pertanggungjawaban. Perkembangan akuntansi yang sangat pesat

³ Roob, A. Newberry, S. 2007. *Globalization: Governmental Accounting and International Financial Reporting Standards*. *Socio-Economic Review*, 5: 725-754, hal. 743.

di sektor swasta tidak diikuti sektor publik. Lahirnya konsep NPM menyebabkan reformasi akuntansi di sektor publik. Dimulailah masa di mana prinsip-prinsip akuntansi yang ada di sektor swasta diadopsi oleh sektor publik.⁴

Di Indonesia, reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut telah memberikan landasan yang kokoh dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara juga telah mendorong masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana keuangan negara dan keuangan daerah dikelola. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta para pemegang kepentingan lainnya.

Reformasi ini diikuti dengan langkah besar yang dilakukan dibidang akuntansi pemerintahan, yaitu dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mewajibkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sejak saat itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pelaporan keuangan dengan basis kas menuju akrual yang selanjutnya digantikan dengan PP Nomor 71 tahun 2010. SAP Lampiran II PP Nomor 71 tersebut menyatakan bahwa masa efektif standar dimaksud hanya sampai dengan pelaksanaan anggaran tahun 2014. Sesudahnya semua laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran entitas pemerintah harus menggunakan basis akrual yang standarnya telah ditetapkan pada Lampiran I PP 71 tahun 2010. Tulisan ini merupakan studi pustaka yang memaparkan mengenai bagaimana perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia serta bagaimana peran akuntansi akrual dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

⁴ Ratna A. Damayanti, *Akuntansi Akrual dan Penerapannya Di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan*, Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran, dan Implementasi Di Indonesia, Star BPKP, 2013, hal. 2.

II. AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGANNYA

Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Dalam perkembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase "Sektor Publik". Pemahaman sektor publik telah memasuki wilayah pemerintahan itu sendiri. Peristilahan "utang Sektor Publik" dan "permintaan pinjaman Sektor Publik" menjadi materi yang menarik dari kajian politik dan ekonomi. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemeritahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, frase 'Sektor Publik' diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara.⁵

Akuntansi sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai bidang akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara luas sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, perusahaan negara, yang di Indonesia dikenal sebagai BUMN dan BUMD, partai politik, yayasan, dan lembaga nonprofit lainnya. Dalam perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intervensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya definisi frase sektor publik mulai diartikan dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. Intervensi multidisiplin telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian manajemen sektor publik seperti gender, politik ekonomi, ekuitas, akuntabilitas, hak asasi dan entitas/organisasi. Selain itu, dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti: a) Organisasi Pemeritah Pusat; b) Organisasi Pemerintah Daerah; c) Organisasi Parpol; d) Organisasi Yayasan; e) Organisasi Pendidikan dan Kesehatan; f) Organisasi Tempat Peribadatan.⁶

⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 3.

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 3.

II.1. Akuntansi sebagai Seni, Sains dan Teknologi

Perdebatan di tingkat akademik yang belum mencapai titik temu adalah jawaban atas pertanyaan apakah pengetahuan akuntansi dapat dikategorikan sebagai seni, sains atau teknologi. Status yang jelas memudahkan pengembangan pengetahuan akuntansi untuk pencapaian tujuan sosial dan ekonomik tertentu. Lagi pula kejelasan status akuntansi mempunyai implikasi terhadap arah studi dan praktik akuntansi.⁷

Akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan cukup luas dan dalam serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Kesatuan pengetahuan tersebut dapat diajarkan dan dipelajari untuk mendapatkan kompetensi yang menjadi basis atau persyaratan suatu profesi. Akuntansi sebagai penyedia jasa mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi negara tempat akuntansi diterapkan. Dalam arti sempit, sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklafikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.⁸

II.2. Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak yang mengatakan merupakan terminologi lama. Pada perkembangannya bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Istilah baru ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat

⁷ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan dan Pelaporan*, (Jogjakarta: BPFE, 2005), hal. 9.

⁸ *Ibid.*, hal. 10.

daerah. Sementara akuntansi publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.⁹

Perkembangan akuntansi yang sangat pesat di sektor swasta tidak diikuti sektor publik. Lahirnya konsep NPM menyebabkan reformasi akuntansi di sektor publik. Dimulailah masa dimana prinsip-prinsip akuntansi yang ada di sektor swasta diadopsi oleh sektor publik. Akuntansi pada sektor publik menjadi alat pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik telah mencapai efisiensi. Salah satu reformasi akuntansi di sektor publik adalah perubahan basis akuntansi. Perubahan basis akuntansi dari akuntansi kas ke akuntansi akrual merupakan salah satu ciri adopsi konsep NPM oleh sektor publik.

Akuntansi akrual telah menyebar ke banyak negara seiring dengan perkembangan NPM. Hal ini merupakan bagian dari bentuk adopsi proses dan teknik manajemen swasta ke manajemen sektor publik.¹⁰ Akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi yang mempengaruhi keuangan perusahaan pada saat terjadi bukan didasarkan pada saat menerima atau mengeluarkan uang.¹¹

Meskipun masih terdapat pro dan kontra mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ini, pada kenyataannya sistem ini sangat populer digunakan pada sektor swasta. *Accrual Base Accounting* dianggap mampu memberikan *benefit* yang besar pada penggunaanya karena mampu memberikan informasi yang lebih bisa diandalkan mengenai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. *International Financial Reporting Standards (IFRS)* juga menggunakan akuntansi akrual sebagai asumsi dasar dalam kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan.¹² Contoh lain adalah Ikatan Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009) paragraf 21 mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan

⁹ Mursyidi, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hal. 1.

¹⁰ Mckendrick, J, *Modernization of the Public Sector Accounting System in Central and Eastern European Countries: The Case of Romania*. International Public Management Review, 8 :165-185, 2007, hal. 166.

¹¹ Kieso, D et al, *Intermediate Accounting IFRS Edition*, (Danvers: John Wiley & Sons), 2011, hal 51.

¹² Kieso, D et al. 2011. *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Danvers: John Wiley & Sons, hal. 51.

keuangan atas dasar akrual. Adanya regulasi ini menjelaskan bagaimana krusialnya konsep akuntansi akrual di sektor bisnis.¹³

II.3. Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara, sistem pencatatan pada akuntansi di sektor pemerintahan masih menggunakan *single entry*. Pada sistem pencatatan ini, menurut Abdul Halim¹⁴, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aktiva tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu entitasnya. Sehingga pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang umumnya dikenal yang dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas.

Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Namun dalam perkembangannya sistem pencatatan akuntansi dari basis kas berubah menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor publik akibat stagnansi ekonomi yang menghantam beberapa negara seperti New Zealand, Australia dan Inggris. Fenomena perubahan ini populer disebut *New Public Management*. Apa yang memotivasi perubahan? Alasan utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak lebih tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 5.

¹⁴ Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat Jakarta.

pemerintah diminta untuk mereviu perannya dalam kegiatan dan operasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pemerintah diinginkan untuk berbuat lebih banyak dengan diiringi tuntutan agar manajer sektor publik menjadi lebih akuntabel.¹⁵

Pada umumnya reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia, bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern. Pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan single entry. Reformasi menuju akuntansi modern merubah *cash basis* menjadi *accrual basis*. *Accrual accounting* dianggap mampu menyajikan informasi akuntansi lebih akurat dan informatif.¹⁶ Fase akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan pada sistem akuntansi pemerintahan sejak tahun 1990an. Daftar negara-negara yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada awal periodisasi reformasi akuntansi sektor publik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Accrual Accounting and Budgeting In The Public Sector*

	<i>Accrual accounting for individual agencies & departments</i>	<i>Consolidated whole of governmental accrual accounting</i>	<i>Accrual budgeting</i>
Australia	<i>Since 1995</i>	<i>Since 1997</i>	<i>From fiscal year 1999-2000</i>
Canada	<i>For fiscal year 2001-2002</i>	<i>Fr fiscal year 2001-2002</i>	<i>No</i>
Finland	<i>Since 1998</i>	<i>Since 1998</i>	<i>No</i>
Germany	<i>Permitted since 1998</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Iceland	<i>Since 1992</i>	<i>Since 1992</i>	<i>Since 1998</i>
Ireland	<i>Pilot launched in 1995</i>	<i>No</i>	<i>no</i>

¹⁵ Buhr, N.. *From Cash to Accrual and Domestic to International Government Accounting Standard Setting in Last 30 Years*. Makalah disajikan pada Sixth Accounting History International Conference, Welington.19 Agustus, 2010, hal. 12.

¹⁶ Simanjutak, Binsar, *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, 2002 <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art7.pdf>, diakses 3 Februari 2015.

Netherlands	<i>Pilot launched in 1994</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
New Zealand	<i>Since fiscal year 1991-1992</i>	<i>Since fiscal year 1991-1992</i>	<i>Since fiscal year 1994-1995</i>
Sweden	<i>Since 1994</i>	<i>Since 1994</i>	<i>No</i>
United Kingdom	<i>Launched in 1993; all by fiscal year 1999-2000</i>	<i>planned</i>	<i>Fr fiscal year 2001-2002</i>
United States	<i>Since fiscal year 1997-1998</i>	<i>Since fiscal year 1997-1998</i>	<i>No</i>

Sumber: OECD,PUMA,199a,p.4 in OECD Journal Models of Public Budgeting Reform, 2001.

Periodisasi perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:¹⁷

1. Tahun 1975

Pada tahun ini belum ada sistem akuntansi, yang ada baru sebatas sistem administrasi atau dikenal dengan istilah tata usaha keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah mendasarkan pada:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

2. Tahun 1979-1980

- Sistem administrasi pemerintahan masih dilakukan secara manual, belum dikenal sistem komputerisasi yang terintegrasi.
- Belum dimiliki Standar Akuntansi Pemerintah.
- Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari Departemen/Lembaga yang disusun secara manual dan *single entry*.

¹⁷ Nuwun Priyono, Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Periode Sebelum Reformasi sampai Dengan Pasca-Reformasi, vol. 37 No. 1, 15September 2012: 81-93, hal. 5-8.

- Penyampaian laporan PAN oleh pemerintah kepada DPR dilaksanakan dalam waktu 2-3 tahun.
- Departemen keuangan mulai membuat rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah.
- Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), yang menjadi pedoman pencatatan keuangan daerah yang pada dasarnya sebatas tata buku bukan merupakan suatu sistem akuntansi.

3. Tahun 1986

- Dibuat desain pengembangan Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan.
- Sistem yang disetujui Departemen Keuangan pada saat itu adalah menyusun alokasi anggaran, proses penerimaan dan pengeluaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pembuktian bukti jurnal dan daftar transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara manual.

4. Tahun 1987-1988

- Mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan pada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya.
- Pada saat bersamaan, timbul pemikiran penggunaan komputer untuk proses akuntansi dan pada tahun 1989 usulan pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia dalam bentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap I, tetapi sistem fungsional masih berdasar pada desain manual sebelumnya, belum sampai proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan.

5. Tahun 1992

Dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai *Central Accounting Office*, yang bukan sekadar "membukukan" namun memerlukan adanya

standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang.

6. Tahun 2001-2002

- 1 Januari 2001 otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serentak dilaksanakan di Indonesia.
- Terdapat perubahan format anggaran dan pelaporannya.
- Dikeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*) untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah.

7. Tahun 2003-2004

Reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 Undang-undang Keuangan Negara, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

8. Tahun 2005

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan-KSAP (*Standard Setter Body*) dibentuk dengan Keppres No. 84 tahun 2004, diubah dengan Keppres No. 2 Tahun 2005, Keppres No. 3 Tahun 2009.
- Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 menggunakan pendekatan *cash towards accrual* (CTA) dalam sistem pencatatan akuntansinya.
- Mulai tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

9. Tahun 2010

Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh (*full accrual accounting*) tidak lagi *cash towards accrual* selambat-lambatnya tahun 2015.

III. AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

III.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, disamping partisipasi dan transparansi adalah ciri utama dari konsep *good governance*. Akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin membaik apabila didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi tepat waktu dan tidak menyesatkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang, tidak informatif, tidak akurat dan menyesatkan akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.¹⁸

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1) *accountability for probity and legality*; 2) *process Accountability*; 3) *performance Accountability*; 4) *programme Accountability*; dan 5) *policy Accountability*.¹⁹

Annisaningrum mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.

¹⁸ Simanjutak, Binsar, Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, 2002 <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art7.pdf>, diakses 3 Februari 2015.

¹⁹ Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.²⁰

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003, dalam Ismiati).²¹ Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999, dalam Mardiasmo).²² Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisiensi dari para aparat birokrasi sehingga tujuan akan mampu dicapai. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.²³

²⁰ Annisaningrum. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*. (Online), 2010, tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>. diakses 20 Mei 2015, hal. 1.

²¹ Ismiarti. (2013). *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE Unib, hal. 30.

²² Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4, hal. 4.

²³ Amin Rahmanurrasjid, *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Semarang: 2008, Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro, hal. 80.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.²⁴

III.2. Konsep Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasikan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Menurut UUD 1945, pengelolaan keuangan negara (baik pusat maupun daerah) perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggungjawab tersebut adalah dengan melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 1 UU 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Secara umum keuangan negara adalah semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran dari suatu Negara. Pada umumnya studi keuangan Negara membatasi hanya pada pengeluaran yang ada pada anggaran pemerintah (pusat dan daerah) dan pengaruh-pengaruhnya. Aspek-aspek lain yang merupakan bidang studi keuangan negara adalah regulasi ekonomi oleh cabang pemerintahan yudikatif, pengelolaan perusahaan Negara, dan pengaturan kebijakan moneter.

Ilmu keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran

²⁴ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN, 2008), hal. 83.

pemerintah beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Keuangan Negara membahas dampak dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan, peningkatan efisiensi serta penciptaan lapangan kerja.²⁵

Pasal XX UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Keuangan Negara adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran negara beserta segala sebab dan akibat dari penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam bentuk hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang dan barang.

Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keuangan negara harus dikelola dengan bertanggung jawab, mengikuti ketentuan dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, profesional disertai dengan pedoman yang jelas sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

III.3. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Mengapa sejumlah negara beralih menggunakan akuntansi akrual? Untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa alasan dapat dikemukakan. Pertama, akuntansi akrual menyediakan informasi untuk menjalankan organisasi dengan cara lebih efektif dan efisien. Kedua, system akuntansi akrual menciptakan kemungkinan untuk memberikan informasi baru yang merefleksikan realitas ekonomi dari organisasi. Hal ini akan semakin nyata dengan adanya dukungan dari sistem manajemen akuntansi. Pada keadaan ini, akuntansi basis

²⁵ Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*, edisi ke 6, (Jogjakarta: BPFE, 2011), hal. 1-2.

akrual mungkin merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, reformasi akuntansi akrual mungkin juga dilandasi oleh pengalaman terdahulu dengan organisasi lain.²⁶

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa akuntansi akrual diyakini mempunyai manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas. Diamond dalam dokumen *International Monetary Fund* (IMF) yang berjudul: *Performance Budgeting: Is Accrual Accounting Required?* menuliskan ada empat manfaat dari akuntansi akrual yaitu :²⁷

1. Meningkatkan Kualitas Penggunaan Sumber daya (*Improve Resource Allocation*).
2. Penguatan Akuntabilitas (*Strengthened Accountability*).
3. Meningkatkan Transparansi atas Total Biaya dari Aktivitas Pemerintahan (*Enhanced Transparency on Total Resources Costs of Government Activities*).
4. Melihat dengan Lebih Komprehensif atas Pengaruh dari Aktivitas Pemerintahan Terhadap Perekonomian (*More Comprehensive View of Government's Impact on The Economy*).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Keberadaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP 24 tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan salah satu tonggak reformasi keuangan pemerintahan, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

²⁶ Arief S Irawan, *Transisi dari Akuntansi Berbasis Akrual Menuju Penganggaran Berbasis Akrual, Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran, dan Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: Star BPKP, 2013), hal. 24.

²⁷ Diamond, Jack., *Performance Budgeting : Is Accrual Accounting Required?*, *International Monetary Fund*, 2002, hal. 9-10.

Keberadaan standar akuntansi juga dipercaya mampu mencegah korupsi. Standar akuntansi akan membuat laporan keuangan menjadi berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang tepat waktu, valid, reliabel dan andal. Hal ini berarti laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan memenuhi prinsip *disclosure*, mengungkapkan secara wajar setiap transaksi, yang dapat diartikan sebagai transparansi.

Saat ini *accrual base accounting* baru diberlakukan, dapat dikatakan masih berada pada masa transisi, masih membutuhkan waktu cukup panjang untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Berbagai kendala timbul di lapangan misalnya kesiapan sumberdaya manusia dalam memahami akuntansi pemerintahan. Kendala melakukan penilaian aset pemerintah dalam menentukan neraca awal karena tidak tertatanya administrasi aset yang baik maupun konflik pemekaran daerah yang menimbulkan masalah dalam pengakuan aset pemerintah daerah. Dengan digunakannya sistem akuntansi berbasis akrual, penilaian aset akan lebih transparan dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003, dalam Amin).²⁸ Konversi ke basis akrual dalam akuntansi sektor publik membantu pengukuran biaya yang lebih akurat. Reformasi lain terfokus pada orientasi anggaran berbasis kinerja, *output* dan *outcome* dengan pendekatan manajemen pengeluaran publik. Akuntansi akrual diyakini menjadi instrumen penting dan bermanfaat untuk pemeriksaan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintahan.

Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintahan dengan menggunakan informasi

²⁸ Amin Rahmanurrajjid, *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang: 2008, Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro. Hal. 85-86.

yang diperluas, tidak sekadar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (*input*). Para manajer di sektor publik diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan *output/outcome* yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif.²⁹

Konsep akuntabilitas di Indonesia bukan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

IV. PENUTUP

Pengelolaan organisasi sektor publik yang tidak efisien dan efektif telah mendorong timbulnya reformasi di bidang akuntansi sektor publik. Perombakan sistem akuntansi ini tidak terlepas dari tuntutan akan dilaksanakannya NPM. NPM telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor publik. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan sebuah alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar dari *Good Governance* yang mulai populer di tahun 1990an.

²⁹ Organisation for economic Co-Operation and Development.. Accrual Accounting and Budgeting. Makalah disajikan dalam Twenty-third Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials, Washington DC: OECD, 2002, 3-4 Juni, hal. 11.

Tuntutan masyarakat akan perbaikan pengelolaan organisasi dan keuangan negara pada akhirnya berdampak juga terhadap perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan. Perubahan besar terhadap sistem pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara. Perubahan ini diikuti oleh reformasi sistem akuntansi pemerintahan dengan dikeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang mengharuskan sistem akuntansi pemerintahan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi akrual ini sangat populer di sektor swasta sehingga akhirnya diadopsi oleh akuntansi sektor publik. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, penerapan sistem ini pada akuntansi sektor publik, sistem ini memberikan banyak manfaat pada pengelolaan keuangan negara. Diantara beberapa manfaatnya adalah; meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan serta mampu melihat dengan lebih komprehensif atas pengaruh dari aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian. Selain itu, tentunya masih banyak lagi manfaat lain dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual ini.

Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual mulai efektif dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Akan tetapi penerapan sistem ini tentu saja masih menghadapi berbagai kendala seperti belum siapnya sumber daya yang ada untuk melaksanakan sistem ini. Ada beberapa bidang pada akuntansi sektor publik yang tidak ditemukan pada akuntansi sektor swasta seperti Aset Budaya, Heritage dan Sejarah tidak ditemukan pada organisasi swasta sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut untuk penerapan akuntansi akrual pada organisasi publik. Selain itu secara fundamental, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor privat.

Akuntansi pemerintahan belum bisa sepenuhnya menerapkan sistem akrual dalam pengelolaan keuangannya. Seperti pada penyusunan anggaran masih menggunakan basis kas. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pengelolaan keuangan negara yang komprehensif, penerapan sistem akrual dalam anggaran juga perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN, 2002.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006).
- Irawan, Arief S, *Transisi dari Akuntansi Berbasis Akrua Menuju Penganggaran Berbasis Akrua*, Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Konsep, Pemikiran, dan Implementasi di Indonesia, Star BPKP, 2013.
- Kieso, D et al., *Intermediate Accounting IFRS Edition*, Danvers: John Wiley & Sons.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2)*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN), 2010, hal. 34.
- Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009).
- Ratna Ayu Damayanti, *Akuntansi Akrua dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan*, Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Konsep, Pemikiran, dan Implementasi di Indonesia, Star BPKP, 2013.
- Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*, edisi ke 6, (Jogjakarta: BPFE, 2011).

Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan dan Pelaporan*, (Jogjakarta: BPFE, 2005).

Artikel dalam jurnal, *working paper*.

Akbar, B, "Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah", Artikel, Fordfoundation, Public Interest Research and Advocacy Center, 2012.

Buhr, N., "From Cash to Accrual and Domestic to International overnment Accounting Standard Setting in Last 30 Years, Makalah disajikan pada Sixth Accounting History International Conference, Welington, 19 Agustus 2010.

Diamond, Jack, "Performance Budgeting: Is Accrual Accounting Required?", International Monetary Fund, 2002.

Ismiarti, "Analisis Inplementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah", Tesis. Bengkulu, Program Magister Akuntansi FE Unib, 2013.

Mardiasmo. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1*, Mei 2006.

Mckendrick, J, "Moderrnization of the Public Sector Accounting System in Central and Eastern European Countries: The Case of Romania", *International Public Management Review*, 8, 2007, pp. 165-185.

Priyono, Nuwun, "Perkembangan Akuntansi Pemerintahn di Indonesia Periode Sebelum Reformasi sampai Dengan Pasca-Reformasi", Vol. 37 No. 1, 15 September 2012, pp. 81-93,

Organisation for economic Co-Operation and Development, "Accrual Accounting and Budgeting", Makalah disajikan dalam Twenty-third Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials, OECD, Washington DC, 3-4 Juni 2002.

Rahmanurrasjid, Amin, "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah", Tesis, Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro, 2008.

Roob, A. Newberry, S, "Globalization: Govermental Accounting and International Financial Reporting Standards", *Sosio-Economic Review*, 5: 2007, pp. 725-754.

Tulisan dalam internet

Annisaningrum, "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan", (Online), 2010, tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>. diakses 20 Mei 2015

Simanjutak, Binsar, "Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia", 2002, <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art7.pdf>, diakses 3 Februari 2015.

EPILOG

Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya. Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika terdapat investasi baru ke dalam perekonomian..

Hampir semua negara berupaya mendorong perkembangan sektor keuangan untuk meningkatkan perekonomian sehingga mampu tumbuh lebih tinggi. Pengembangan sistem keuangan di Indonesia lebih dekat kepada tipe *bank-based system* dimana perbankan mendominasi sektor keuangan. Pilihan *bank based* diambil karena dirasakan lebih dekat dengan sektor industri sehingga lebih mudah memperoleh informasi. *Bank based* lebih mudah mengidentifikasi sektor usaha dan perusahaan yang prospektif sehingga investasi lebih optimal. Sementara *market based*, dapat mengurangi *inheren inefisiensi* yang ada dalam *bank-based system* dan terdapat peluang *risk sharing* dan *risk management* sehingga dapat meminimalisasi dampak dari *shock* dalam perekonomian.

Di Indonesia, sektor keuangan digerakkan oleh dua sektor keuangan yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian. Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta dunia internasional.

Kehadiran buku dengan tema “Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia” telah memberikan

sumbangan pemikiran dan masukan kepada pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia bidang keuangan, ekonomi dan kebijakan publik. Diawali dengan pembahasan mengenai upaya mengatasi krisis ekonomi agar tidak berdampak serius terhadap perekonomian nasional. Bagian buku ini menawarkan suatu alat deteksi sebagai *early warning system* (EWS). Dalam model-model EWS parametrik banyak digunakan indikator-indikator makroekonomi untuk menerangkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi seperti nilai tukar riil, pertumbuhan ekspor dan impor, rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio M2 terhadap cadangan devisa, proporsi investasi dalam GDP, pertumbuhan cadangan devisa dan sebagainya.

Berdasarkan pergerakan dari indikator-indikator makroekonomi tersebut, probabilitas Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi seperti krisis ekonomi 1998 adalah rendah sehingga perekonomian ke depan diproyeksikan cukup stabil. Namun demikian terdapat beberapa indikator makroekonomi yang menunjukkan tren tidak bagus seperti rasio M2 terhadap cadangan devisa, defisit fiskal dan nilai tukar sehingga menimbulkan dugaan Indonesia akan mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998. Hal ini mendorong kewaspadaan para pelaku pasar sehingga sektor keuangan dapat terus berperan baik dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan dalam bagian pertama tulisan ini.

Peran sektor keuangan juga ditunjukkan oleh peran kredit perbankan dalam perekonomian. Perkembangan penyaluran kredit perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan di Indonesia berfluktuasi dari tahun 2005-2014. Pada periode 2005 sampai dengan 2010, penyaluran kredit perbankan mengalami fluktuasi naik sementara setelah periode tersebut hingga tahun 2014 mengalami tren yang menurun.

Hasil analisa kuantitatif menemukan bahwa pertumbuhan kredit yang diberikan oleh sektor perbankan terbukti memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu ditengah situasi pertumbuhan kredit yang sedang menurun saat ini, maka sudah waktunya bagi Pemerintah beserta DPR untuk duduk bersama bersama *stakeholder* terkait untuk mencari solusi akan hal tersebut. Jika pertumbuhan kredit terus mengalami tren yang menurun akan berdampak negatif

terhadap perekonomian nasional diperlihatkan dalam tulisan pada bagian kedua buku ini.

Peningkatan kemandirian bangsa dalam mengupayakan sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri harus terus dilakukan. Upaya memperkuat ketahanan fiskal untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan bagian negara dari laba BUMN, dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyertaan Modal Negara menjadi kebijakan sektor keuangan yang diharapkan dapat memberikan imbal jasa bagi Negara. Pemberian PMN kepada BUMN harus dapat merestrukturisasi BUMN dan mendukung program prioritas sehingga memiliki kemampuan dalam menghadapi dinamika global dan nasional serta menjamin peningkatan nilai dividen bagi penerimaan Negara. Dengan demikian PMN bagi BUMN menjadi bagian dari upaya membangun fundamental ekonomi yang kokoh dan bukan sekedar membagi jatah kekuasaan bagi pemerintahan yang sedang berjalan merupakan bagian tulisan ketiga yang diangkat dalam buku ini.

Bagian buku keempat mengangkat peran sektor perbankan syariah dalam perekonomian nasional khususnya sektor riil. Karena sudah hampir tiga dekade industri keuangan syariah hadir di Indonesia dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sistem keuangan syariah telah teruji mampu bertahan dari beberapa krisis yang melanda ekonomi dunia, karena berlandaskan kepada pencapaian keadilan yang berbasis kepada transaksi riil dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal.

Dalam rangka berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp204,334 miliar pada akhir 2014. Komposisi penggunaan pembiayaan tersebut masih didominasi untuk konsumtif dan modal kerja, dengan pangsa terbesar sektor jasa dunia usaha. Beberapa masalah dan kendala dihadapi industri perbankan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya, antara lain dana syariah lebih mahal dari konvensional karena berasal dari deposito, keterbatasan modal, dan belum adanya *reference rate* bagi bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sehingga

mampu bersaing dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah negara lain yang kemungkinan akan masuk ke Indonesia dalam rangka pasar global.

Selanjutnya pada bagian kelima dari buku ini mencoba mengemukakan sistem keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional. Diungkapkan bahwa ketimpangan fiskal vertikal kabupaten/kota yang terjadi sebelum otonomi daerah sangat tinggi, namun pada awal pelaksanaan otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian berangsur-angsur tiap tahunnya ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat menurun walaupun masih jauh dari mandiri dilihat dari besarnya proporsi transfer dana pusat terhadap total penerimaan pemerintah daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal untuk pemerintah daerah provinsi sebelum otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, dari tahun ke tahun ketergantungan daerah mengalami penurunan atau menjadi tidak terlalu tergantung terhadap transfer dana pusat. Hal tersebut terjadi karena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga mempengaruhi sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Buku ini diakhiri dengan tulisan mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pengelolaan sektor organisasi publik yang tidak efektif dan efisien telah mendorong reformasi di bidang akuntansi sektor publik. Perkombakan sistem akuntansi ini tidak lepas dari tuntutan akan dilaksanakannya *New Public Management*. Tuntutan masyarakat akan perbaikan pengelolaan organisasi dan keuangan negara pada akhirnya berdampak juga terhadap perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan.

Perubahan besar terhadap sistem pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara. Perubahan ini diikuti oleh reformasi sistem akuntansi pemerintahan dengan dikeluarkan Standar akuntansi Pemerintahan pada tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang mengharuskan sistem akuntansi pemerintahan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi akrual ini sangat populer di sektor swasta sehingga akhirnya diadopsi oleh

akuntansi sektor publik. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, penerapan sistem ini pada akuntansi sektor publik, sistem ini memberikan banyak manfaat pada pengelolaan keuangan negara.

Diantara beberapa manfaatnya adalah meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan serta mampu melihat dengan lebih komprehensif atas pengaruh dari aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian. Demikian inti sari buku yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2015
Editor.

Prof. Carunia Mulya Firdausy, Ph.D

INDEKS

A

Accrual Base Accounting, 125, 136
Accrual Budgeting, 127
 Adil, 74
 Akad, 84, 85, 86, 96
 Akuntabel, 127, 133, 136
 Akuntabilitas, 50, 119, 120, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
 Akuntabilitas Publik, 132, 135, 136
 Akuntansi, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138
 Akuntansi Pemerintahan, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 138
 Akuntansi Sektor Publik, 121, 123, 124, 127, 130, 135, 136, 137, 138
 Anggaran, 60, 62, 72, 107, 109, 122, 128, 129, 130, 133, 134, 136, 138
 APBD, 105, 128
 APBN, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 97, 105,
Asset transfer, 70, 71

B

Badan Akuntansi Keuangan Negara (Bakun), 129
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 48, 73

Bank Indonesia, 29, 31, 32, 34, 82, 91, 94
 Basis Akuntansi, 125, 126, 127
 Basis Kas Menuju Akrua, 122, 126
 Batas Ambang, 14
 Belanja Daerah, 109
 Belanja Pegawai, 109
 Birokrasi, 104, 123, 132, 137

C

Cadangan Devisa, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 104
Cash Towards Accrual, 130
Cash Transfer, 70
Central Accounting Office, 129

D

Daerah, 55, 56, 57, 63, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136
 Daerah Otonom, 102, 105, 111,
 DAK, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 114, 116, 120, 121, 122, 125, 126, 30, 31, 32, 136, 137, 138

- Dalam Negeri, 14, 16, 55, 63, 74, 86, 111, 129
- Dana, 18, 28, 29, 34, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 123, 132
- Dana Investasi Pemerintah, 60, 61
- DAU, 109, 112
- Daya Saing, 15
- Definisi, 114, 123
- Defisit, 34, 104
- Defisit Fiskal, 20, 21, 23
- Defisit Perdagangan, 5
- Demokrasi, 53
- Desentralisasi, 56, 102, 103, 104, 105, 106
- Desentralisasi Fiskal, 106, 130, 135
- Double Entry*, 130
- E**
- Early Warning System*, 1, 2, 6, 7, 73
- Efek Domino, 3
- Efektivitas, 103, 121, 127, 136, 137
- Efisiensi, 29, 107, 121, 125, 127, 132, 134, 136, 137
- Ekonomi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 121, 123, 124, 126, 133, 134, 135, 138
- Ekonomi Makro, 29
- Ekspor, 5, 14, 15, 16, 21, 23, 42, 55
- F**
- Faktor, 7, 8, 37, 89, 107, 108
- Finansial, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 30, 66, 68, 73, 86, 87, 132, 135
- Fiskal, 4, 20, 21, 23, 55, 72, 74, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 130, 135
- Fundamental, 5, 74, 88, 138
- G**
- Gap, 29, 103
- Gejolak Finansial, 2
- Gelombang Finansial, 9
- Global, 2, 3, 5, 6, 40, 74, 81, 86, 87, 92, 97, 121
- Good governance*, 74, 120, 121, 131, 137
- H**
- Hukum, 7, 49, 51, 52, 56, 60, 82, 83, 84, 86, 91, 123, 131, 135
- Human capital*, 74
- I**
- Implementasi, 101, 102, 103, 108, 116, 130
- Impor, 15, 23
- Impulse Response Function*, 42
- Indeks, 5, 33, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
- Indeks Komposit, 10
- Indikator, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 72, 73, 93, 106, 108, 112
- Indikator Makroekonomi, 7, 8, 9, 13
- Engle Granger Causality Test, 38
- Evaluasi, 14, 132
- External Shocks*, 8

- Indonesia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 42, 44, 45, 53, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 102, 105, 108, 110, 112, 116, 117, 122, 123, 125, 126, 130, 138
- Industri, 30, 31, 35, 36, 40, 48, 58, 66, 67, 69, 70, 74, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 94, 97
- Industri Perbankan, 30, 31, 40, 80, 82, 94, 97
- Inflasi, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 104
- Infrastruktur, 48, 49, 60, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 89, 92, 94, 95, 103
- Institusi, 56, 94, 120
- Integral, 88, 97
- International Financial Reporting Standards (IFRS)*, 125
- Investasi, 14, 15, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 60, 62, 67, 73, 74, 81, 82, 86, 90, 93, 94
- Islam, 82, 83, 84, 87
- J**
- Jasa, 28, 32, 33, 35, 36, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 69, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 124
- Jumlah Uang Beredar, 19, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43
- K**
- Kabupaten, 102, 107, 109, 111, 115, 116
- Kapasitas, 29, 40, 57, 60, 61, 81, 89,
- Kapasitas Fiskal, 103, 108, 109, 110, 111, 114, 116,
- Kapita, 32, 112, 114
- Kas Basis, 126
- Keadilan, 72, 80, 88, 97, 133, 134
- Kebijakan, 6, 8, 15, 24, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 82, 85, 87, 90, 97, 103, 104, 117, 123, 131, 133, 135
- Kebijakan Ekonomi, 8, 87
- Kementerian BUMN, 52, 56, 57, 58, 59, 70, 73
- Kementerian Keuangan, 52, 64, 73, 111
- Kemiskinan, 4, 89, 104
- Kendala, 81, 89, 92, 103, 136, 138
- Kesinambungan, 72, 138
- Ketimpangan, 4, 114, 115, 116
- Ketimpangan Ekonomi, 4
- Kuangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
- Kuangan Daerah, 104, 106, 108, 122, 128, 129
- Kuangan Negara, 52, 56, 61, 62, 64, 106, 119, 120, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 133, 134, 138
- Kuangan Pusat, 101, 102, 103, 104, 105
- Kewenangan, 53, 54, 60, 64
- Kinerja, 5, 11, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 63, 71, 73, 81, 88, 89, 112, 121, 126, 131, 132, 136, 137

Kinerja Keuangan, 51, 55, 56, 62
 Kinerja Perekonomian, 11, 47, 48, 51, 55
Knowledge networks, 73
 Konsep, 7, 31, 82, 88, 97, 120, 122, 125, 126, 131, 133, 137
 Konsumsi Pemerintah, 14, 15, 17, 18, 23
 Kredit, 3, 14, 155, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 61, 83, 93
 Kredit Modal Kerja, 28, 36
 Krisis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 80, 86, 88, 97, 103
 Krisis Asia, 2, 3
 Krisis Ekonomi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 86, 103
 Krisis Global, 3, 5, 6, 40
 Krisis Keuangan, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 88, 97
 Krisis Mata Uang, 3, 8, 10, 12, 13

L

Laba, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 63, 64, 72, 74, 75, 106
 Laporan keuangan, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 133, 135, 136
Leading Indicators 9
 Lembaga, 8, 28, 29, 34, 43, 49, 61, 74, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 99, 121, 123, 125, 128, 137
 Lembaga Intermediasi, 28, 29, 34, 43
 Lembaga Keuangan Internasional (LKI), 61
 Likuiditas, 3, 5, 8, 73, 92, 94, 95
Loan to Deposit Ratio, 29, 94

M

M2, 15, 19, 20, 23, 33, 38
 Manajemen, 7, 61, 62, 71, 91, 107, 120, 121, 123, 125, 126, 131, 134, 136, 137
 Manajemen Krisis, 7
 Margin, 94, 96
 Masyarakat, 28, 41, 52, 53, 59, 60, 64, 74, 80, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 102, 112, 120, 122, 123, 125, 126, 131, 133, 137, 138
 Menengah, 92, 97, 114
Metode Machine Learning, 9
 Modal, 3, 4, 5, 6, 28, 33, 34, 36, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 104
 Modal Asing, 6
 Modal Negara, 47, 48, 49, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 75
 Model *Binary Response*, 9, 11, 13
 Model Ekonometrik, 9
 Model Konvensional, 9, 11
 Model Logit-Probit, 9
 Model Non Parametrik, 9, 10
 Model *Ordered Probit*, 9, 12
 Model Parametrik, 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14
 Moneter, 4, 6, 33, 55, 63, 82, 86, 87, 97, 133
Moral Hazard, 9, 71
 Mudharabah, 83, 84, 85, 88, 93
 Multinomial Logit, 9, 12
 Murabahah, 83, 85, 96
 Musharakah, 83, 88

 N
 Nasabah, 20, 29, 34, 81, 93, 94, 96

- Nasional, 6, 28, 44, 47, 48, 52, 53,
60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74,
80, 82, 88, 89, 94, 97, 101, 102,
104, 123
- Negara, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 21,
30, 32, 40, 41, 42, 46, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 92,
102, 104, 105, 106, 107, 108,
112, 114, 17, 19, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
137, 138
- Negara berkembang, 11, 12, 30, 120
- Neraca Pembayaran, 5
- New Public Management*, 120, 126,
146
- Nilai Tukar Nominal, 11
- Nilai Tukar Riil, 12, 15, 23
- Nyata, 63, 94, 108, 134
- O**
- Organisasi Sektor Publik, 120, 123,
137, 138
- Otonomi, 103, 108, 109
- Otonomi Daerah, 56, 103, 108, 112,
115, 116, 130, 135
- Otoritas, 89, 90
- P**
- Pajak, 54, 55, 57, 63, 71, 97, 105,
106, 107, 108, 123, 126
- Pangsa, 81, 89, 91, 97
- Pasar Barang, 5, 86, 87
- Pasar Keuangan, 6, 28
- Pasar Modal, 3, 4, 5, 52, 80, 86, 87,
93, 94
- Pasar Tenaga Kerja, 5
- PDB, 4, 14, 15, 17, 18, 23, 32, 36, 37
- Pelaporan Keuangan, 122, 135
- Pelimpahan, 55, 116
- Pemantauan, 92
- Pembangunan, 52, 54, 60, 63, 67, 69,
72, 73, 74, 80, 88, 92, 94, 98,
103, 106, 107, 108, 111, 112,
113, 114, 116, 117
- Pembangunan Nasional, 52, 62, 72,
74, 88, 94
- Pemberdayaan, 60,
- Pembiayaan, 3, 29, 61, 62, 81, 83,
84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 108
- Pemerataan, 103, 104, 108, 114
- Pemerintah, 9, 14, 15, 17, 18, 23, 34,
42, 44, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60,
61, 62, 64, 67, 70, 71, 73, 74,
77, 81, 90, 94, 95, 97, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 115, 117, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138
- Pemerintah Daerah, 57, 102, 103,
105, 106, 108, 115, 116, 123,
128, 130, 135, 136
- Pemerintah Pusat, 55, 103, 105,
106, 107, 111, 130
- Pemerintahan, 74, 102, 104, 106,
107, 109, 111, 117, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
135, 136, 137, 138
- Pendapatan Asli Daerah, 74, 102,
104, 107, 109, 111, 117, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 135, 136, 137, 138
- Pendapatan Daerah, 106, 109
- Pendekatan Signal, 9, 10
- Pendidikan, 73, 111, 112, 123

- Penduduk, 4, 102, 104, 109, 111, 112, 114
- Penerimaan Negara, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 75
- Pengangguran, 4, 5, 87, 89
- Penyertaan Modal Negara (PMN), 48
- Penyimpangan, 137
- Perbankan, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- Perekonomian, 122, 129, 130
- Perekonomian Indonesia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128
- Perekonomian Nasional, 6, 44, 28, 47, 48, 52, 53, 60, 71, 72, 101
- Perhitungan Anggaran Negara (PAN), 128
- Perjan, 50, 51, 55
- Persero, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 73, 75, 105
- Perseroan Terbatas, (PT) 56
- Pertumbuhan Ekonomi, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 62, 79, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 98, 103, 104, 126, 134
- Perusahaan Umum (Perum), 51
- Physical capital*, 74
- Portofolio, 3, 93, 94
- Potensi, 7, 9, 20, 21, 71, 72, 87, 92, 106
- Prinsip, 28, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 105, 122, 125, 134, 136, 137
- Probabilitas, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24
- Produk, 5, 15, 55, 84, 85, 90, 93, 95, 96
- Produk Domestik Bruto, 4, 32, 36, 90
- Produktivitas, 36, 74, 88, 97
- Pusat, 27, 31, 32, 34, 47, 55, 77, 89, 84, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 129
- ## R
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 53
- RAPBN-P, 48
- Rasio, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 55, 73, 93, 95, 106
- Rebound*, 44
- Reformasi, 103, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 135, 136, 137, 138
- Riil, 12, 14, 15, 23, 29, 63, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97
- Ritel, 93
- ## S
- Saham, 5, 53, 54, 55, 60, 61, 86, 87
- Sektor, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 1225, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138

- Sektor ekonomi, 22, 36, 91, 92, 97
- Sektor Keuangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 51, 62, 70, 75, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 98, 102, 104
- Sektor Migas, 15, 16
- Sentralisasi, 102, 103, 106, 107, 108,
- Share, 36, 75
- Simpanan, 20, 29, 33, 34, 83
- Single Entry, 126, 127, 128
- Sisi Pengeluaran, 71, 126, 137
- Sistem, 4, 6, 19, 28, 33, 34, 53, 54, 73, 80, 81, 87, 88, 92, 95, 97, 101, 102, 104, 106, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138
- Sistem Akuntansi, 126, 127, 128, 129, 131, 136, 137, 138
- Sistem Akuntansi Instansi, 129
- Sistem Akuntansi Pusat, 129
- Sistem Ekonomi, 4, 54, 88, 97
- Sistem Keuangan, 28, 80, 81, 88, 97, 101, 102, 104, 106
- Stakeholder, 30, 31, 44, 121, 136
- Standar Akuntansi Pemerintah, 128
- Standar Akuntansi Pemerintahan, 122, 129, 130, 135, 138
- Strategis, 53, 67, 70, 71, 80, 90, 92, 112
- Struktur Permodalan, 60, 61
- Studi Empiris, 4, 9, 13
- Subprime Mortgage, 3, 17, 20, 21, 22, 80
- Suku Bunga, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 86, 96
- Syariah, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
- T**
- Tanggung Jawab, 54, 122, 130, 133
- Tata Usaha Keuangan, 128
- Time Series, 13, 30, 33
- Transaksi, 55, 74, 85, 87, 88, 96, 97, 124, 125, 126, 129, 131, 136
- Transfer, 34, 70, 71, 109, 115, 116
- Transparansi, 50, 131, 135, 136, 138
- U**
- Uang, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 61, 71, 72, 86, 87, 96, 105, 108, 125, 134
- Undang-Undang, 7, 51, 53, 59, 82, 83, 92, 102, 104, 128, 130, 138
- Universal, 88, 97
- Utang Luar Negeri, 17, 18, 19
- UUD 1945, 52, 71, 133
- V**
- Variabel Dependen, 9, 11, 32, 39, 40
- Variabel Independen, 9, 10, 11, 39
- Variabel Makroekonomi, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24
- Vector Autoregressive Regression, 31
- Vector Error Correction Model, 33

BIOGRAFI EDITOR



Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun

1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree* di bidang *Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB,

UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

BIOGRAFI PENULIS

Rasbin, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal, Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja, Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, *Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia*, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektor, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor di Indonesia tahun 2005 - 2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan

Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: ras9bin@yahoo.co.id.

Ari Mulianta Ginting adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Ditugaskan sebagai Tim Pendukung Badan Legislasi DPR RI, melakukan pendampingan pembentukan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Revisi Undang-Undang Keuangan Negara, harmonisasi RUU Resi Gudang, serta melakukan pendampingan dalam Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2015, penulis mendampingi dalam RUU Bank Indonesia sampai dengan sekarang. Penulis terlibat Panitia Khusus (Pansus) RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, kemudian pada tahun 2013 terlibat dalam Pansus RUU Revisi Keuangan Negara. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik diantaranya tahun 2011 Penelitian tentang Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, tahun 2012 Penelitian Tentang Asuransi Umum dan Tahun 2013 tentang Industri Berbasis Input Lokal. Tahun 2014, penulis menjadi bagian dalam kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan topik mengenai Perkembangan Panas Bumi di Indonesia, dan secara paralel mengikuti Penelitian Lintas Tim Lintas Bidang dengan topik mengenai Evaluasi Kinerja KPK. Dan pada tahun 2015, penulis terlibat dalam tim penelitian Ekonomi

dan Kebijakan Publik dengan topik Dampak Kebijakan Baru Subsidi BBM terhadap Inflasi di Indonesia. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 hingga sekarang untuk mata kuliah Statistika I dan II untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Harapan untuk mata kuliah Pengantar Ekonometrika. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id

Ariesy Tri Mauleny, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2007 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dengan kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah. Pendidikan Sarjana S1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 1997. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Penulis juga turut mendampingi Pansus RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (2014), RUU Penjaminan (2015), PNPB (2015). Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal dan Bagian Buku, antara lain: APBN 2016 dan Tantangan Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi; Kemampuan Keuangan Negara dalam Perspektif Pemenuhan Anggaran dan kebijakan Sektor Pendidikan; Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam Perspektif Anggaran dan Kebijakan; Keuangan Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan MP3EI Sektor Pertambangan: Upaya Memperkuat Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia; dan Urgensi RUU Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui *Good Governance*. Penulis dapat dihubungi melalui email: ariesy.t.leny@gmail.com atau ariesy.t.leny@dpr.go.id;

Nidya Waras Sayekti, lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai

berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara (2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJTI dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013).

Lisnawati, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Pendidikan S2 diselesaikan di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik diantaranya penelitian tentang Konektivitas. Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati.dpr@gmail.com

Venti Eka Satya, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan penulis diantaranya, Peran Diplomasi Indonesia Dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata Nasional, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan yang terakhir Mengenai Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: venti.eka@dpr.go.id.

PERAN SEKTOR KEUANGAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Buku yang berjudul **"Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia"** ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Di samping itu, buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan dampaknya terhadap perekonomian di masa yang akan datang.

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama mengungkap tentang perkembangan *early warning system* keuangan di Indonesia. Dalam bab ini diberikan antara lain tinjauan teori dan empiris mengenai model-model parametrik yang telah ada dalam melihat krisis perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak pertumbuhan kredit sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi pada bab dua. Bab tiga mendiskusikan kebijakan penyertaan modal negara pada BUMN untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Dilanjutkan dengan pembahasan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil di bab empat. Dua bab lainnya membahas mengenai sistem keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional (Bab 5) dan perkembangan perubahan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bab 6).



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-39-6



9 786021 247396